



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR

PUPR 2023



KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT



INFORMASI
STATISTIK
INFRASTRUKTUR

2023

INFORMASI
STATISTIK
INFRASTRUKTUR
PUPR

2023

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2023

Setia Dewi Prihapsari
Mayta Utari
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi
Naufal Azaki
Rozi Abrori Fathurrochim
Nita Fikhriani Azhari
Shinta Afwa Nisaa

Maret, 2024

Pemegang Hak Cipta
Pusat Data dan Teknologi Informasi

No. ISBN

Diterbitkan Oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusat Data dan Teknologi Informasi
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Informasi lebih lanjut
pusdatin@pu.go.id



KATA PENGANTAR



Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun masukan positif dalam penyusunan Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur PUPR Tahun 2023 ini.

Pada edisi ini, BIS dirancang dengan menyesuaikan kontekstualisasi agenda prioritas nasional sehingga menyajikan berbagai data statistik infrastruktur PUPR yang termasuk dalam data prioritas Satu Data Indonesia. Data yang disajikan diperoleh dari kolaborasi dengan produsen data baik internal maupun eksternal. Berbagai data tersebut telah melewati proses pengolahan dan penjaminan mutu, serta disajikan dalam satuan tingkat nasional, provinsi, beserta analisis singkatnya.

Buku Informasi Statistik (BIS) Infrastruktur PUPR Tahun 2023 dapat diakses melalui Portal Open Data (data.pu.go.id). Portal Open Data dibangun sebagai salah satu bentuk bagi pakai dan integrasi data terbuka di Kementerian PUPR. Di dalamnya juga tersedia dataset, visualisasi, infografis, artikel data, dan berbagai layanan terkait ekosistem data Kementerian PUPR yang dapat dengan mudah diakses oleh publik.

Kami berharap penyusunan BIS 2023 ini menjadi salah satu implementasi dari pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan menghasilkan produk yang menjadi sumber referensi terkait data dan informasi infrastruktur PUPR. Upaya ini adalah ikhtiar mewujudkan data driven organization dan evidence-based policy, di mana seluruh proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi didasarkan pada data yang kredibel serta akurat.

Jakarta, Maret 2024

M. Zainal Fatal
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



DAFTAR ISI

INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR

GAMBARAN UMUM INDONESIA

Geografis Wilayah	10
Administrasi Wilayah	12
Demografi Wilayah	14
Ekonomi Wilayah	15
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	19

21	APBN PUPR	22
	APBN Kementerian PUPR	

SUMBER DAYA AIR

Bendungan Beroperasi	28
Danau, Situ, Embung	31
Pengendali Sedimen	34

BINA MARGA

Jalan Nasional	39
Jalan Daerah	42
Jalan Tol Beroperasi	47
Jalan Tol Konstruksi	50
Jembatan	52
Jembatan Khusus	53
Jembatan Gantung	54

57

CIPTA KARYA

Sistem Penyediaan Air Minum	58
Kinerja BUMD Air Minum	60
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	65
IPAL	67
IPLT	69
Bina Penataan Bangunan PLBN	71
Penataan Bangunan dan Lingkungan	72
Fasilitas Pendidikan	73
Sarana Olahraga	75
Pasar Rakyat	77
Pengembangan Kawasan Permukiman	78
	79

35

PERUMAHAN

Rumah Susun	85
Rumah Khusus	88
Bantuan Stimulan	91
Perumahan Swadaya	
Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)	94

BINA KONSTRUKSI

Badan Usaha Jasa Konstruksi	98
Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi	101
Tenaga Kerja Konstruksi	106

113

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengarusutamaan Gender	120
------------------------	-----

125

PENUTUP

97

Data dapat diakses melalui



data.pu.go.id

GAMBARAN UMUM INDONESIA



BAB

01



Bukit Sibeabea, Sumatera Utara

GAMBARAN UMUM INDONESIA

GEOGRAFIS WILAYAH

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2023 Indonesia memiliki 17.001 pulau, termasuk 6 pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Timor, dan Papua). Hal tersebut, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara terluas di Asia dengan luas wilayah Indonesia mencapai 1.892.410,09 km². Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° 04' 30" Lintang Utara dan 11° 00' 36" Lintang Selatan serta antara 94° 58' 21" sampai dengan 141° 01' 10" Bujur Timur serta dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Secara letak geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut dan Samudra Hindia di sebelah Barat. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia di sebelah Barat Laut dan Benua Australia di sebelah Tenggara.

BATAS-BATAS NEGARA

Sebelah Utara

Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan

Sebelah Selatan

Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia

Sebelah Barat

Samudra Hindia

Sebelah Timur

Papua Nugini dan Samudra Pasifik

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 28,25% dari total luas Indonesia atau sebesar 534.698,46 km². Pulau Kalimantan juga merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk Papua Nugini). Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Pulau Kalimantan merupakan Provinsi terluas yang ada di Indonesia dengan luas sebesar 153.443,91 km². Sementara itu, Kalimantan Timur yang menjadi lokasi untuk perpindahan Ibu Kota Nusantara memiliki luas sebesar 126.981,28 km² dan merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia.

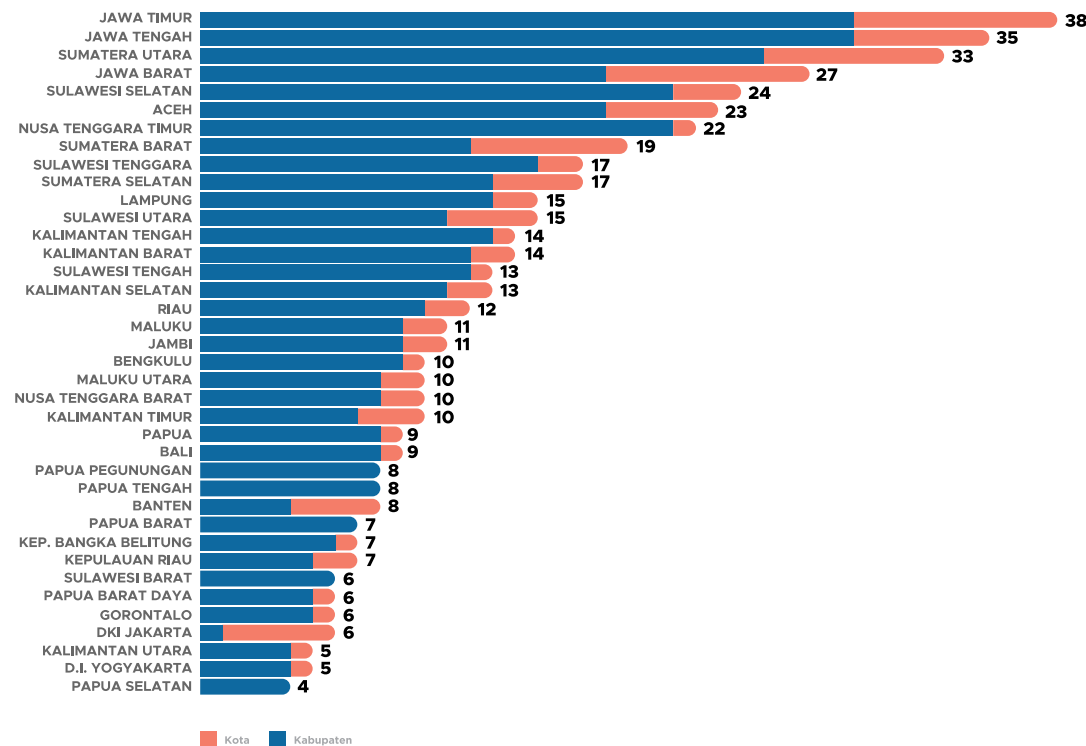


ADMINISTRASI WILAYAH

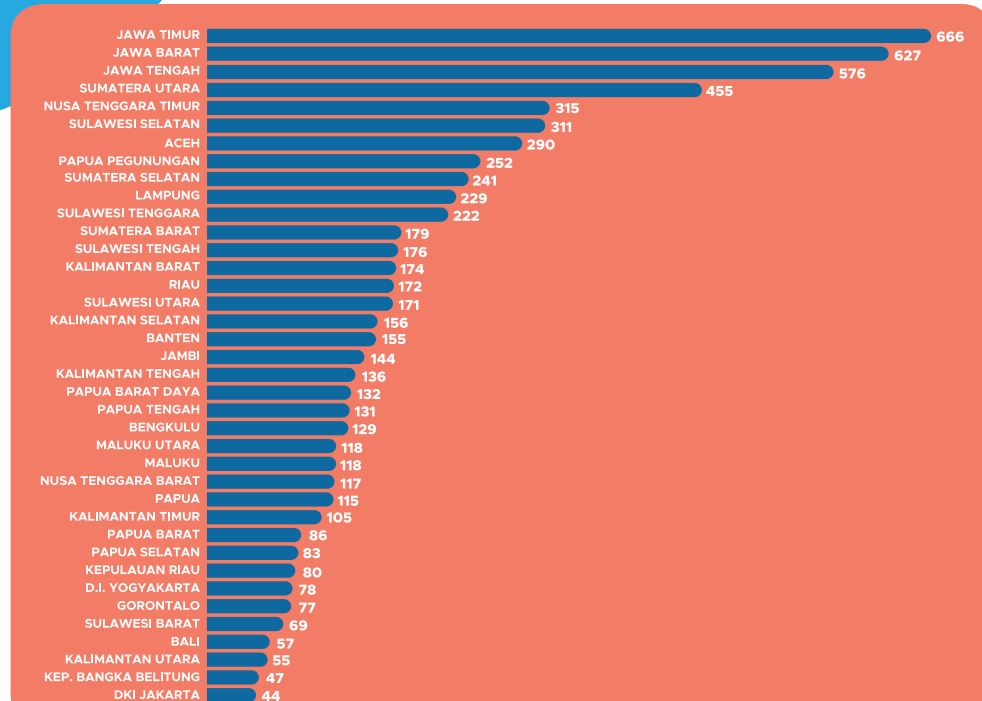
Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh para Menteri yang ditunjuk. Pemerintah menerapkan prinsip otonomi daerah karena Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar serta kondisi geografi dan budaya yang beragam. Diselanggarakannya otonomi daerah menandakan Pemerintah mengakui kemandirian masyarakat dan daerah otonom tersebut. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut terdiri atas Kabupaten dan Kota dengan pemerintahan daerahnya masing-masing. Sejak berlakunya Daerah Otonom Baru (DOB) pada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia resmi memiliki 38 Provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 kota.

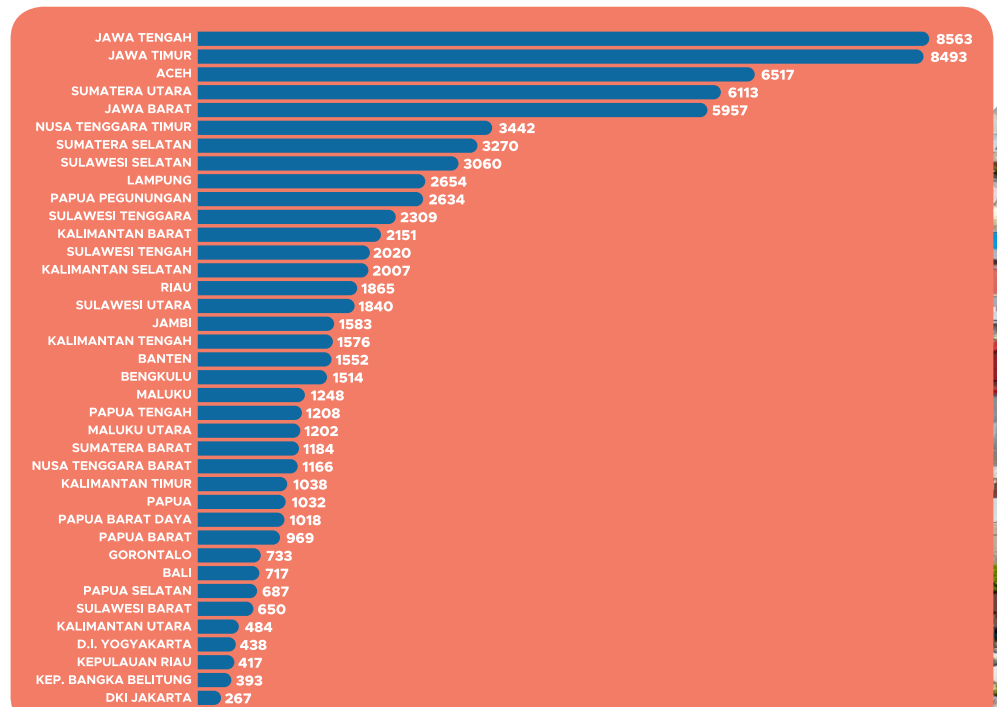
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 29 kabupaten. Provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota. Sementara untuk jumlah kecamatan dan desa di tahun 2023 tercatat sebanyak 7.288 kecamatan dan 83.971 desa.



Jumlah kabupaten dan kota berdasarkan provinsi tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)



Jumlah kecamatan berdasarkan provinsi tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)



Jumlah desa berdasarkan provinsi tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

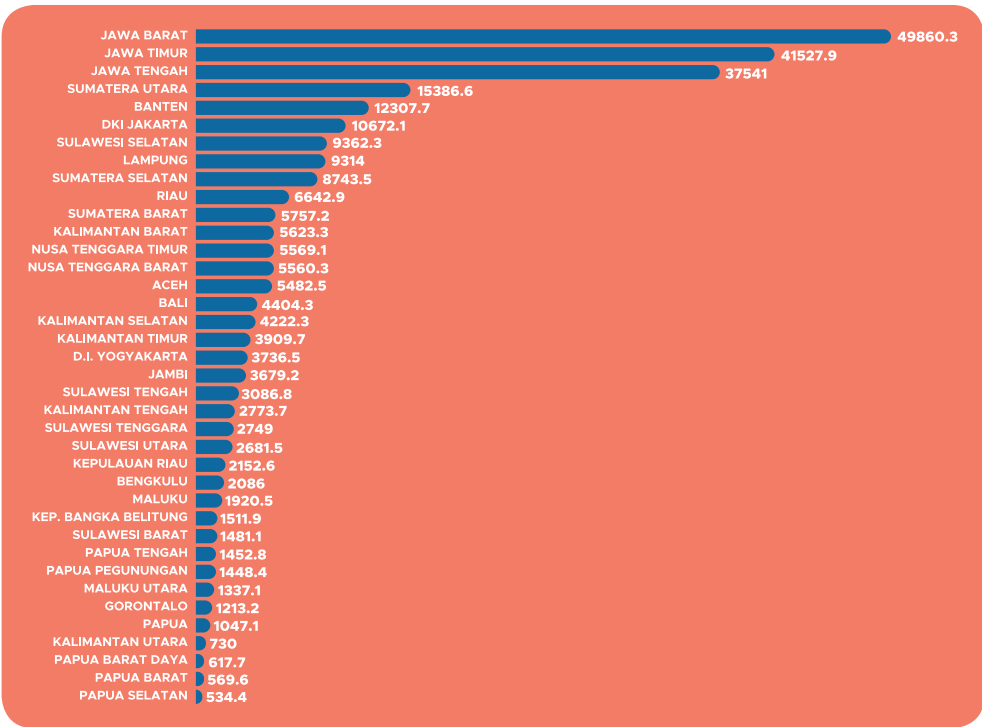
DEMOGRAFI WILAYAH

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sebagai bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, serta bahasa daerah yang beragam. Meskipun banyak perbedaan adat dan budaya yang ada di Indonesia tak lantas menjadikan Indonesia bercerai-berai. Justru hal itu yang membuat Indonesia memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Sebagai negara yang majemuk, toleransi dan kerukunan menjadi nilai yang tertanam dalam Pancasila sebagai dasar negara. Jika melihat jumlahnya, berdasarkan data BPS dalam sensus penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air. Jumlah populasi suku Jawa mencapai 40,22% dari total populasi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terdapat 718 bahasa yang tersebar di tanah air. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan jumlah bahasa terbanyak yaitu 326 bahasa daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050 hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2023 mencapai 278.696,2 ribu jiwa. 3 Provinsi di pulau Jawa menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 128.929.2 ribu jiwa. Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia yaitu 49.860,3 ribu jiwa. Provinsi Papua Selatan yang merupakan provinsi yang baru disahkan pada akhir tahun 2022 menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 534,4 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi BPS di tahun 2023 adalah sebesar 1,13%; melambat dibanding tahun tahun 2022 yang mencapai 1,17%.

Sebaran penduduk Indonesia hingga tahun 2023 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 155.645,5 ribu jiwa atau setara dengan 55,8% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia. Pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 57.091,9 ribu jiwa atau sebesar 20,48% dari total penduduk Indonesia.

Sebaran penduduk Indonesia hingga tahun 2023 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang mencapai 155.645,5 ribu jiwa atau setara dengan 55,8% dari total penduduk Indonesia



Jumlah penduduk indonesia tahun 2023 (ribu)

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

EKONOMI WILAYAH

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SEKTOR KONSTRUKSI INDONESIA

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nilai PDB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB

merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. PDB disusun dengan mencakup 17 kategori lapangan usaha, mulai dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan, hingga Konstruksi.

Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB atas dasar harga

berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB atas dasar harga konstan.

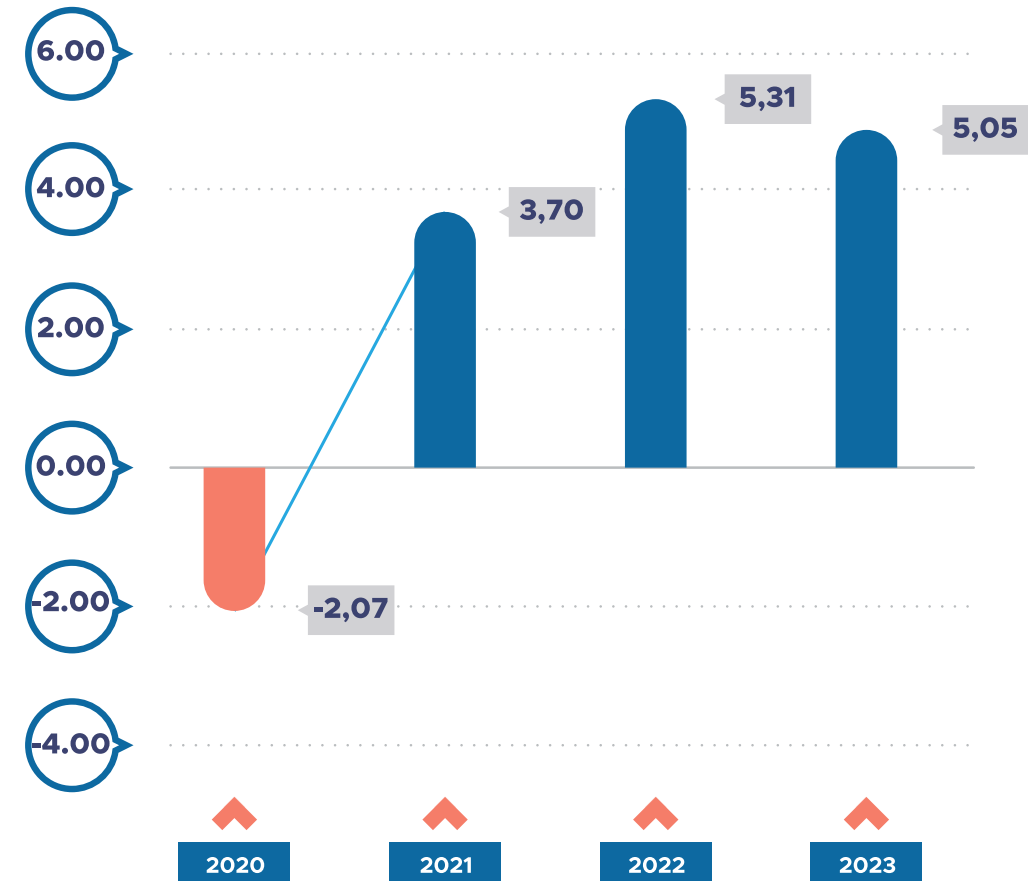
Indikator laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kemajuan dan keadaan ekonomi dalam periode tertentu.

Perkembangan laju PDB atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2020 mengalami koreksi cukup tajam sebagai imbas dari kondisi pandemi Covid-19,

dimana hampir semua aktivitas ekonomi mengalami penurunan/pelambatan. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan PDB di tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga pertumbuhan berada pada level -2.07%. Pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan PDB mencapai 3.69%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan PDB kembali mengalami peningkatan pada level 5.31%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan PDB mencapai sebesar 5.05%.



Perhitungan nilai PDB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

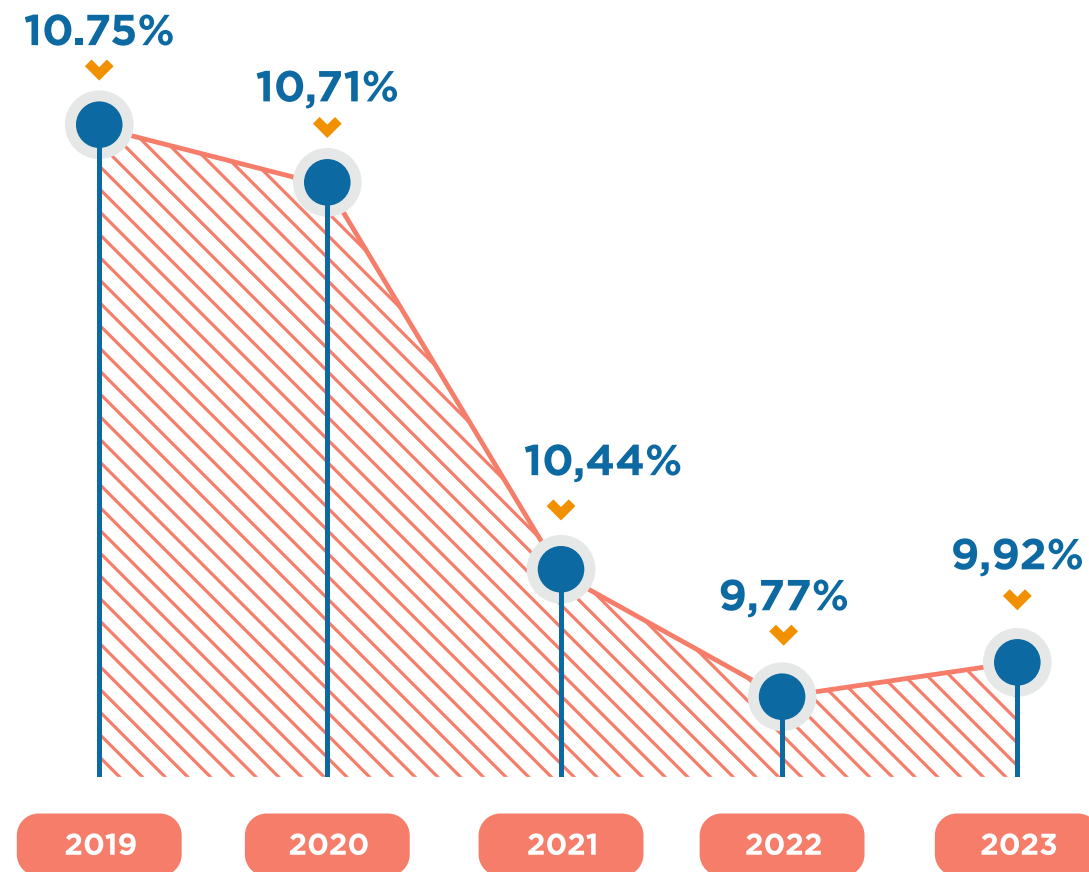


Laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2010

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

Infrastruktur adalah motor penggerak perekonomian suatu negara dan oleh karenanya pembangunan infrastruktur turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Aktivitas ini tercermin dalam sektor konstruksi dimana menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), konstruksi adalah kegiatan ekonomi berupa konstruksi umum dan

konstruksi pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Peran sektor konstruksi sendiri cukup besar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setidaknya dalam 5 tahun terakhir dimana rata-rata kontribusinya mencapai 10,31%. Adapun pada tahun 2023 kontribusinya mencapai 9,92% terhadap PDB Nasional.



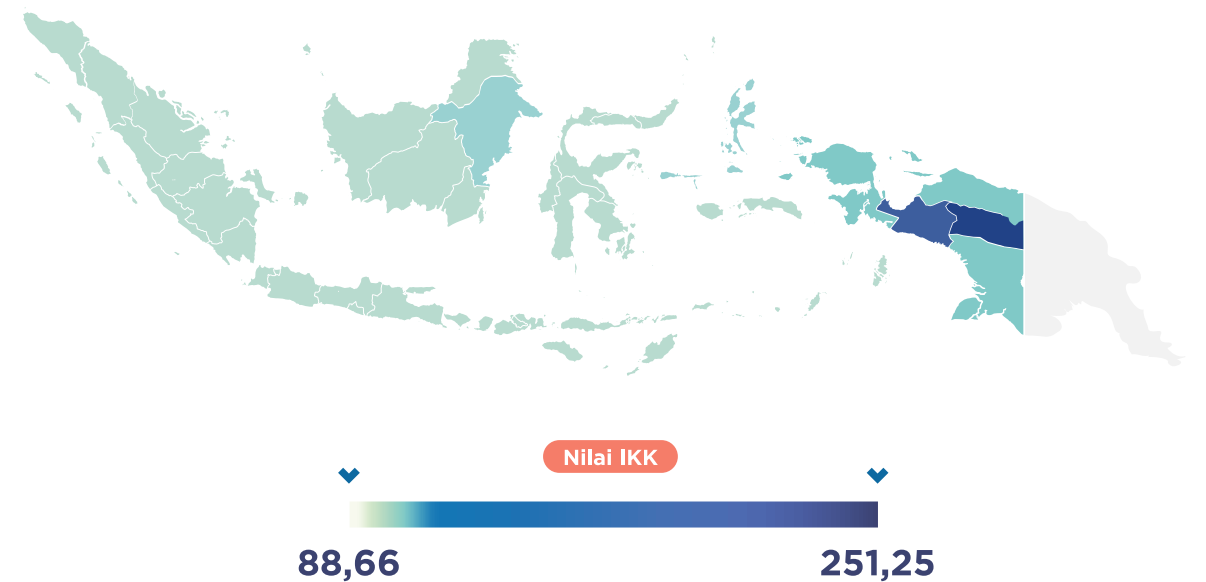
Persentase PDB Atas Harga Berlaku Sektor Konstruksi

Sumber : Badan Pusat Statistik (Februari 2024)

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

Berkaitan dengan sektor konstruksi dan pembangunan infrastruktur, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah dimana semakin sulit letak geografisnya maka nilai IKK akan semakin tinggi yang mencerminkan tingginya tingkat

harga/biaya pembangunan di daerah tersebut. Indikator IKK telah dihitung dan digunakan sejak tahun 2003 dan terus mengalami penyesuaian dari segi metode dan formulasi perhitungannya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan sekaligus kesulitan aksesibilitas infrastruktur dan sektor konstruksi di suatu daerah. Pada tahun 2023, provinsi dengan nilai IKK tertinggi berada di Papua Pegunungan (251,25) dan Papua Tengah (215,86). Provinsi dengan IKK terendah berada di Lampung (88,65) dan Sumatera Selatan (91,39).



Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berdasarkan provinsi

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023



APBN

KEMENTERIAN

PUPR



BAB

02



Gedung Kemen. PUPR, Jakarta

Sumber : <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/06/the-power-of-energy-efficiency-to-achieve-net-zero-emissions.html>

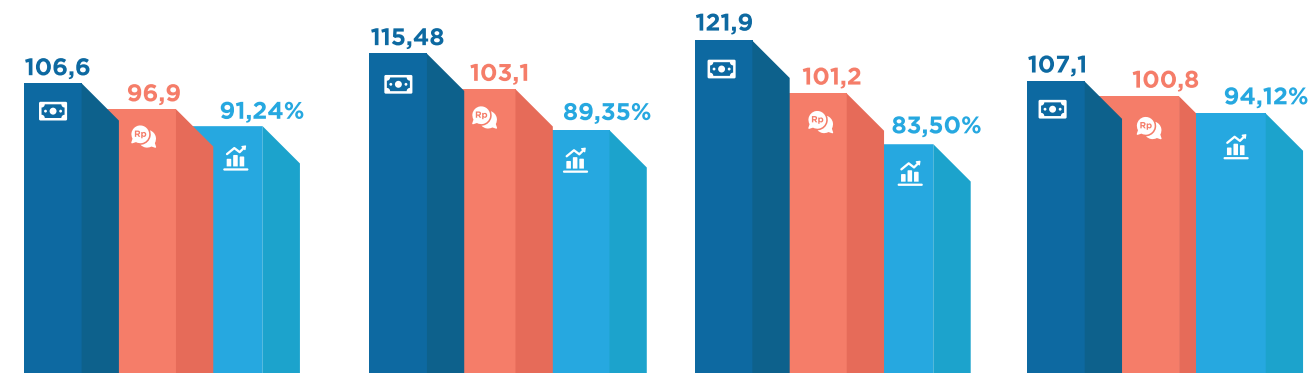
APBN
KEMENTERIAN
PUPR

02

Pembangunan infrastruktur merupakan *backbone* bagi pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan infrastruktur yang handal tidak hanya menjadi roda penggerak sektor ekonomi, melainkan berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah, distribusi barang, dan lainnya. Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara yang memadai serta berbagai kebijakan yang dapat mengakselerasi pembangunannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian/lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. Pada tahun 2023 Kementerian PUPR mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp.182 Triliun. Anggaran ini pun mengalami tren kenaikan tiap tahunnya baik dari segi alokasi maupun realisasi sebagai bukti dari komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur agar layanan dasar masyarakat tersedia.

Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur terus dilakukan dengan mengalokasikan anggaran belanja negara yang memadai

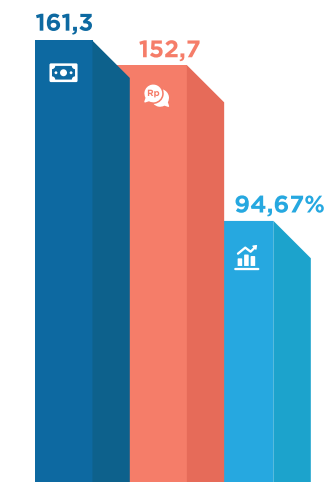


2017

2018

2019

2020



2021

2022

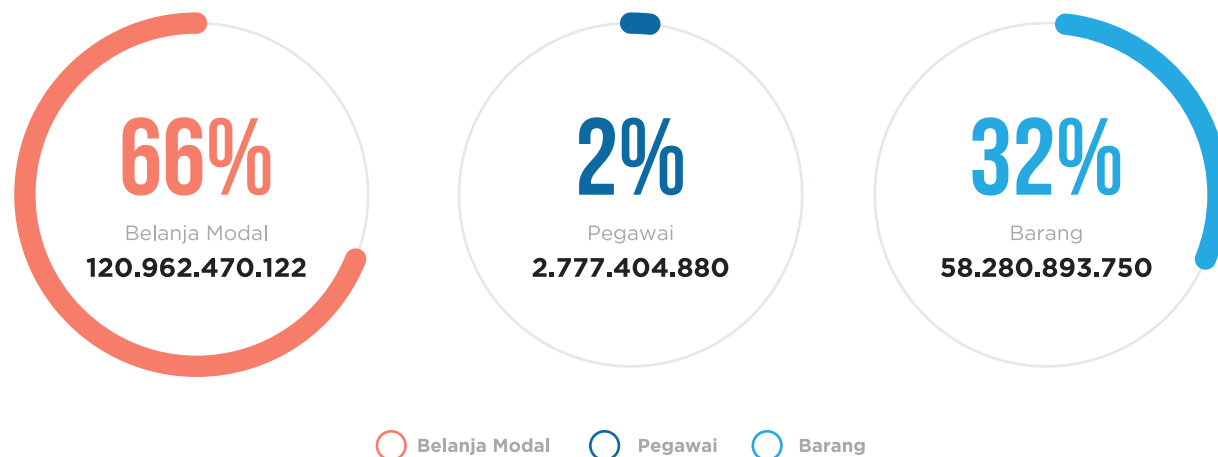
2023

Anggaran Realisasi % Realisasi

APBN Kementerian PUPR

Sumber Data : Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2017-2023
Status Data : 2024

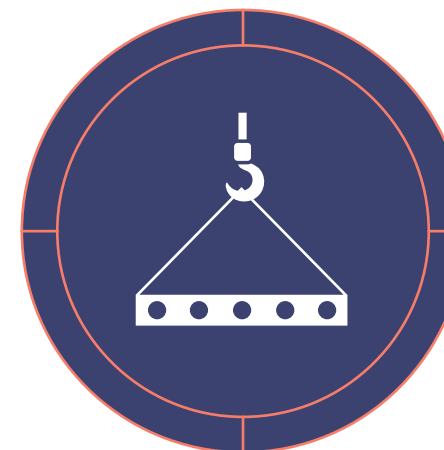
Berdasarkan jenis belanja, APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase terbesar pengalokasian APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah belanja modal yaitu sebesar 66% atau senilai Rp.120 triliun. Belanja barang memiliki persentase sebesar 32% atau senilai Rp.58 triliun, dan sebesar 2% dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp.2,7 triliun. Adapun detail data dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



APBN Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja (ribu rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023
Status Data : 2024

Berdasarkan jenis program, APBN Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk 5 jenis program, antara lain pengelolaan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, pengembangan perumahan dan permukiman, program dukungan manajemen, dan program pendidikan-pelatihan vokasi. Anggaran terbesar dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas yaitu senilai Rp.86,5 triliun atau sebesar 47,55% dari total anggaran dan tertinggi kedua dialokasikan untuk program ketahanan sumber daya air yaitu senilai Rp.47,5 triliun atau sebesar 26,15% sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



143.746.531
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

47,55%

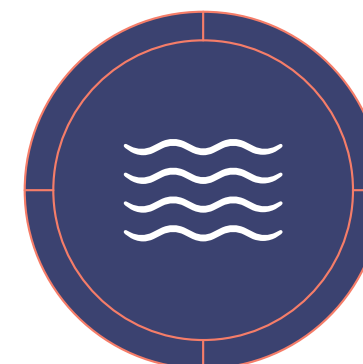
86.556.571.740
Program Infrastruktur konektivitas

APBN Kementerian PUPR Tahun 2023

Sumber Data : Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023
Status Data : 2024



39.810.791.838
Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman



26,15%

47.591.563.747
Program Ketahanan Sumber Daya Air



7.918.094.896
Program Dukungan Manajemen

Sumber data: Laporan Kinerja Kementerian PUPR Tahun 2023
Status Data: 2024



Persentase terbesar pengalokasian APBN Kementerian PUPR Tahun 2023 adalah belanja modal yaitu sebesar 66% atau senilai Rp.120 triliun



SUMBER DAYA AIR



BAB

03



Bendungan Lolak, Sulawesi Utara

Sumber : <https://www.rri.co.id/hasional/473674/lima-bendungan-siap-diresmikan-awal-2024-ini-daftarnya>

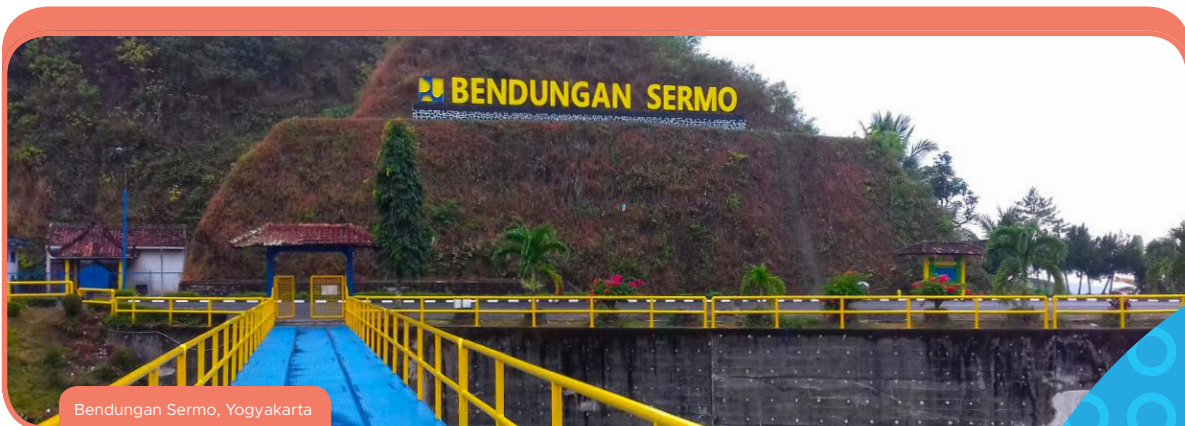
SUMBER DAYA AIR

03

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan salah satu unit organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, antara lain bendungan, embung, jaringan irigasi, prasarana pengendali banjir, lahar dan pengaman pantai, serta sarana dan prasarana air tanah dan air baku. Bab ini memaparkan berbagai data dan perkembangan pembangunan infrastruktur bidang pengelolaan sumber daya air.



mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan

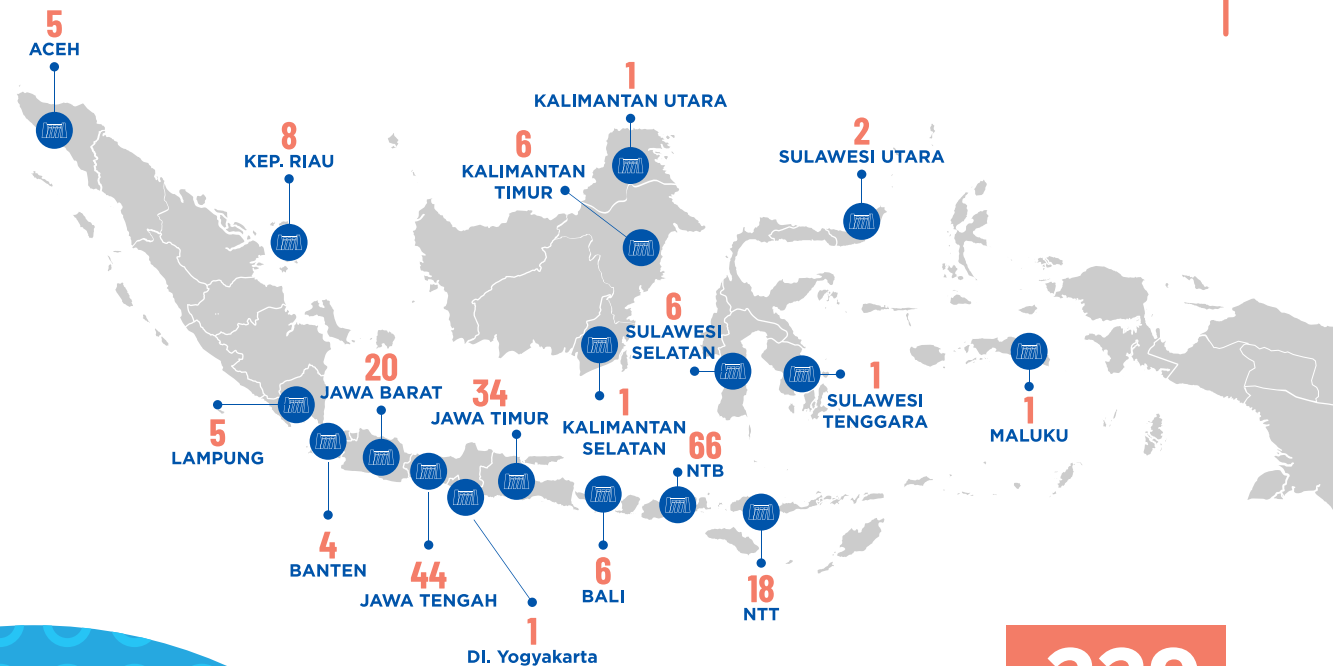


Bendungan Sermo, Yogyakarta

A. Bendungan Beroperasi

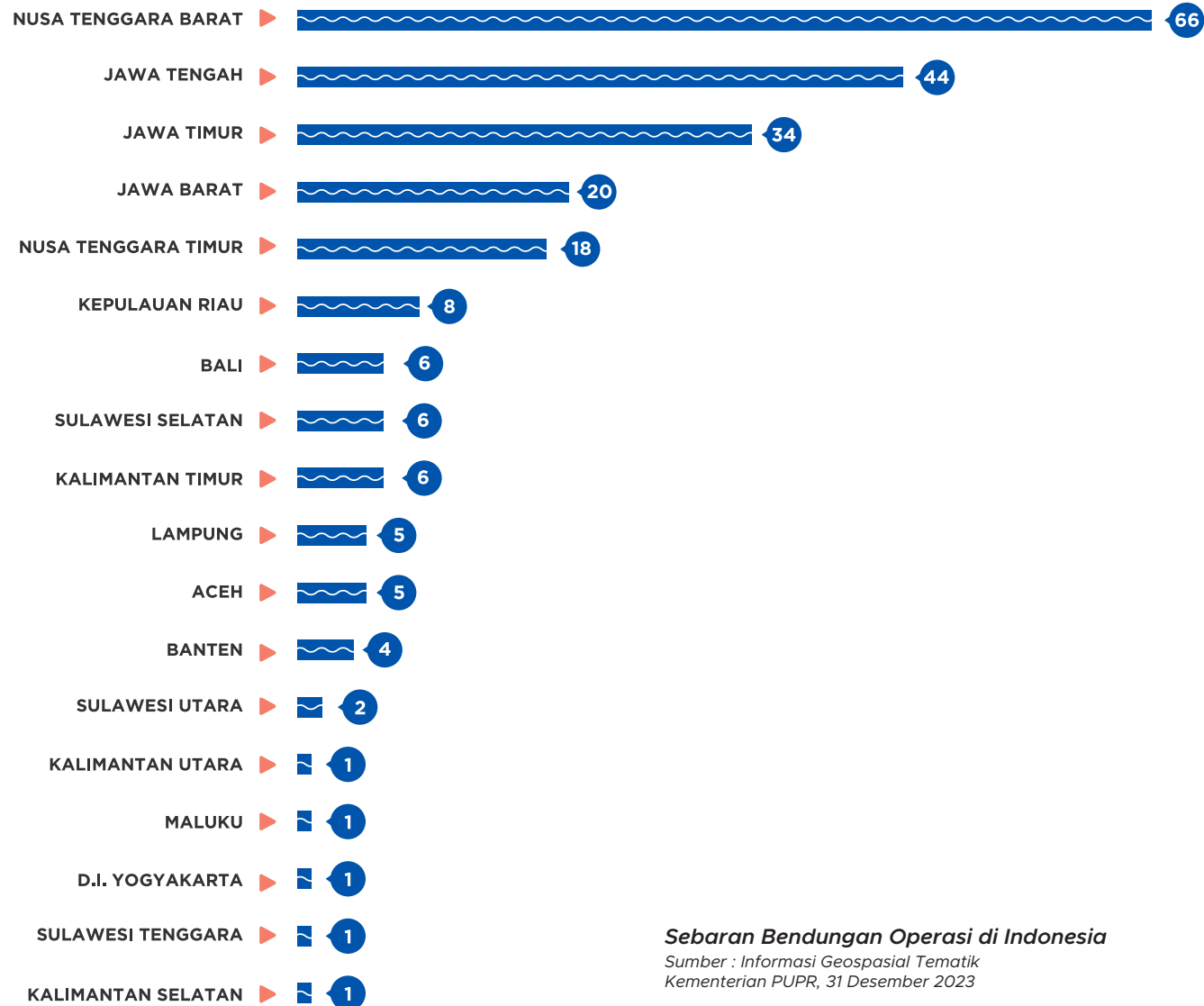
Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, dijelaskan bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur.

Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Tujuan pembangunan bendungan ada dua, yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Berikut ini adalah jumlah bendungan di setiap provinsi yang berada dalam pengelolaan Kementerian PUPR.



229

Bendungan Beroperasi



Sebaran Bendungan Operasi di Indonesia

Sumber : Informasi Geospasial Tematik
Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran bendungan beroperasi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Desember 2023 terdapat 229 bendungan beroperasi yang tersebar di 18 provinsi dimana terbanyak berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 66 bendungan.

B. Danau, Situ, Embung

Danau merupakan tampungan air yang dikelilingi oleh daratan dan terbentuk akibat dari proses alami seperti aktivitas tektonik, vulkanik, dll. Situ atau yang disebut dengan nama lain sesuai daerah, adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dan merupakan sumber air baku yang airnya berasal dari tanah, air hujan dan/atau sumber air lainnya. Sementara embung merupakan waduk berukuran mikro yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering. Pembangunan embung dapat mencegah banjir saat musim hujan dan menjadi persediaan air saat kemarau.

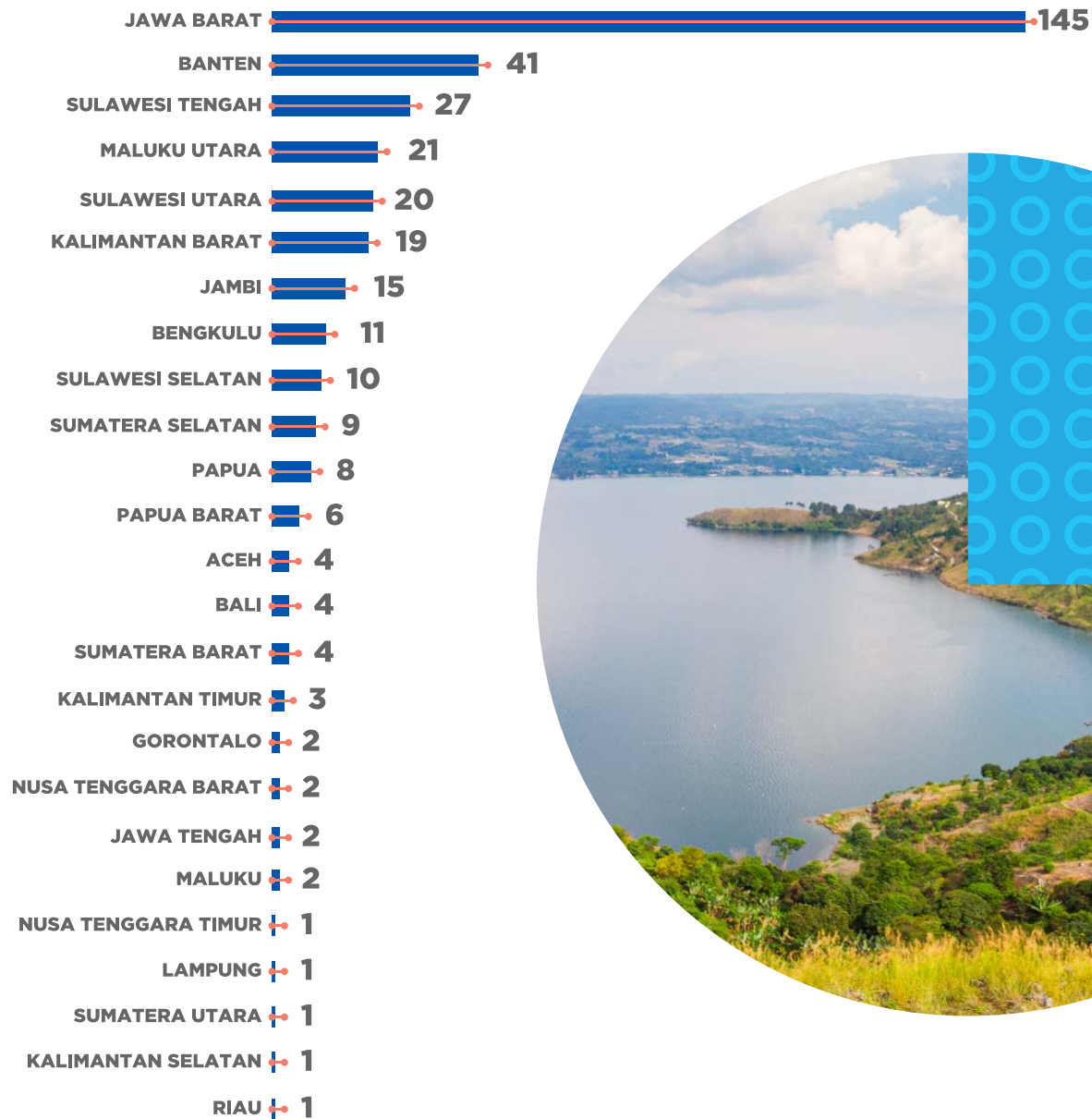
Selain infrastruktur bendungan, danau, situ dan embung menjadi aset infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sebagai tampungan atau cadangan air bagi manusia. Beberapa danau di Indonesia mengalami kondisi kritis baik dari volume danau yang menyusut ataupun kualitas danau yang menurun. Terhadap danau-danau kritis tersebut, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi untuk mengembalikan fungsi tampungan air.

Berikut ini sebaran danau, situ dan embung di menurut provinsi yang tercatat di Kementerian PUPR.



Tujuan pembangunan bendungan ada dua, yaitu single purpose dam dan multi purpose dam





Jumlah Danau berdasarkan Provinsi

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

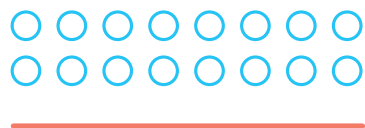
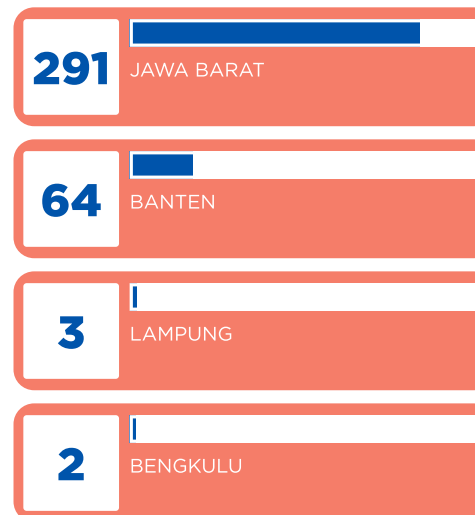


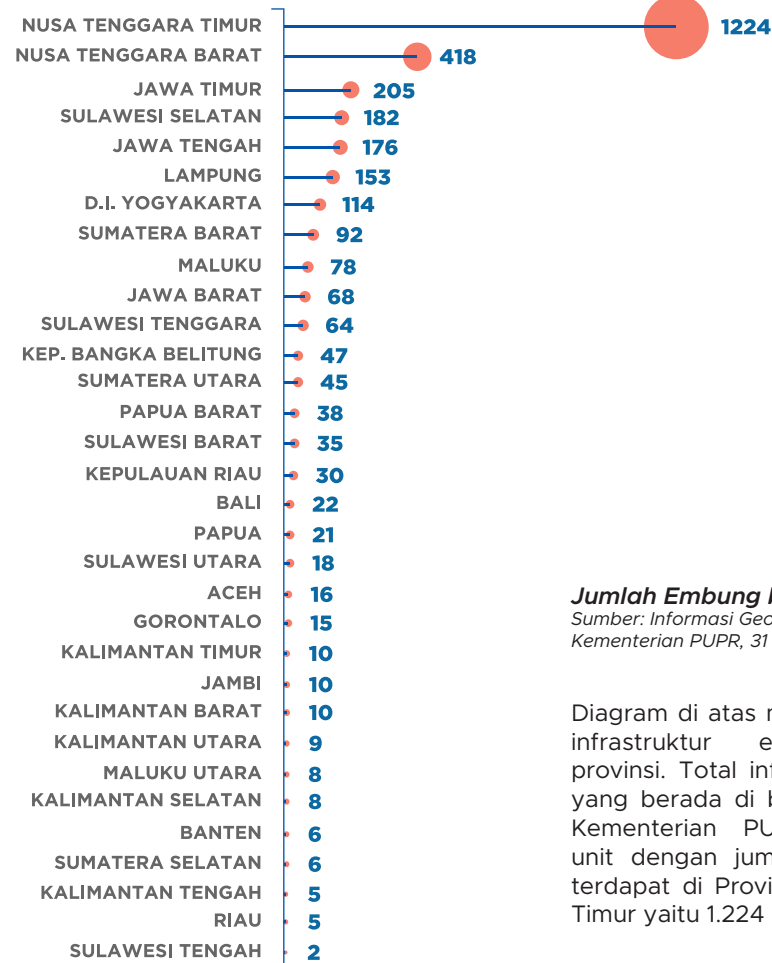
Diagram di atas merupakan sebaran jumlah danau di Indonesia. Total infrastruktur danau yang berada di bawah pengelolaan Kementerian PUPR adalah 360 danau dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 145 danau.



Jumlah Situ berdasarkan Provinsi

Sumber : Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di samping merupakan sebaran jumlah situ di Indonesia. Sampai dengan Desember 2023, jumlah situ yang berada di bawah pengelolaan Kementerian PUPR berjumlah 360 situ. Provinsi dengan situ paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat yaitu 291 situ.



Jumlah Embung berdasarkan Provinsi

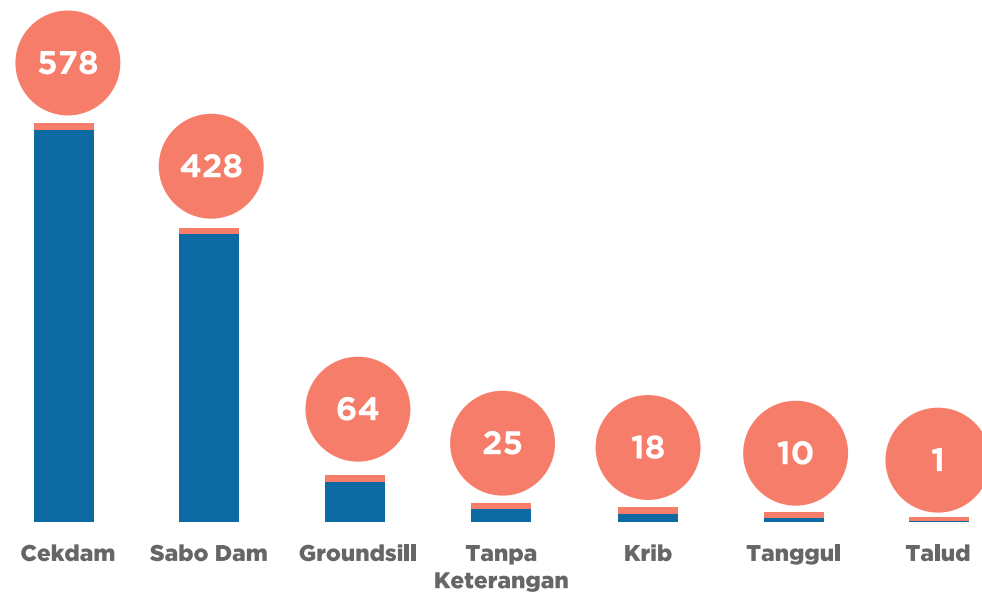
Sumber: Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas merupakan sebaran infrastruktur embung menurut provinsi. Total infrastruktur embung yang berada di bawah pengelolaan Kementerian PUPR adalah 3.140 unit dengan jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 1.224 embung.

C. Pengendali Sedimen

Bangunan-bangunan pengendali sedimen berfungsi untuk mengendalikan sedimen dengan memperlambat gerakan dan secara berangsur-angsur mengurangi volume sedimen. Bangunan sedimen juga perlu dievaluasi untuk

mengetahui bangunan sedimen tersebut masih mampu atau tidak menampung sedimen karena seiring waktu dan perubahan tata guna lahan yang menyebabkan erosi volume sedimen cenderung meningkat. Bangunan pengendali sedimen yang telah dibangun Kementerian PUPR terdiri dari Cekdam, Groundsill, Krib, Sabo Dam, Talud, dan Tanggul.



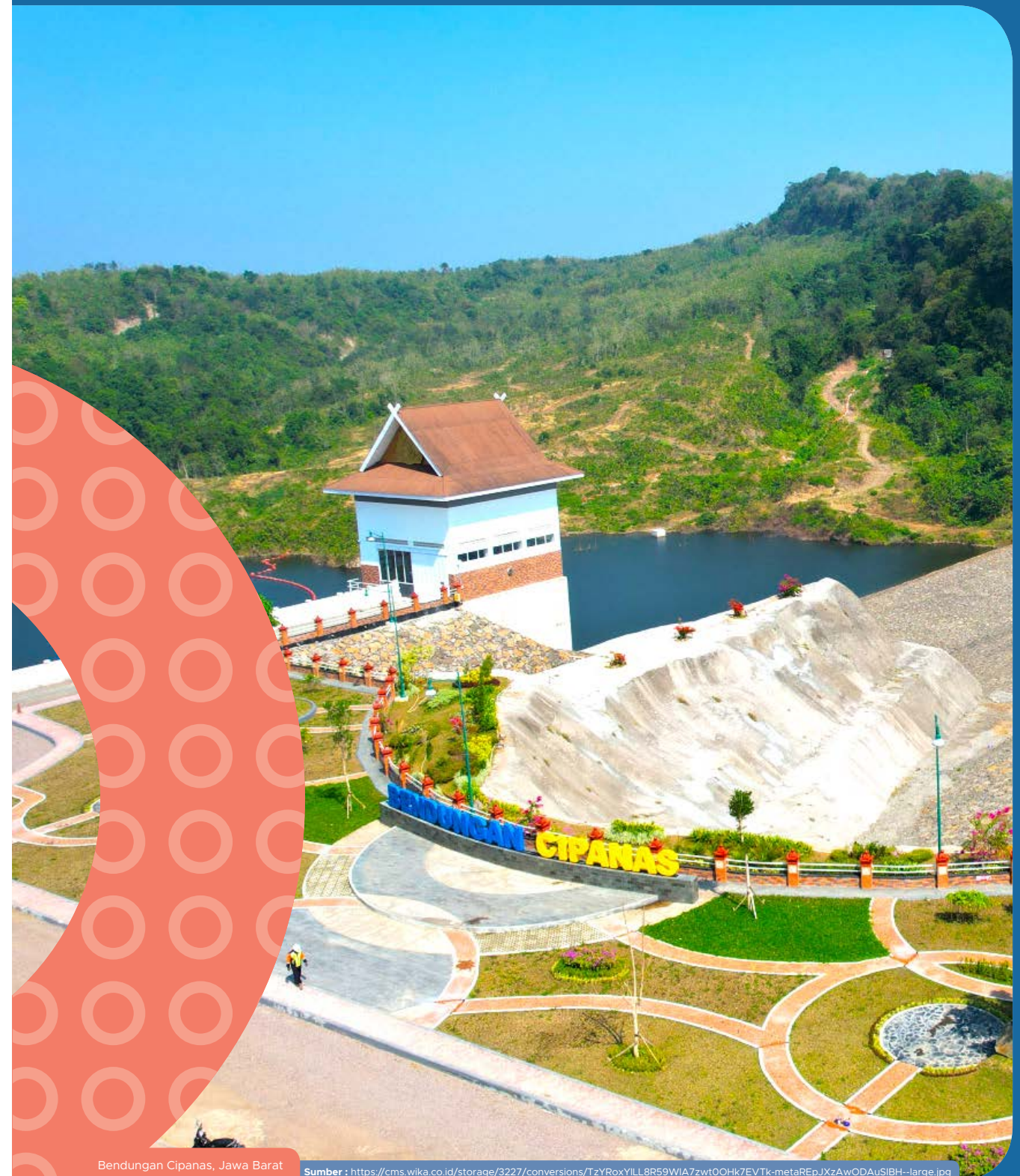
Jumlah Infrastruktur Pengendali Sedimen

Sumber: Informasi Geospasial Tematik Kementerian PUPR, 31 Desember 2023

Diagram di atas menunjukkan banyaknya infrastruktur pengendali sedimen di Indonesia. Bangunan pengendali sedimen terbanyak yaitu Cekdam sebanyak 578 unit dan Sabo Dam sebanyak 428 unit. Sementara itu, hanya 1 Talud yang telah dibangun.

Cekdam atau check dam merupakan bangunan yang dibuat melintang sungai yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran permukaan dan menangkap sedimen yang dibawa

aliran air sehingga kedalaman dan kemiringan sungai berkurang. Sementara itu, Sabo Dam berfungsi untuk mengendalikan dasar sungai bagian hilir agar tetap stabil meskipun ada suplai material atau sedimen yang terangkut oleh aliran air, dengan kata lain sabo dam akan mengarahkan laju aliran lahar dan mengendalikan seberapa banyak material yang diijinkan menuju ke hilir. Sabo dam banyak dibangun untuk mengurangi risiko banjir lahar gunung api.



Bendungan Cipanas, Jawa Barat

Sumber : <https://cms.wikia.co.id/storage/3227/conversions/TzYRoxYILL8R59WIA7zwtOOHk7EVTk-metaRepJXzAwODAuSIBH--large.jpg>

BINA MARGA



BAB

04



Jembatan Pejalan Kaki Elo, Jawa Tengah

BINA MARGA

04

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 mendefinisikan Jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Adapun Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Undang Undang Jalan mengatur perihal pembagian wewenang penyelenggaraan jalan, dimana Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, penyelenggaraan Jalan secara umum dan Jalan Nasional. Adapun Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pada Jalan Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa yang berada di wilayahnya.

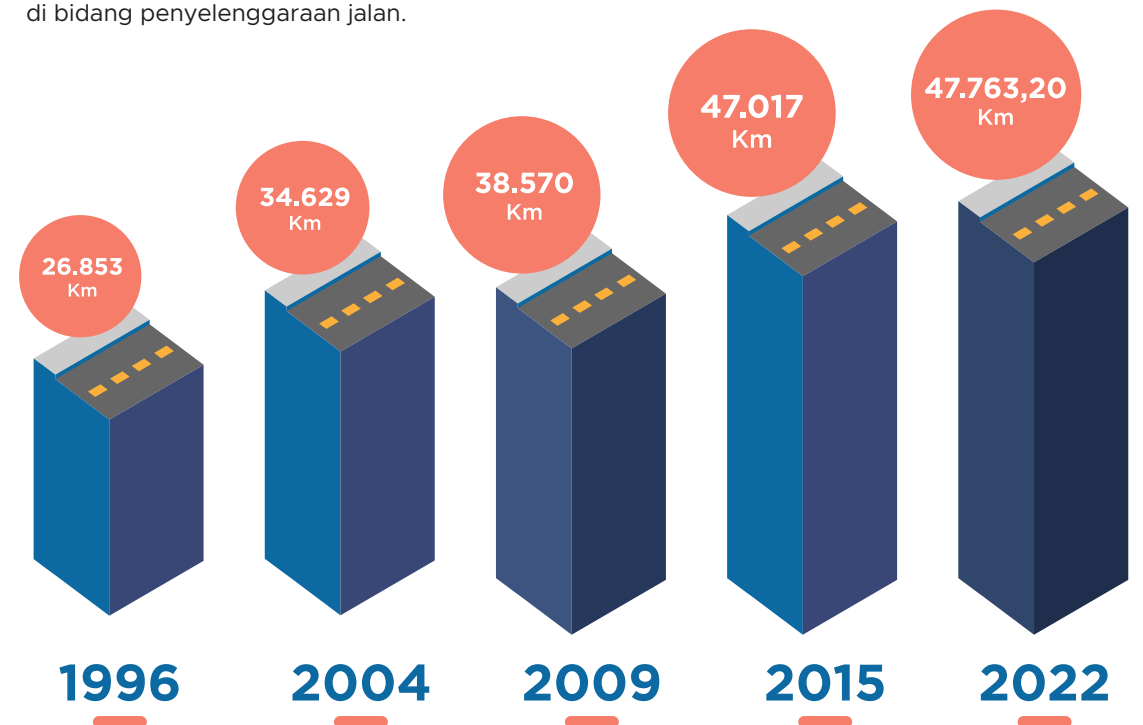


Jakasampurna – Marga Jaya

Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa

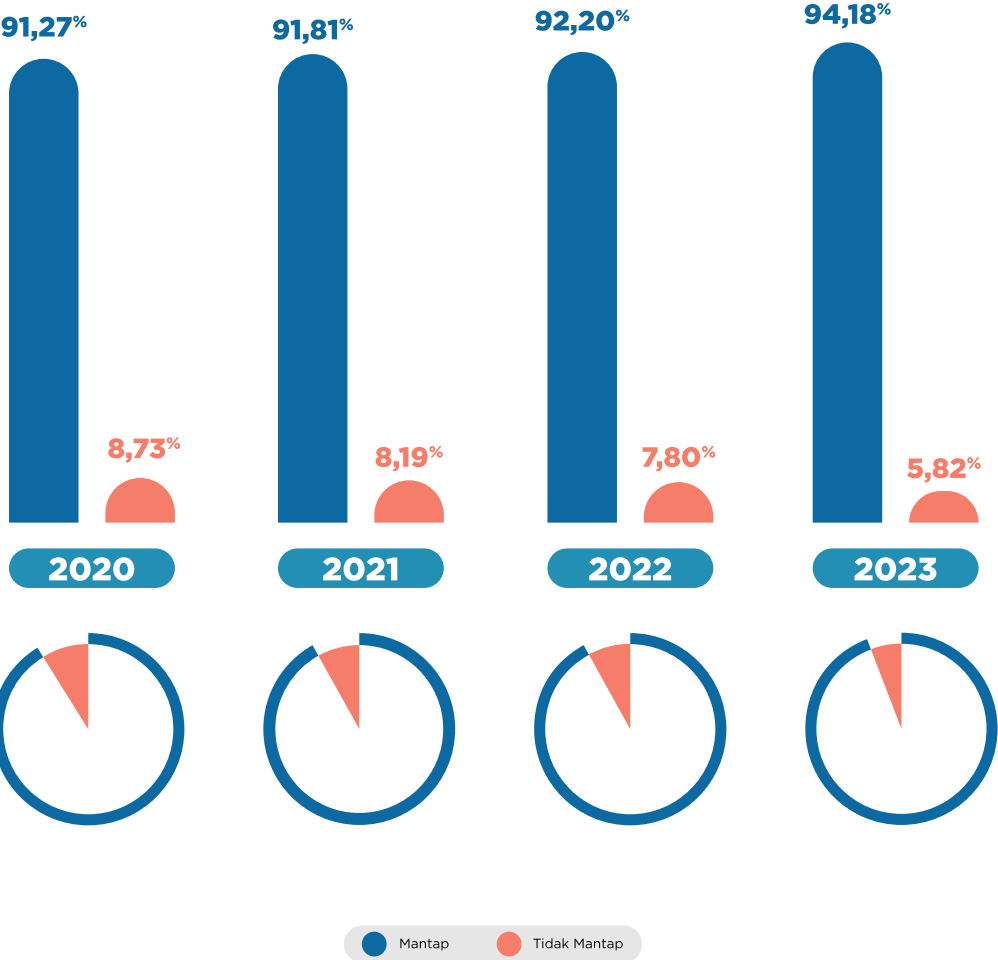
1. Jalan Nasional

Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Kewenangan penyelenggaraan jalan nasional berada pada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.

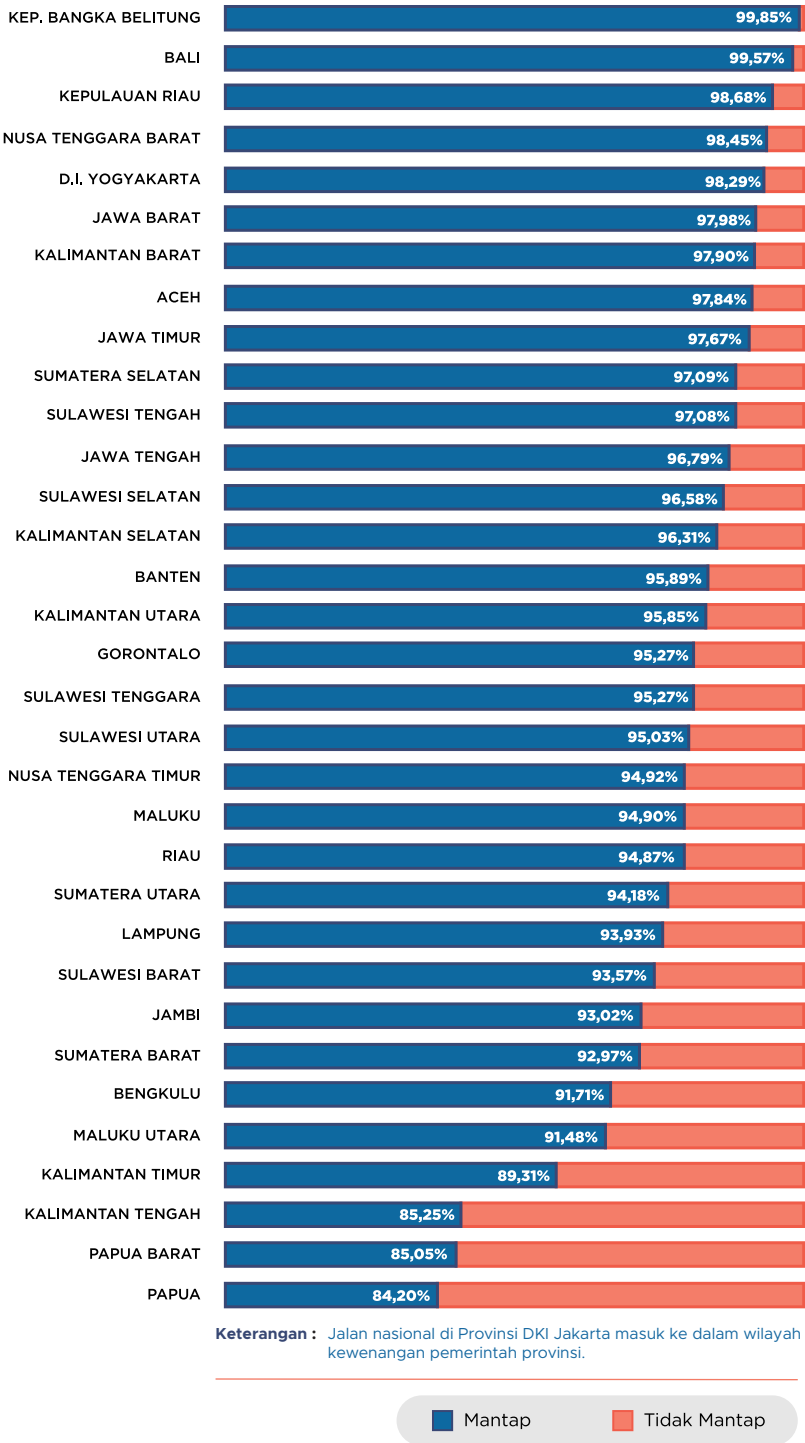


Panjang Jalan Nasional
sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan,
Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : Februari 2024

Panjang jalan nasional dari tahun 1996 hingga 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang Jalan Nasional non tol seluruh Indonesia adalah 47.017,27 km. Kemudian terdapat 13 ruas Jalan Nasional telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.04.03-Mn/708 sehingga total panjang Jalan Nasional menjadi 46.964,78 km.



Kondisi Jalan Nasional di Indonesia secara umum di tahun 2023 dalam kondisi mantap dengan persentase 94,18 %. Kondisi ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang mencapai 92,20 %. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 99,85%. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 77,56%.



Kemantapan Jalan Nasional 2023
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : Februari 2024

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, Pemerintah telah menetapkan beberapa target dalam penyelenggaraan jalan nasional. Penentuan target pembangunan diperlukan mengingat keberadaan infrastruktur jalan berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mempermudah akses distribusi barang dan jasa yang mana akan meningkatkan aktivitas perekonomian. Oleh karenanya indikator jalan nasional tidak hanya dilihat dari segi kemantapan saja melainkan dari tingkat aksesibilitas, waktu tempuh, rating kondisi dan rating keselamatan jalan nasional.

Tingkat aksesibilitas jalan nasional di tahun 2023 mencapai 83,95% dengan waktu tempuh utamanya pada jalan lintas utama pulau mencapai 2,16 jam/100km; Rating kondisi jalan nasional di tahun 2023 mencapai 2,57 Sementara itu pada indikator rating keselamatan jalan nasional di tahun 2023 mencapai 2,89;



Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

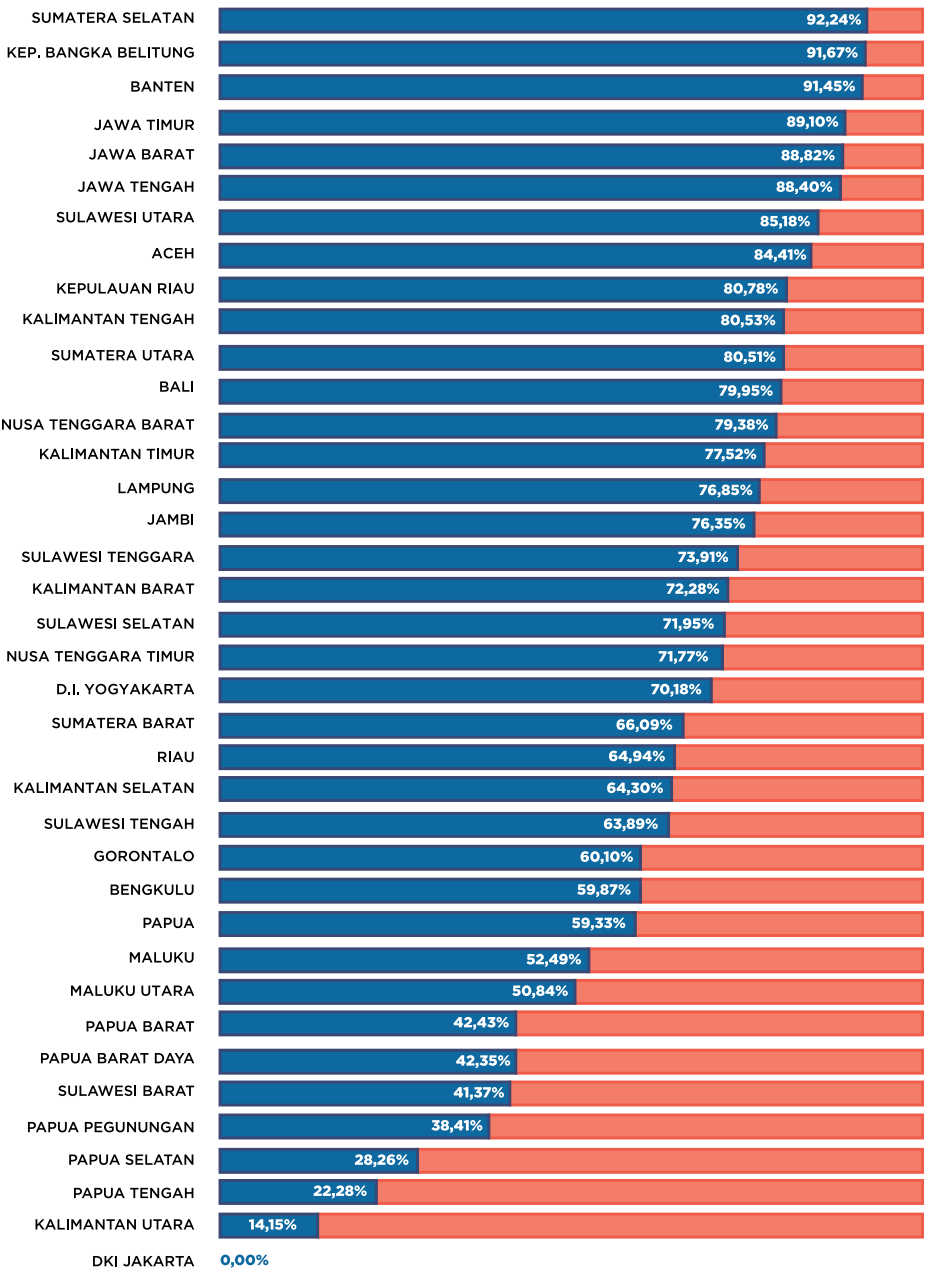


2. Jalan Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, yaitu Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Jalan tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan. Adapun total panjang jalan daerah pada tahun 2023 mencapai 459.703,91 km yang terdiri atas 48.486,81 km jalan provinsi dan 411.217,1 km jalan kab/kota. Secara umum kondisi kemantapan jalan daerah di Indonesia dalam kondisi mantap mencapai 71,33% mantap untuk jalan provinsi dan 57,9% mantap jalan kabupaten/kota.

Pada Jalan Provinsi, Provinsi dengan kemantapan jalan tertinggi adalah Sumatera Selatan dengan persentase sebesar 92,24% atau sepanjang 1.396,17 km. Sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan provinsi terendah adalah Kalimantan Utara dengan persentase sebesar 14,15% atau sepanjang 120,53 km.

Pada Jalan Kabupaten/Kota, Provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/Kota tertinggi adalah Jawa Barat dengan persentase sebesar 81,89% atau sepanjang 13.914,44 km. Sedangkan provinsi dengan kemantapan jalan kabupaten/kota terendah adalah Papua Tengah dengan persentase sebesar 21,45% atau sepanjang 719,17 km.

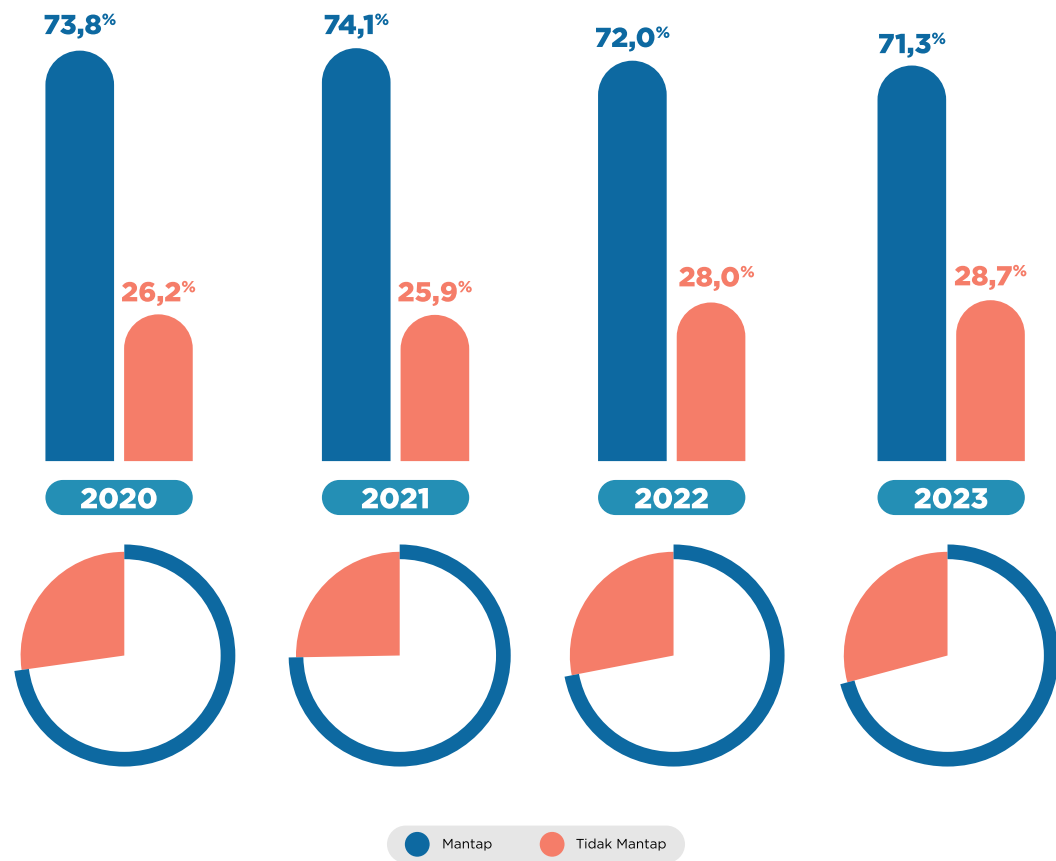


Keterangan : Jalan nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.

Mantap Tidak Mantap

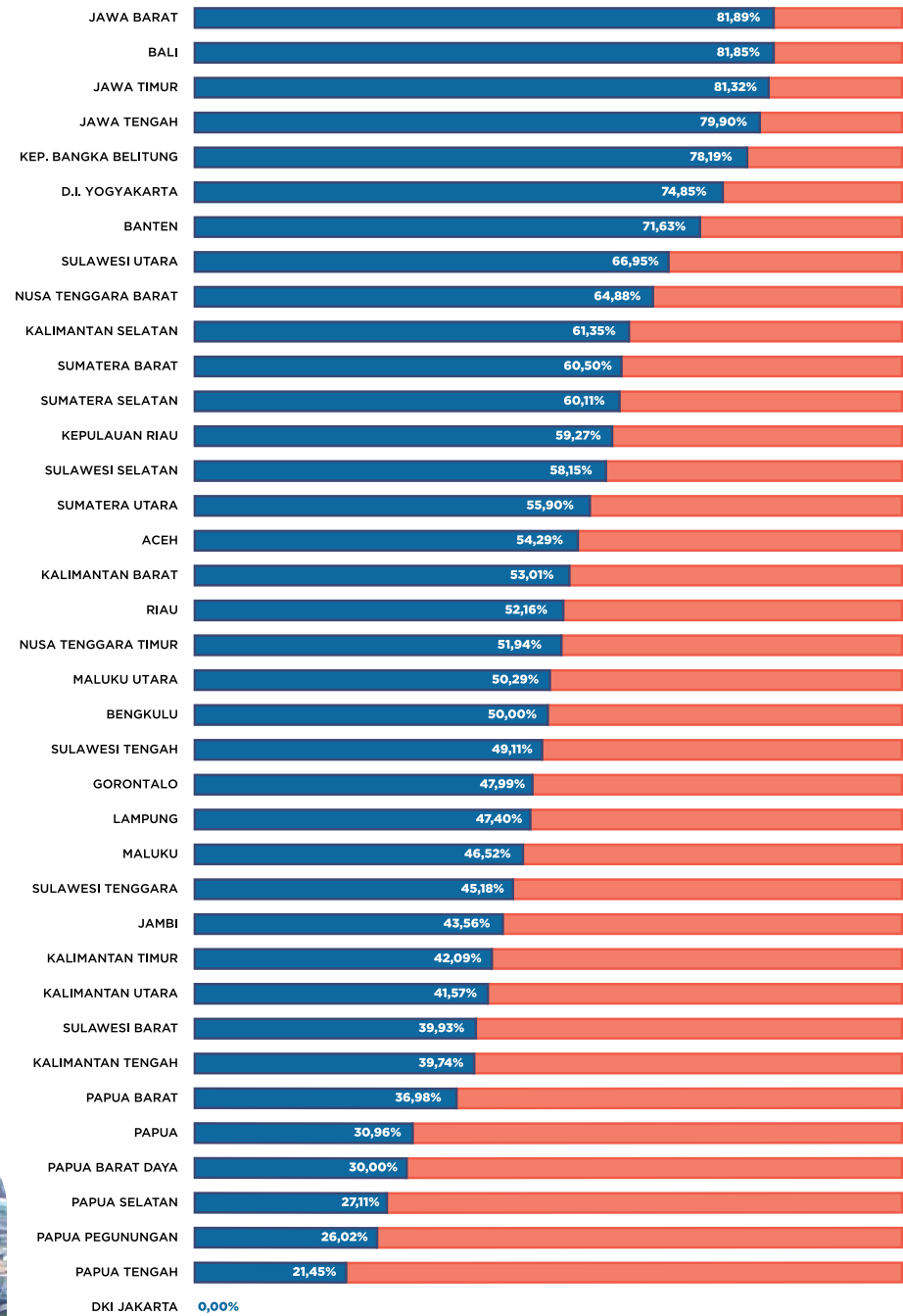
Kemantapan Jalan Provinsi 2023

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga
Status : Desember 2023



Trend Kemantapan Jalan Provinsi

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga
Status : Desember 2023



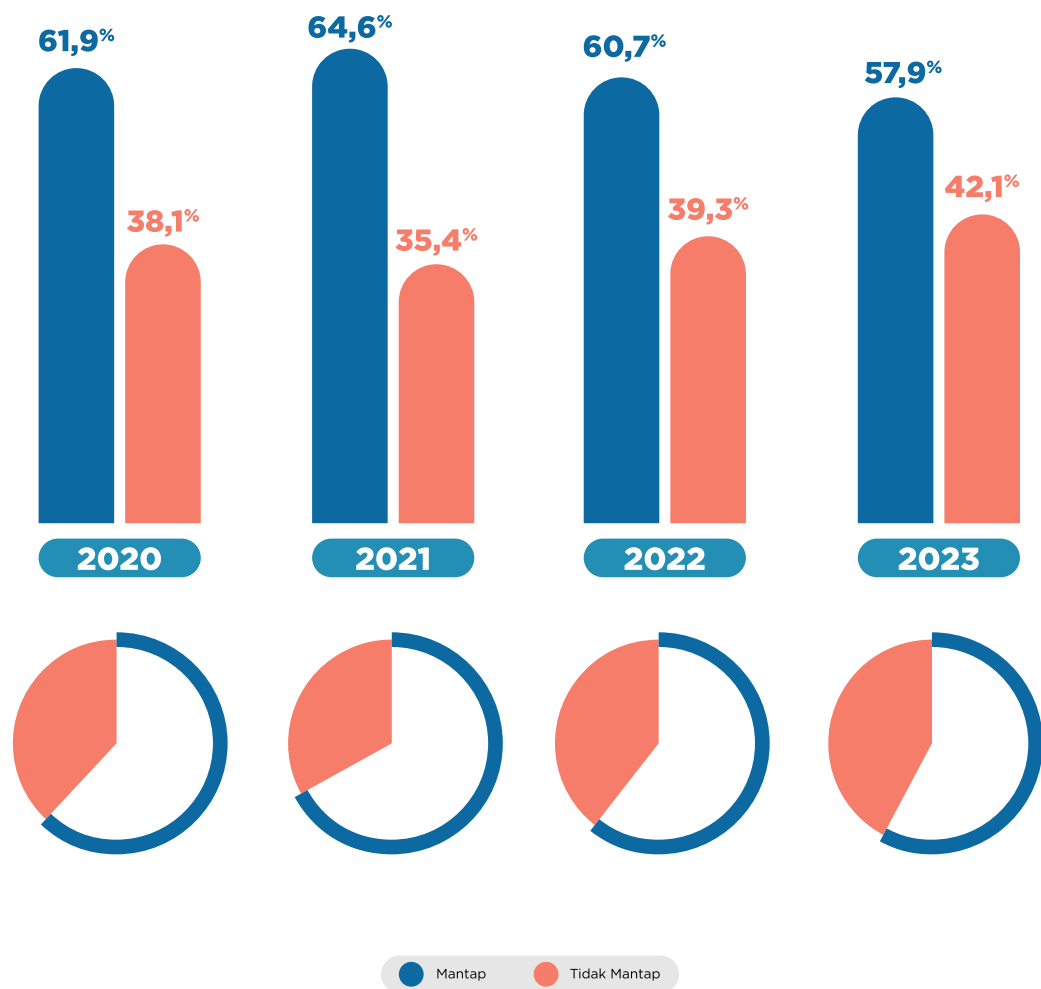
Jalan nasional di Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi.

Keterangan :

■ Mantap ■ Tidak Mantap

Kemantapan Jalan Kab/Kota 2023

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga
Status : Desember 2023



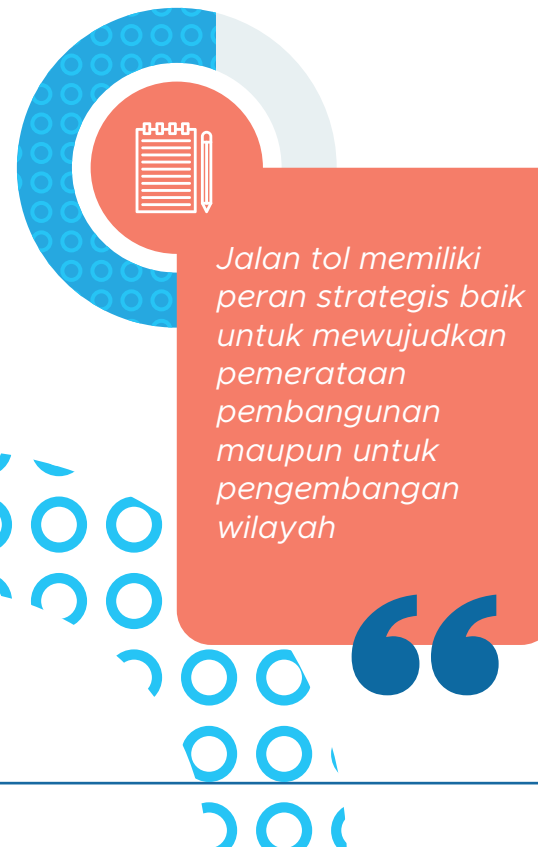
Trend Kemantapan Jalan Kab/Kota

Sumber : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ditjen Bina Marga
Status : Desember 2023



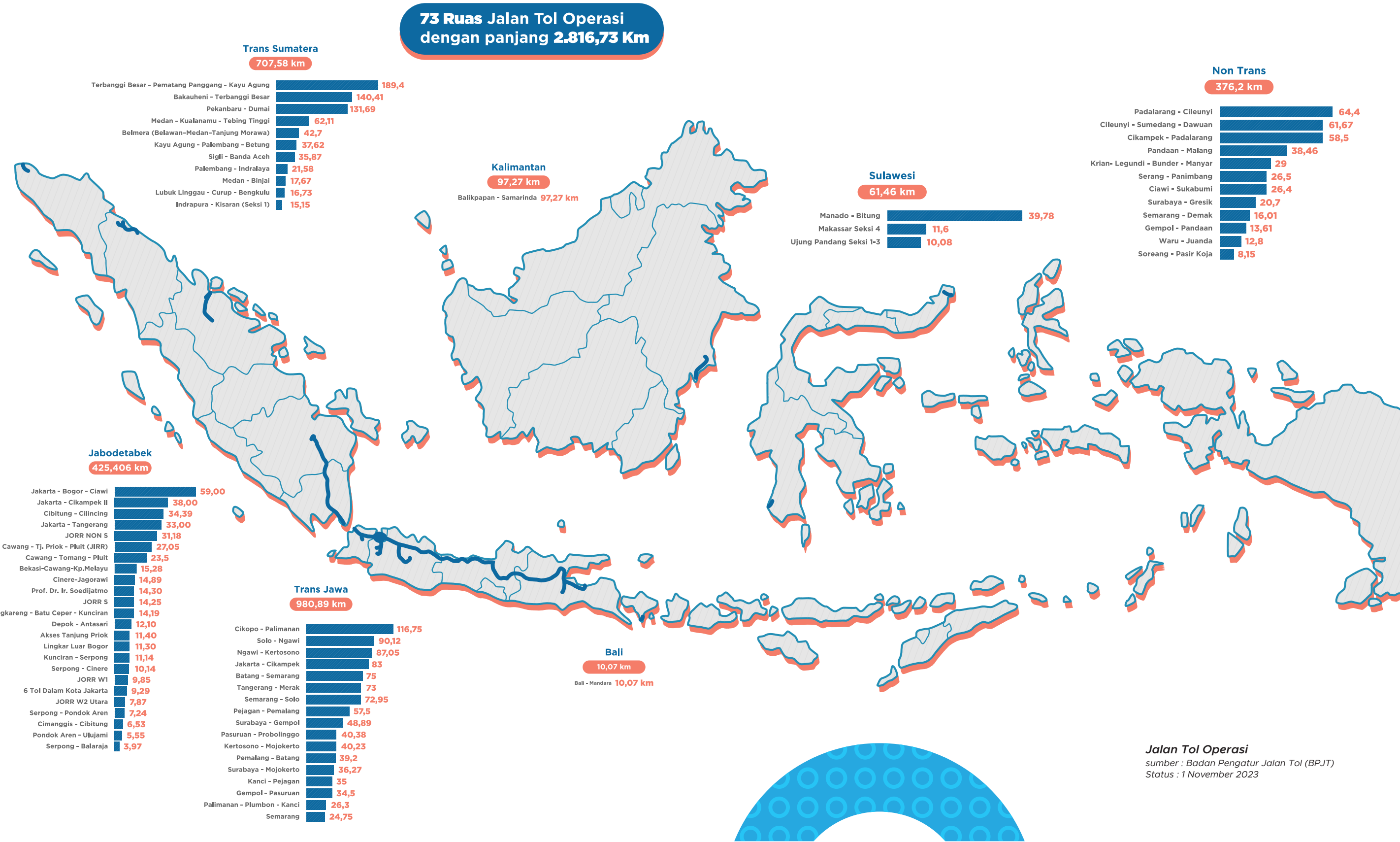
3. Jalan Tol Beroperasi

Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Jalan tol juga berkontribusi dalam mengurangi biaya logistik nasional sehingga arus barang & jasa antar wilayah dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah tersebut, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jalan tol yang hingga saat ini terdapat 73 ruas jalan tol dengan panjang 2.816,7 km yang telah beroperasi serta 27 ruas (1.742,25 km) yang masih dalam proses pembangunan. Berikut adalah sebaran jalan tol baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam proses pembangunan.



Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah



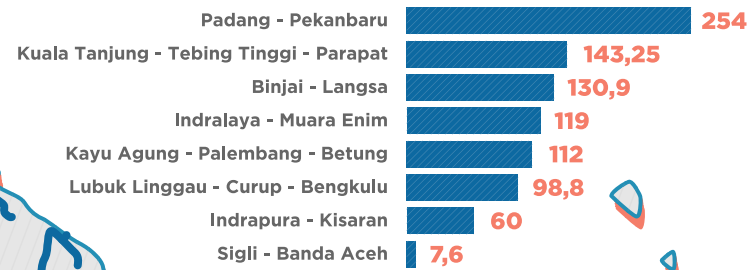


4. Jalan tol Konstruksi

27 Ruas Jalan Tol dalam Pembangunan dengan panjang 1742,55 km

Trans Sumatera

925,55 km



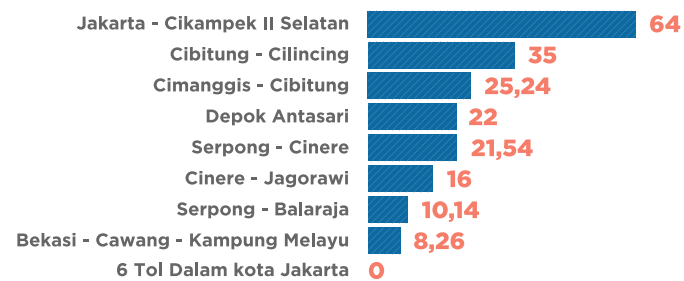
Trans Jawa

185,65 km



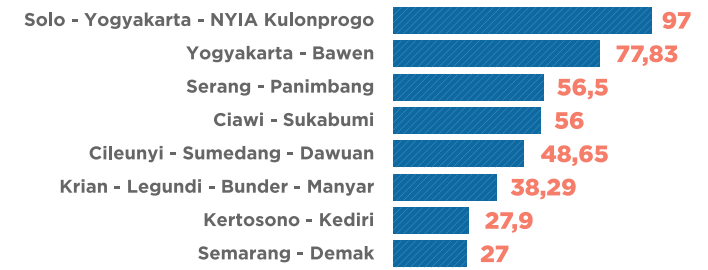
Jabodetabek

202,18 km



Non Trans

429,17 km



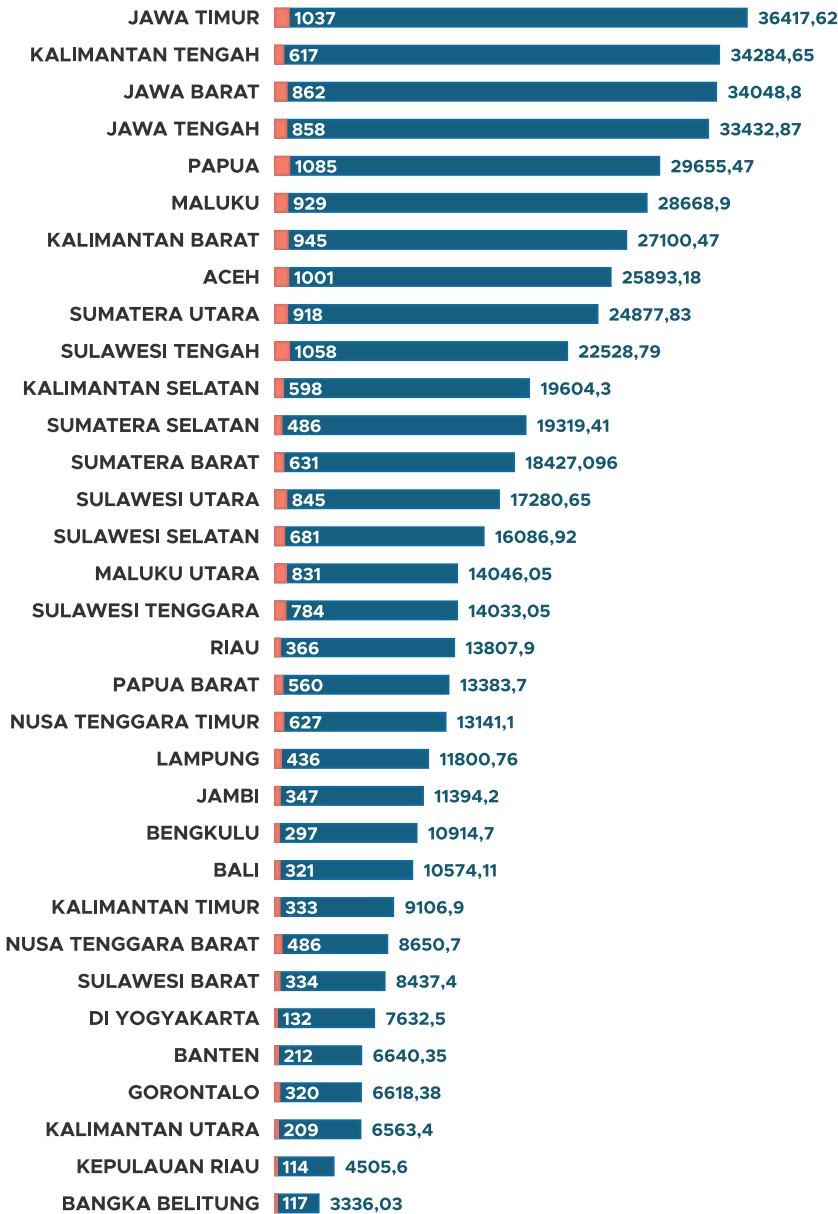
Jalan Tol Konstruksi

sumber : Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Status : 1 November 2023

5. Jembatan

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat, rute atau lintasan yang terpisah karena faktor geografis seperti sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan kondisi lainnya. Keberadaan jembatan mendukung efisiensi baik dari segi waktu yang ditempuh maupun kemudahan akses yang mana turut berimplikasi pada pengurangan biaya transportasi.

Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan dan revitalisasi jembatan. Hingga tahun 2023 terdapat 19.377 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 562.213,79 m. Provinsi yang memiliki jumlah jembatan terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan 1.037 unit dan total panjang jembatan 36.417,62 m.



Jumlah Panjang (meter)

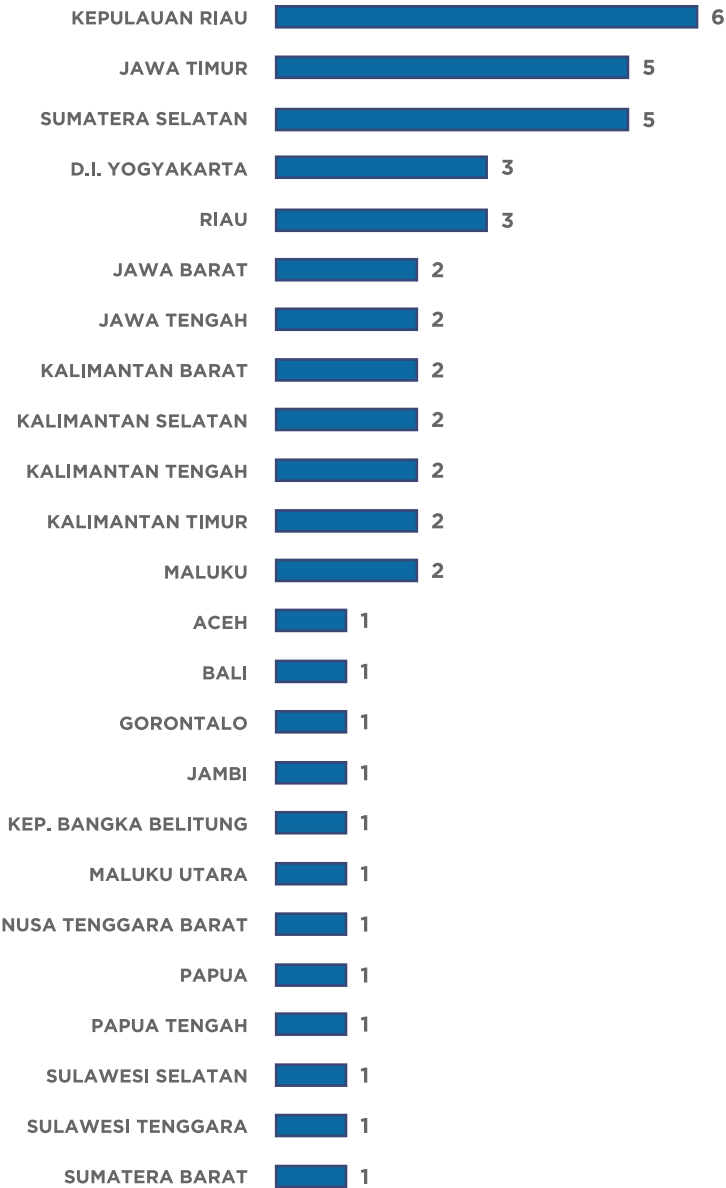
Jumlah Jembatan

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status : 31 Desember 2023

6. Jembatan Khusus

Jembatan Khusus merupakan jembatan yang memiliki Spesifikasi teknis dan khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan dan spesifikasi peralatan utama yang dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi dengan keadaan yang khusus pula. Jembatan yang memiliki tinggi pilar diatas 40m dapat dikategorikan sebagai jembatan khusus.

Tercatat hingga Tahun 2023 terdapat sebanyak 48 unit jembatan khusus di Indonesia dengan total panjang 28.889 m. Provinsi dengan jumlah jembatan khusus terbanyak adalah provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah jembatan khusus sebanyak 6 unit dan total panjang jembatan 2.262 m.



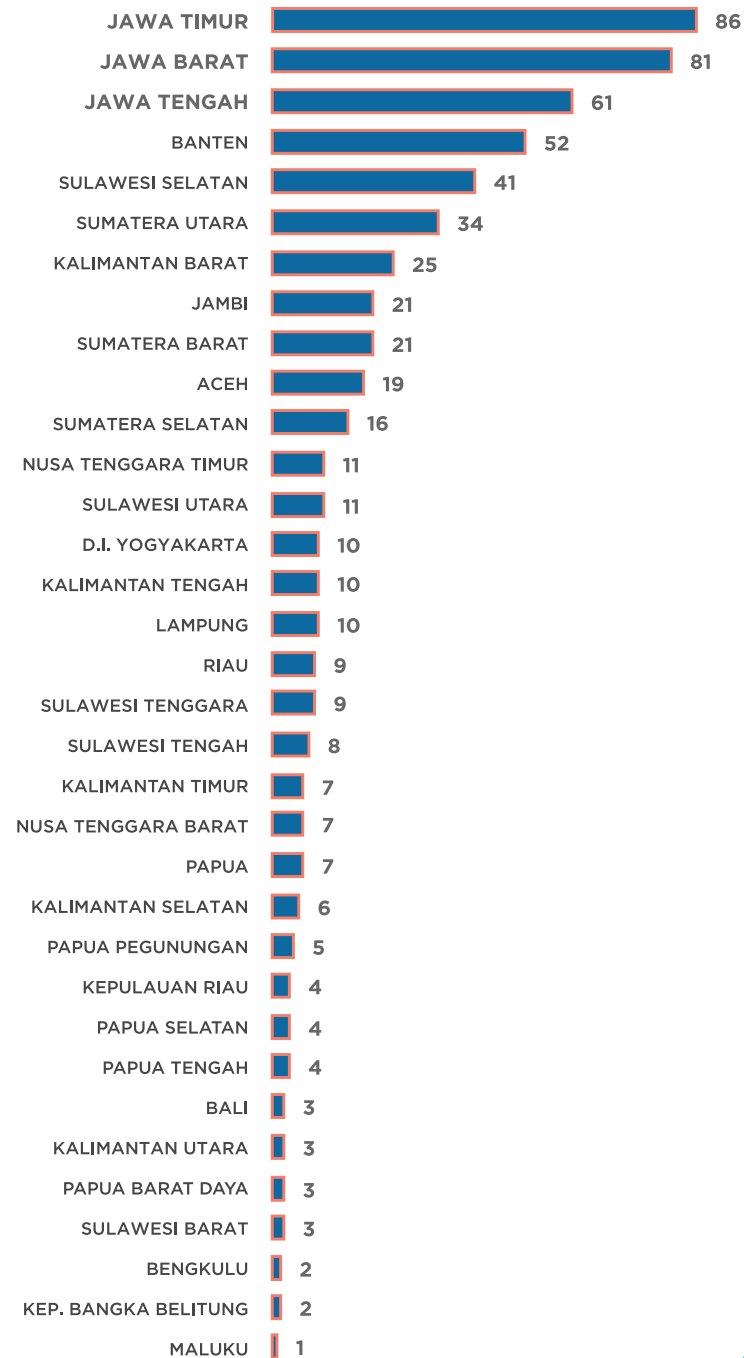
Jumlah Jembatan Khusus

Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status Data : 31 Desember 2023

7. Jembatan Gantung

Jembatan gantung adalah jembatan dengan sistem struktur jembatan yang menggunakan *wire rope* (kabel) sebagai pemikul utama beban lalu lintas dan berat sendiri. Pada sistem ini *wire rope* utama memikul beberapa hanger (penggantung) yang menghubungkan antara *wire rope* utama dengan gelagar/struktur jembatan.

Hingga tahun 2023 tercatat ada sebanyak 596 jembatan gantung di Indonesia dengan total panjang 44.615,6 m. Provinsi yang memiliki jembatan gantung terbanyak adalah Jawa Timur dengan mencapai 86 unit dan total panjang 5.737,9 m.



Jumlah Jembatan Khusus
Sumber : Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
Status Data : 31 Desember 2023

Hingga tahun 2023 terdapat 30.761 unit Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 601.531 m



Jembatan Kretek, D.I. Yogyakarta

CIPTA KARYA



BAB

05



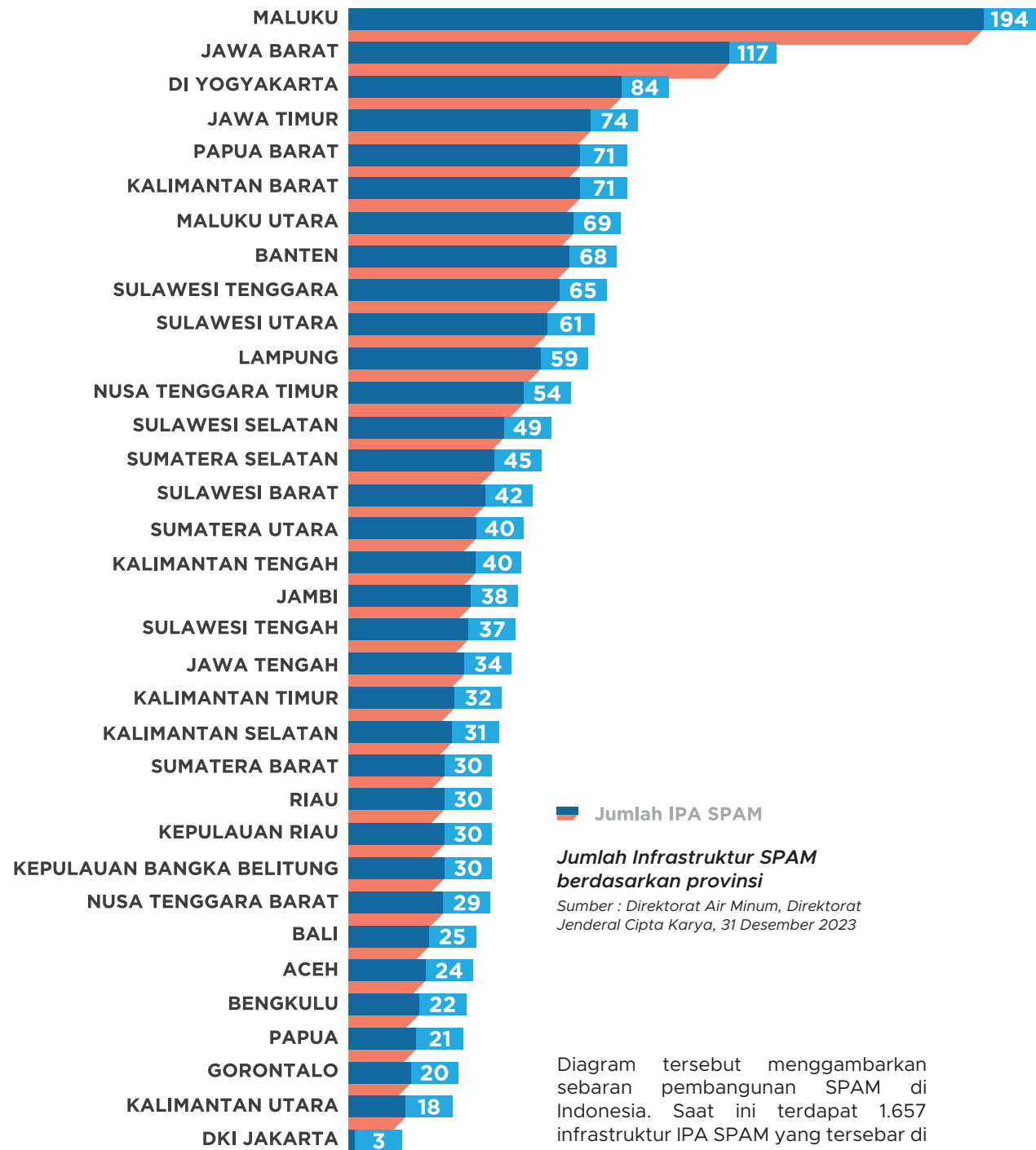
Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pos lintas batas negara, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga tahun 2023, infrastruktur permukiman tersebut terus bertambah baik dari segi ketersediaan (kuantitas) maupun kualitasnya. Bab ini memaparkan berbagai data dan perkembangan pembangunan infrastruktur permukiman yang berada dalam ranah tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya.

A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem penyediaan air minum yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.



Jumlah IPA SPAM

Jumlah Infrastruktur SPAM berdasarkan provinsi

Sumber : Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

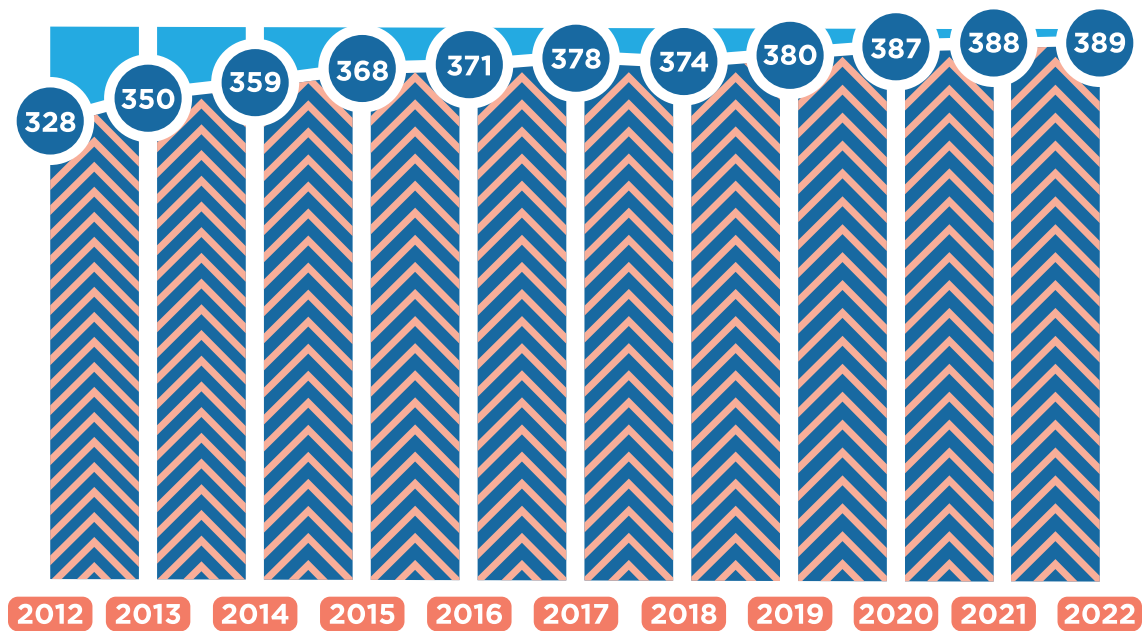
Diagram tersebut menggambarkan sebaran pembangunan SPAM di Indonesia. Saat ini terdapat 1.657 infrastruktur IPA SPAM yang tersebar di 34 provinsi dimana terbanyak berada di Provinsi Maluku dengan 194 SPAM.



B . Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum

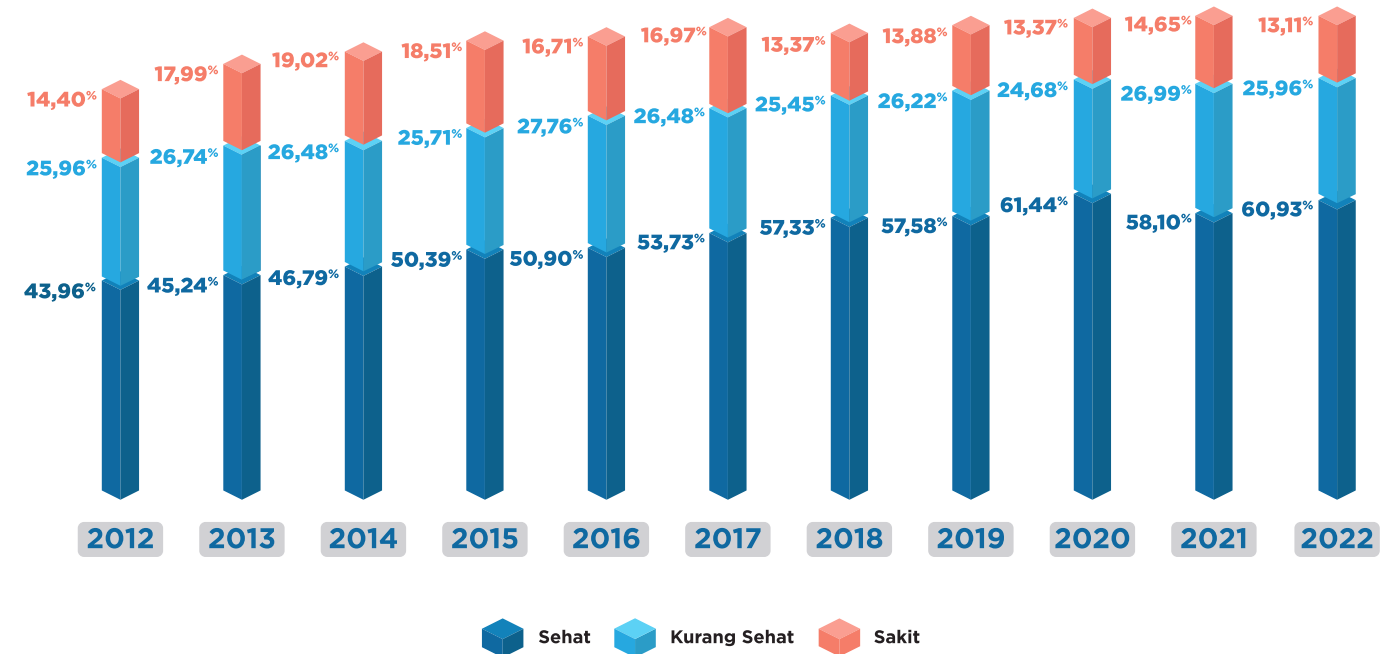
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha. Khusus penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMD Air Minum, Direktorat Air Minum Ditjen Cipta

Karya melakukan penilaian kinerja secara berkala setiap tahunnya untuk memastikan kualitasnya semakin meningkat. Penilaian tersebut dilakukan pada 4 aspek kinerja, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.



Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai Kinerjanya Tahun 2012-2022
 Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

Jumlah BUMD Air Minum yang dinilai terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 menjadi 389 BUMD. Jumlah ini meningkat sebanyak 1 BUMD dibandingkan dengan tahun 2021.



Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2012-2022
 Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

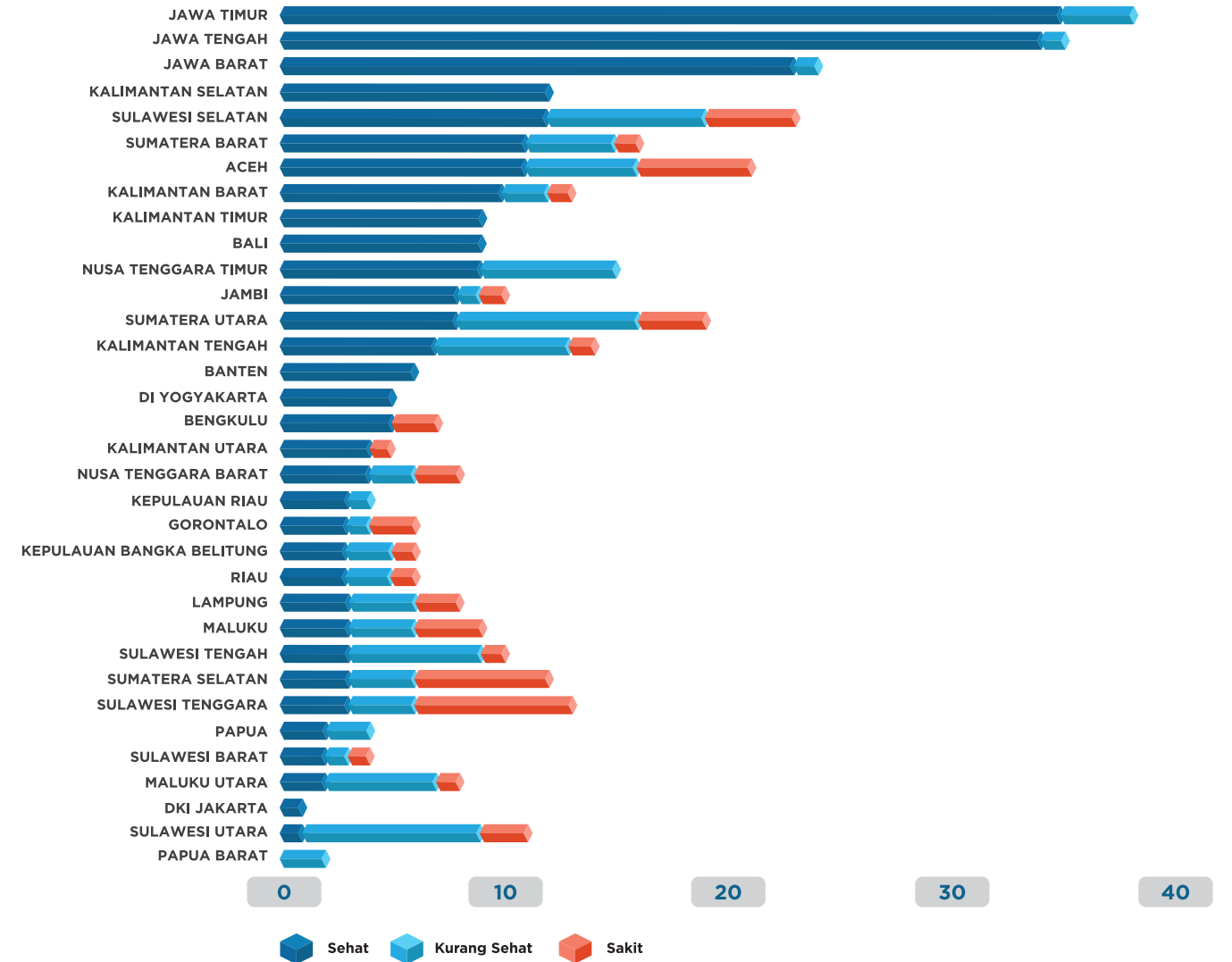
Kinerja BUMD Air Minum di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 didominasi oleh kategori sehat dengan persentase 45% sampai dengan 60%. Pada tahun 2022 PDAM dengan kategori sehat mencapai 60,93%.





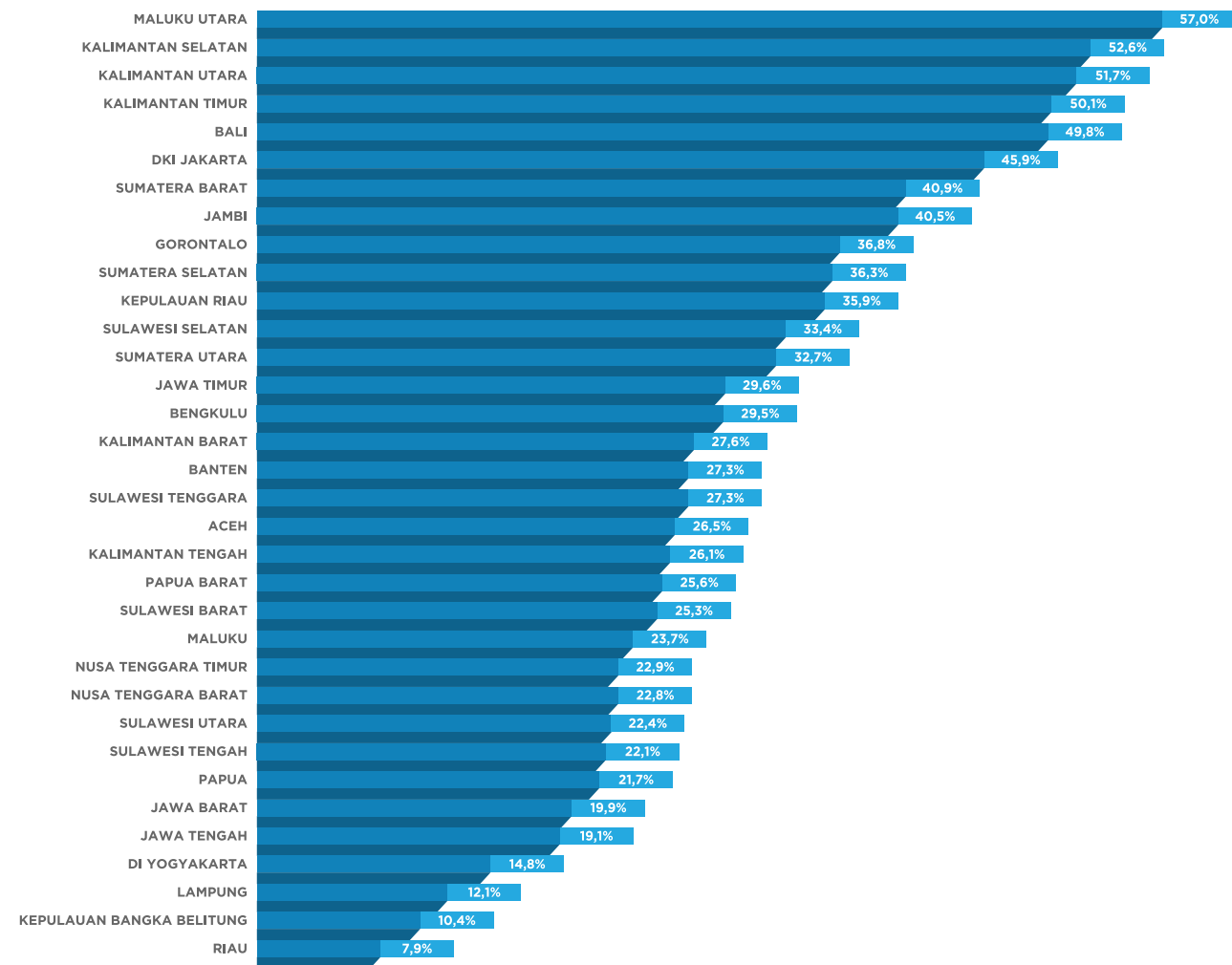
Capaian tersebut mengalami kenaikan 2,83% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 58,10%. Adapun BUMD Air Minum dengan kategori sakit mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 13,11% dari sebelumnya sebanyak 14,65% di tahun 2021. Selain itu, persentase BUMD Air Minum kategori kurang sehat masih lebih tinggi dibanding BUMD Air Minum kategori sakit yaitu 24% sampai 28%. Hal ini menandakan mulai pulihnya kinerja BUMD Air Minum pasca diterpa pandemi Covid-19.

Kinerja BUMD Air Minum di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 didominasi oleh kategori sehat dengan persentase 45% sampai dengan 60%



Kinerja BUMD Air Minum Berdasarkan Provinsi
 Sumber : Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2012-2023

Berdasarkan provinsinya, hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum tahun 2022 menunjukkan provinsi yang memiliki BUMD Air Minum dengan kondisi sehat sebesar 100% antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Banten, D.I. Yogyakarta, dan DKI Jakarta.



Presentase Penduduk Terlayani

Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum tahun 2023

Persentase penduduk terlayani tertinggi di Maluku Utara sebesar 57% atau sebanyak 434.354 jiwa dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sedangkan penduduk terlayani terbanyak adalah

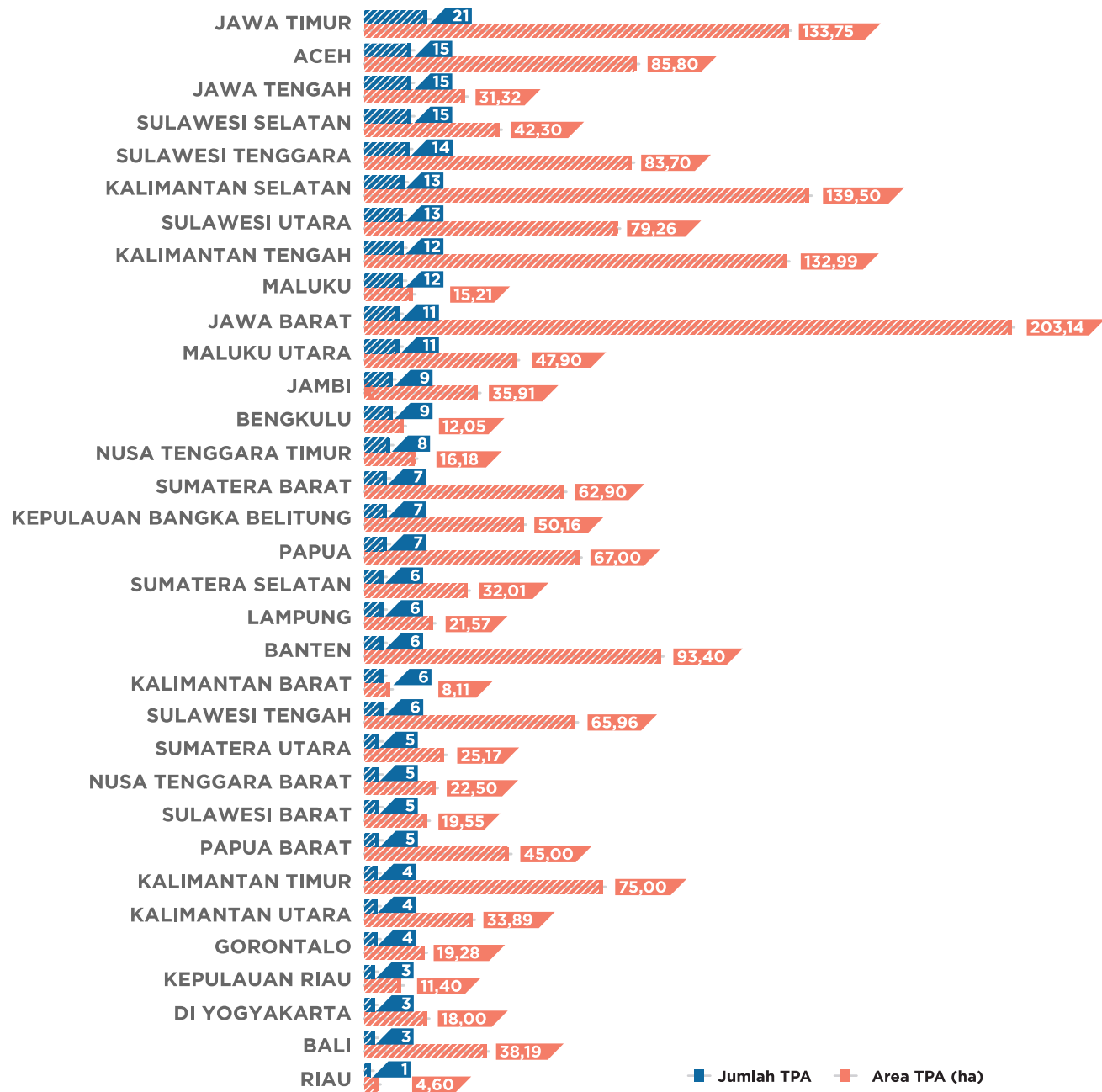
terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 8.782.609 jiwa atau sebesar 29,6% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Adapun persentase terendah berada di Provinsi Riau yang hanya mencapai 7,9%.

C. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan bersih sekaligus menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi.

Salah satu tugas yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR ialah infrastruktur tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Luasnya area TPA yang memadai di kota-kota besar dan seluruh wilayah dibutuhkan untuk mengatasi kuantitas sampah yang masuk. Berikut ini adalah data jumlah TPA beserta area TPA (Ha) pada setiap provinsi.





Jumlah TPA dan Area TPA (ha) menurut provinsi

Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan grafik di samping, Total infrastruktur TPA yang terbangun adalah 271 TPA dengan TPA terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu

sebanyak 21 TPA dengan luas area TPA 133,75 Ha, sedangkan area TPA terluas terdapat pada provinsi Jawa Barat yaitu 203,14 Ha.

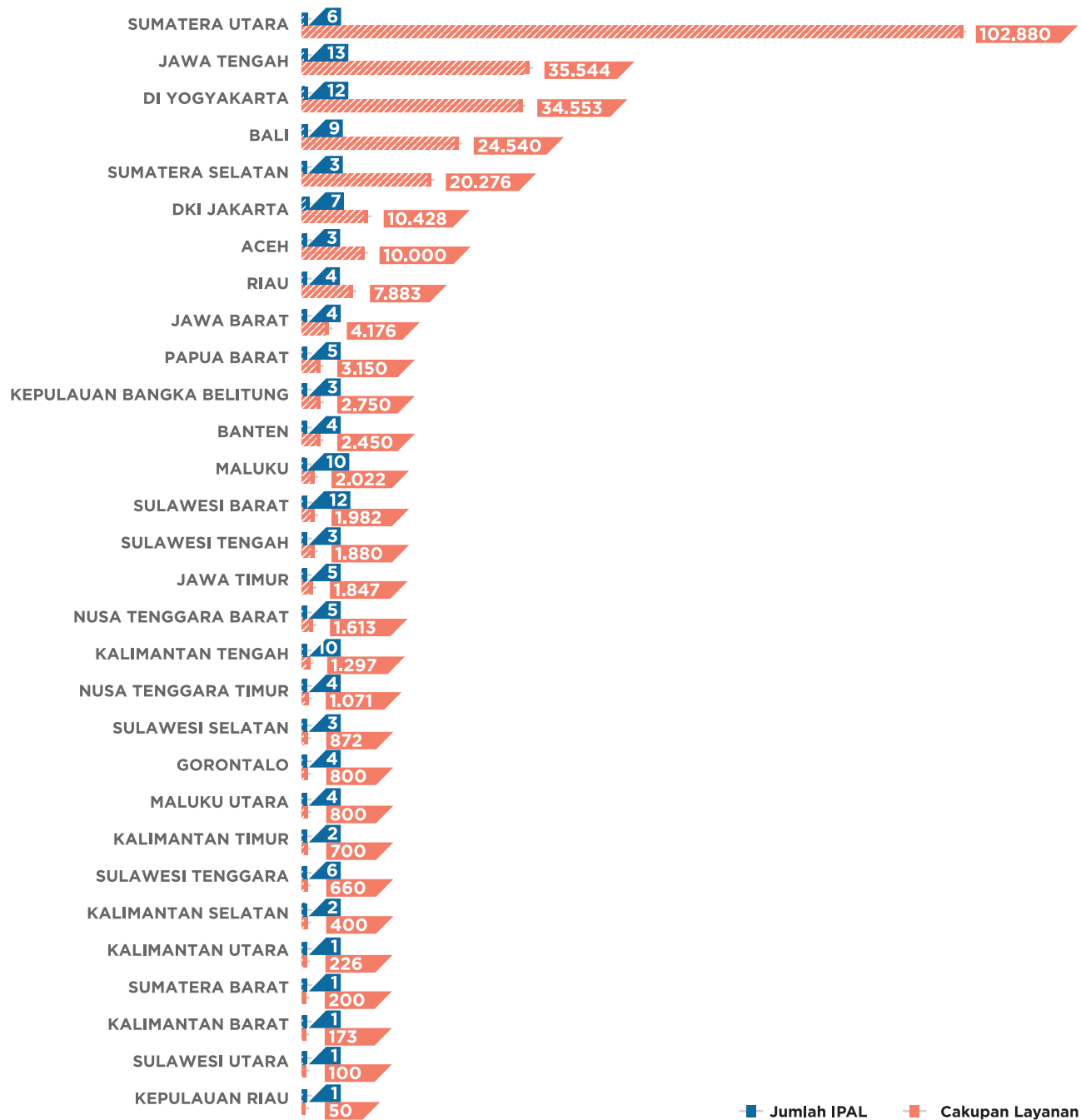
D. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Lingkungan layak huni dan sehat adalah lingkungan yang terjaga kebersihan, kerapian dan kelestariannya. Salah satu tantangan terbesar saat ini selain sampah ialah limbah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak kualitas tanah.

Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/ kawasan (*on site*) dan sistem terpusat (*off site*). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar. Oleh sebab itu, dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.



Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tersebut maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah



Jumlah IPAL dan Cakupan Layanan (KK) berdasarkan provinsi

Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan diagram diatas, cakupan layanan IPAL paling banyak pada Provinsi Sumatera Utara dengan banyaknya keluarga 102.880 KK.

Sedangkan total infrastruktur IPAL terbangun adalah 148 IPAL dengan jumlah IPAL terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan 13 IPAL.

E.

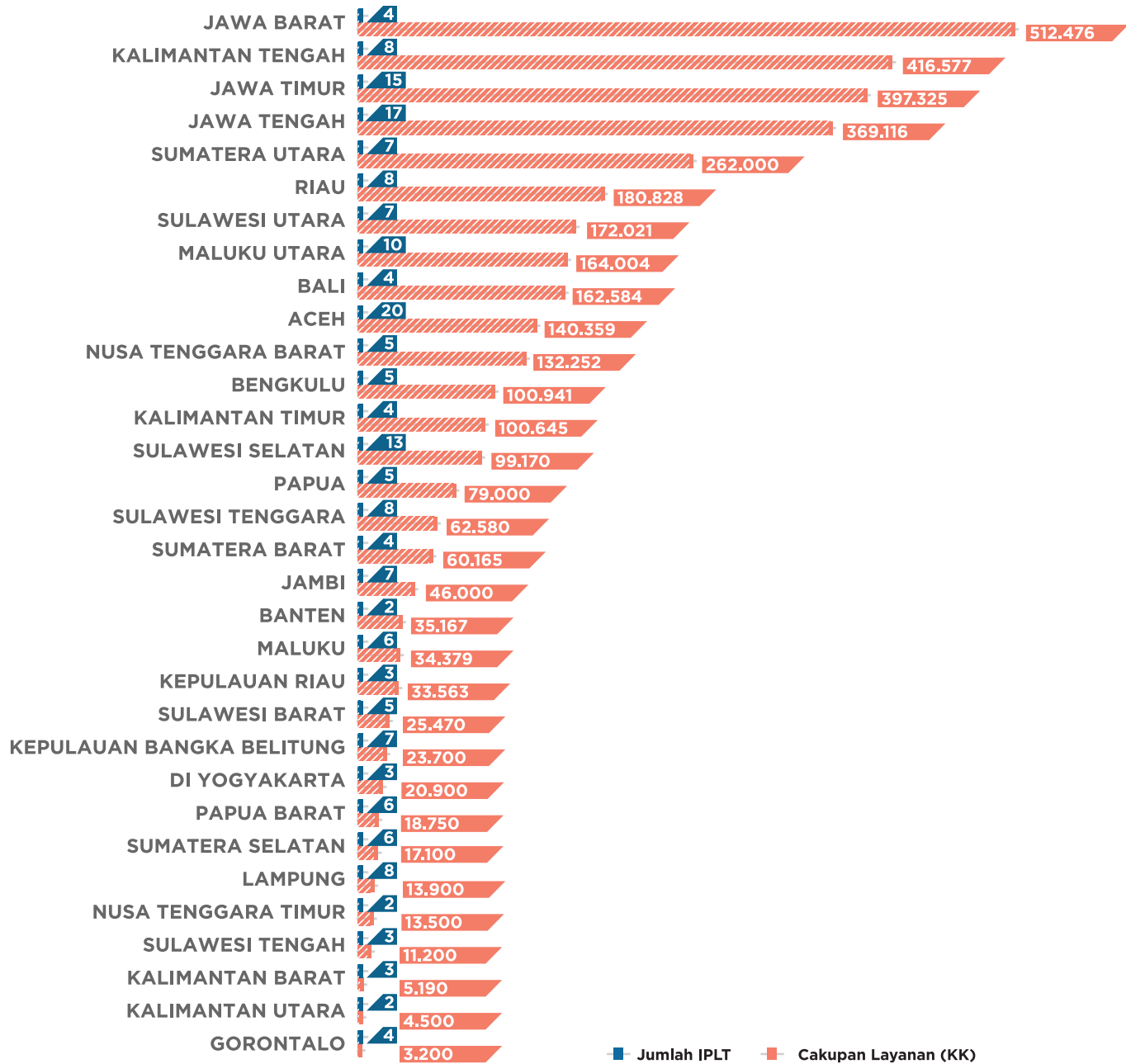
Instalasi

Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT)

Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Keberadaan sanitasi layak dapat secara signifikan menurunkan tingkat kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Selain itu, keberadaan sanitasi layak dapat turut menurunkan prevalensi stunting dan tingkat penyakit yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah bangunan yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.





Jumlah IPTL dan Cakupan Layanan (KK) berdasarkan Provinsi

Sumber : Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

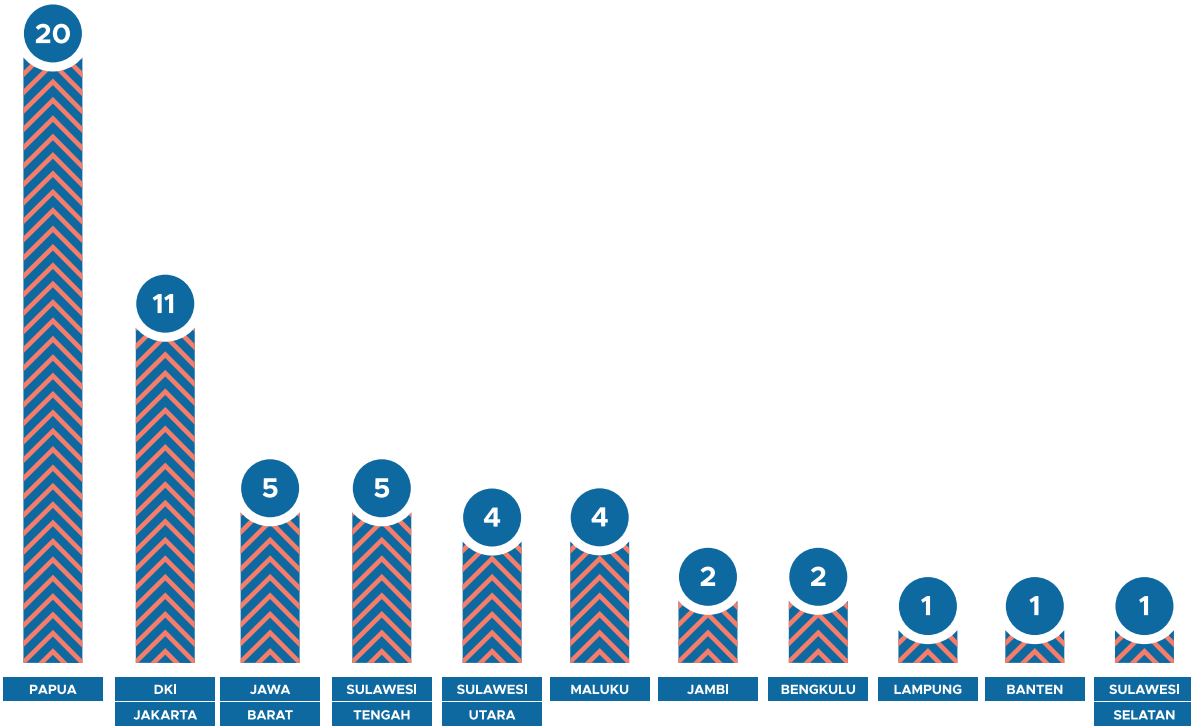
Berdasarkan diagram diatas, cakupan layanan IPTL terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya keluarga 512.476 KK. Sedangkan total

infrastruktur IPTL terbangun adalah 221 IPTL dengan jumlah IPTL terbanyak terdapat pada Provinsi Aceh yaitu sebanyak 20 IPTL.

F. Bina Penataan Bangunan (BPB)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan

dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, dan rumah negara. Program dari Bina Penataan Bangunan di antaranya adalah penataan bangunan kawasan pesisir, renovasi atau penataan kawasan sarana ibadah, penataan istana kepresidenan, kebun raya, gedung pemerintah, dan lain-lain.



Jumlah BPB menurut provinsi

Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Diagram diatas merupakan sebaran pembangunan infrastruktur BPB menurut provinsi, total infrastruktur BPB yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR adalah 56 unit dengan infrastruktur BPB paling banyak pada Provinsi Papua yaitu sebanyak 20 bangunan.

G. Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan

perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang. Pengembangan kawasan perbatasan di antaranya dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan.

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
PLBN Terpadu Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
PLBN Terpadu Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
PLBN Terpadu Sebatik	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Midang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
PLBN Terpadu Napan	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Motaain	Belu	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
PLBN Terpadu Skouw	Kota Jayapura	Papua
PLBN Terpadu Sota	Merauke	Papua
PLBN Terpadu Yetetkun	Boven Digoel	Papua

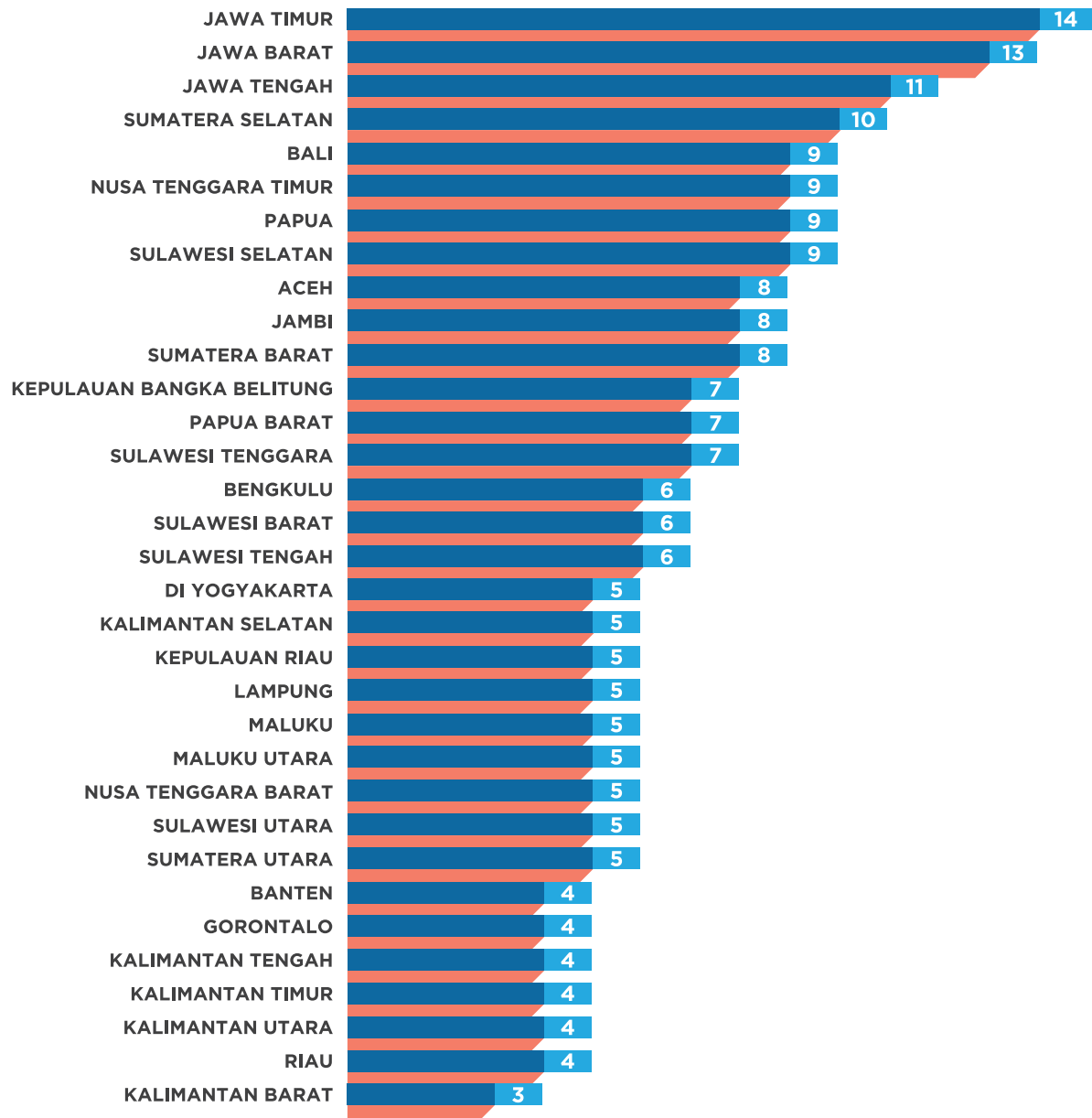
Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

H. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)

Terbangunnya gedung-gedung dan Penataan Lingkungan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Penataan bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan cita-cita yang dapat diwujudkan melalui kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan.

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Sebagai wujud dari salah satu upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian PUPR memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memuat ketentuan program, rencana, ketentuan pengendalian pengembangan lingkungan antar kawasan bangunan dan lingkungan.





Jumlah PBL berdasarkan Provinsi

Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Diagram diatas merupakan sebaran pembangunan infrastruktur PBL di Indonesia. Total pembangunan infrastruktur PBL di Indonesia sebanyak

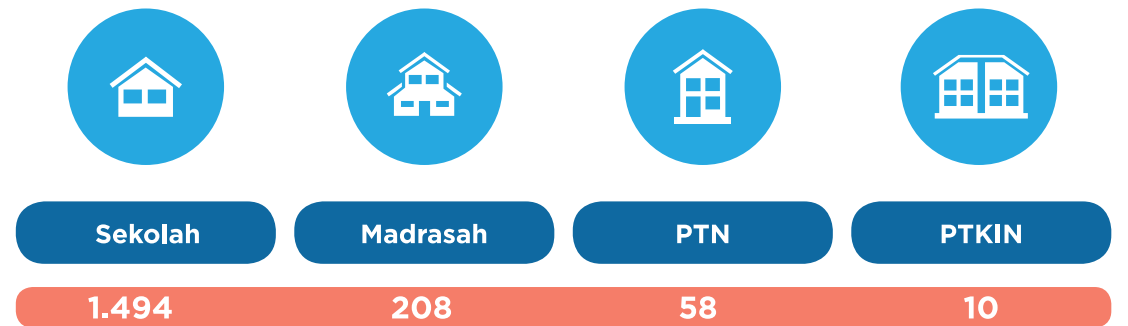
219 PBL dan paling banyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur dengan yaitu 14 PBL.

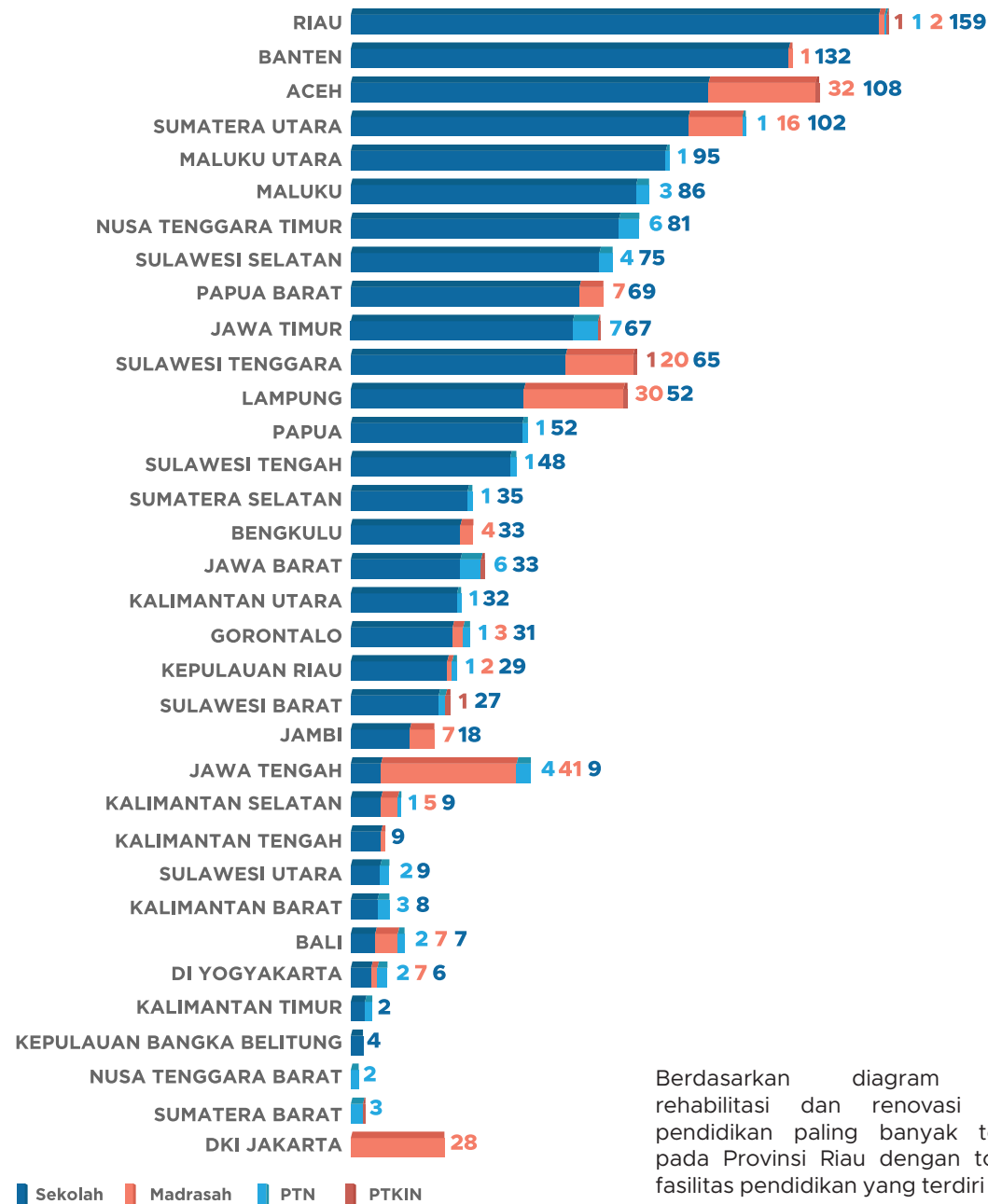
I. Fasilitas Pendidikan

Sejak tahun 2019 Kementerian PUPR mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang terdiri dari sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan merupakan bentuk dukungan Kementerian PUPR dalam peningkatan kualitas pendidikan Nasional.

Pekerjaan rehabilitasi dan rehabilitas fasilitas pendidikan dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sampai dengan Desember 2023, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan yang sedang dilakukan oleh Kementerian PUPR mencapai 1.770 fasilitas pendidikan. Dengan rincian 1.494 sekolah, 208 madrasah, 58 PTN, dan 10 PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri).





Jumlah Sarana Pendidikan berdasarkan provinsi

Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan diagram diatas, rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan paling banyak terdapat pada Provinsi Riau dengan total 162 fasilitas pendidikan yang terdiri dari 159 sekolah, 1 PTN, dan 2 Madrasah. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan yang baik di seluruh wilayah Indonesia.

J. Sarana Olahraga

Selain melakukan rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan, Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga sesuai dengan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019. Dukungan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mendukung fokus pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta memberikan ruang pembinaan bagi atlet dan pengembangan prestasi olahraga.



Jumlah Sarana Olahraga berdasarkan provinsi

Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan diagram diatas, total sarana olahraga yang telah dibangun atau direnovasi atau direhabilitasi oleh Kementerian PUPR sebanyak 44 sarana olahraga, dengan sarana olahraga terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15 sarana olahraga.

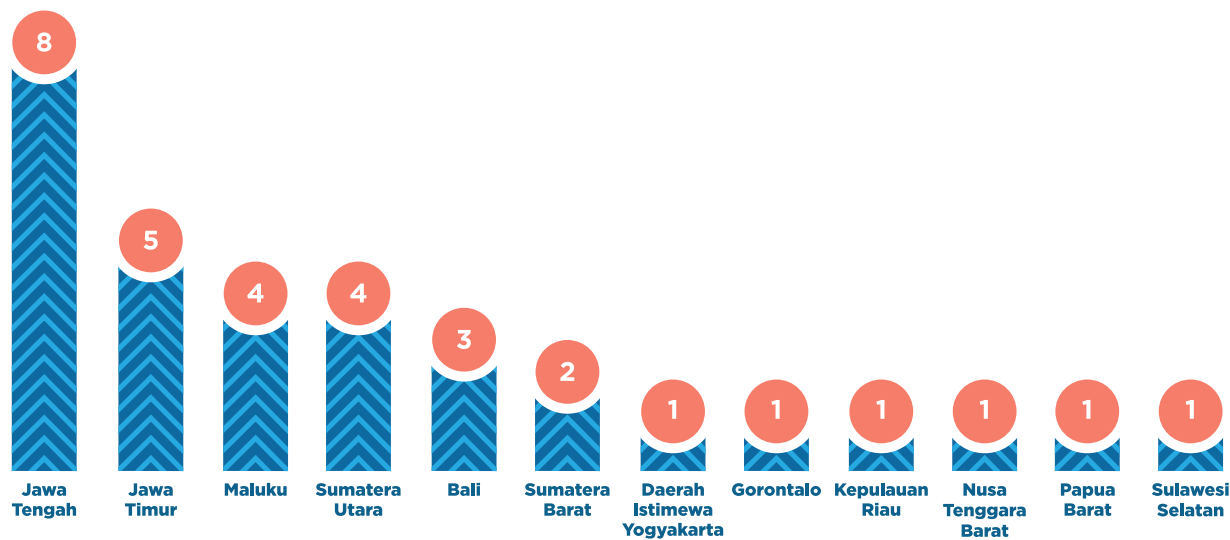


Stadion teladan, medan

K. Pasar Rakyat

Dalam rangka dukungan untuk membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi pasar rakyat.

Pembangunan infrastruktur pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata.



Jumlah Infrastruktur Pasar berdasarkan provinsi

Sumber Data : Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan diagram di atas, total pembangunan pasar yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah 32 pasar, dengan jumlah infrastruktur pasar terbanyak pada Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 8 pasar.



Pembangunan infrastruktur pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, dan tertata



L. Pengembangan

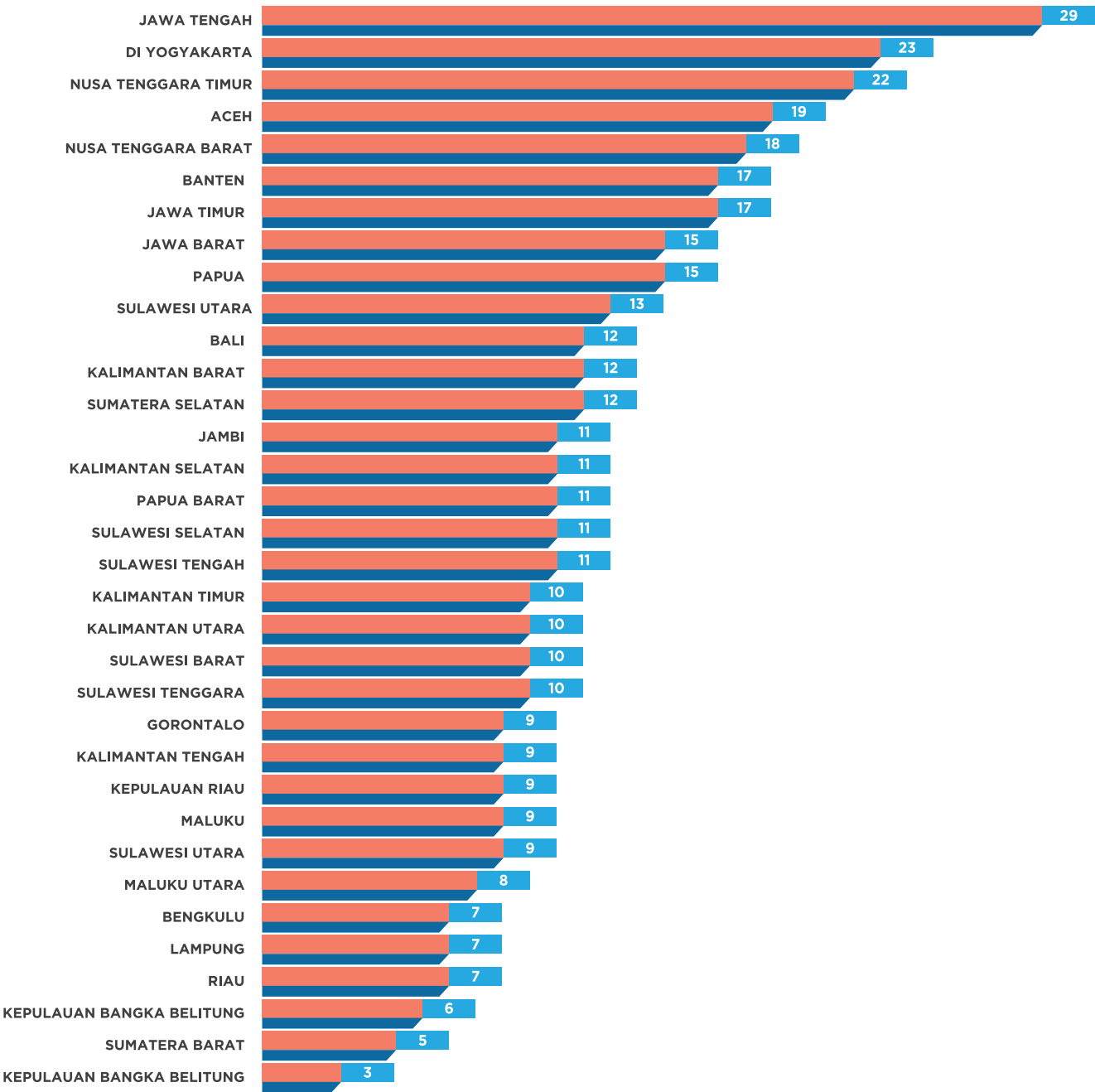
Kawasan

Permukiman (PKP)

Bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup masyarakat di Indonesia menyebabkan peningkatan arus urbanisasi. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Kebutuhan tempat tinggal yang layak huni berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pengembangan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan permukiman.





Jumlah PKP berdasarkan provinsi

Sumber Data : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 31 Desember 2023

Berdasarkan diagram diatas, total jumlah PKP di Indonesia adalah 407 PKP dengan PKP paling banyak terdapat Provinsi Jawa Tengah yaitu 29 PKP.



PERUMAHAN



BAB

06



Rumah Khusus Nelayan Karuak, Lombok

Sumber : <https://harian.disway.id/read/718171/jokowi-buka-bukaan-di-munas-rei-121-juta-orang-indonesia-tak-punya-rumah>

PERUMAHAN

06

Rumah merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan meluncurkan beberapa program

pembangunan rumah dan juga bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, pelaksanaan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, Ditjen Perumahan meluncurkan beberapa program pembangunan rumah dan juga bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan

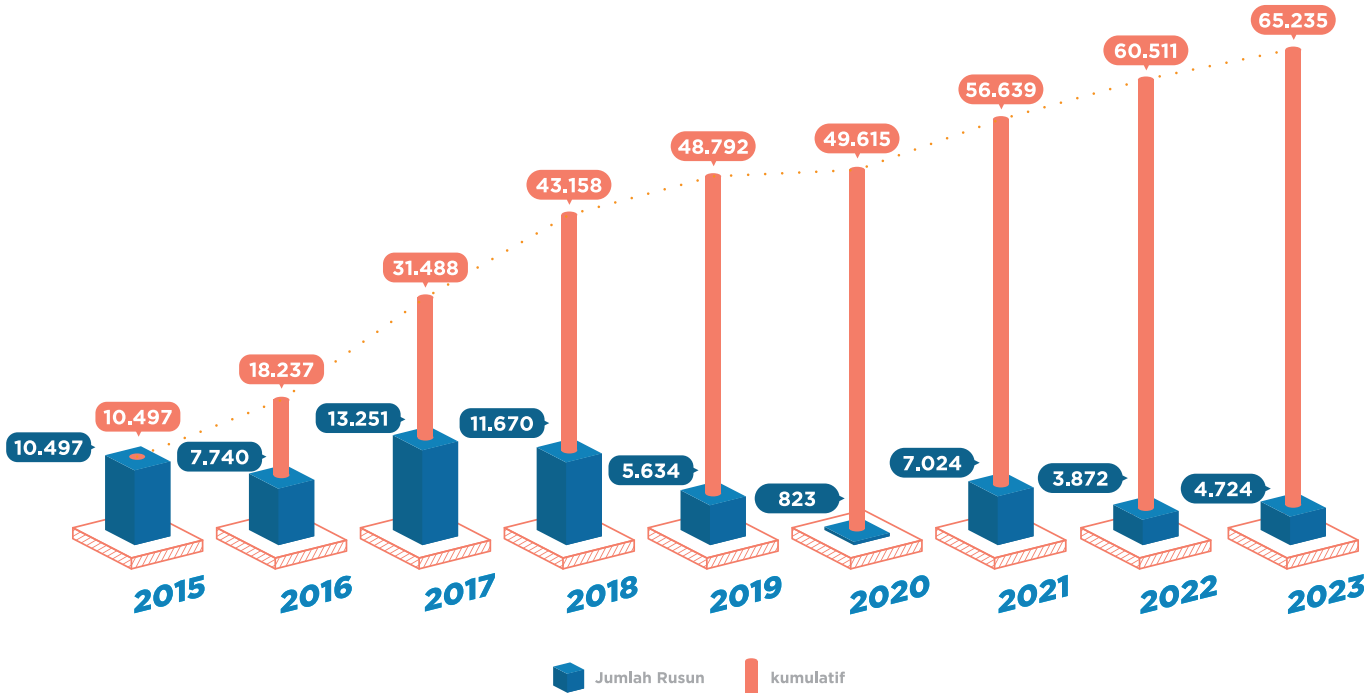


1. Rumah Susun

Undang Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pembangunan rumah susun bisa menjadi alternatif solusi permasalahan kebutuhan perumahan

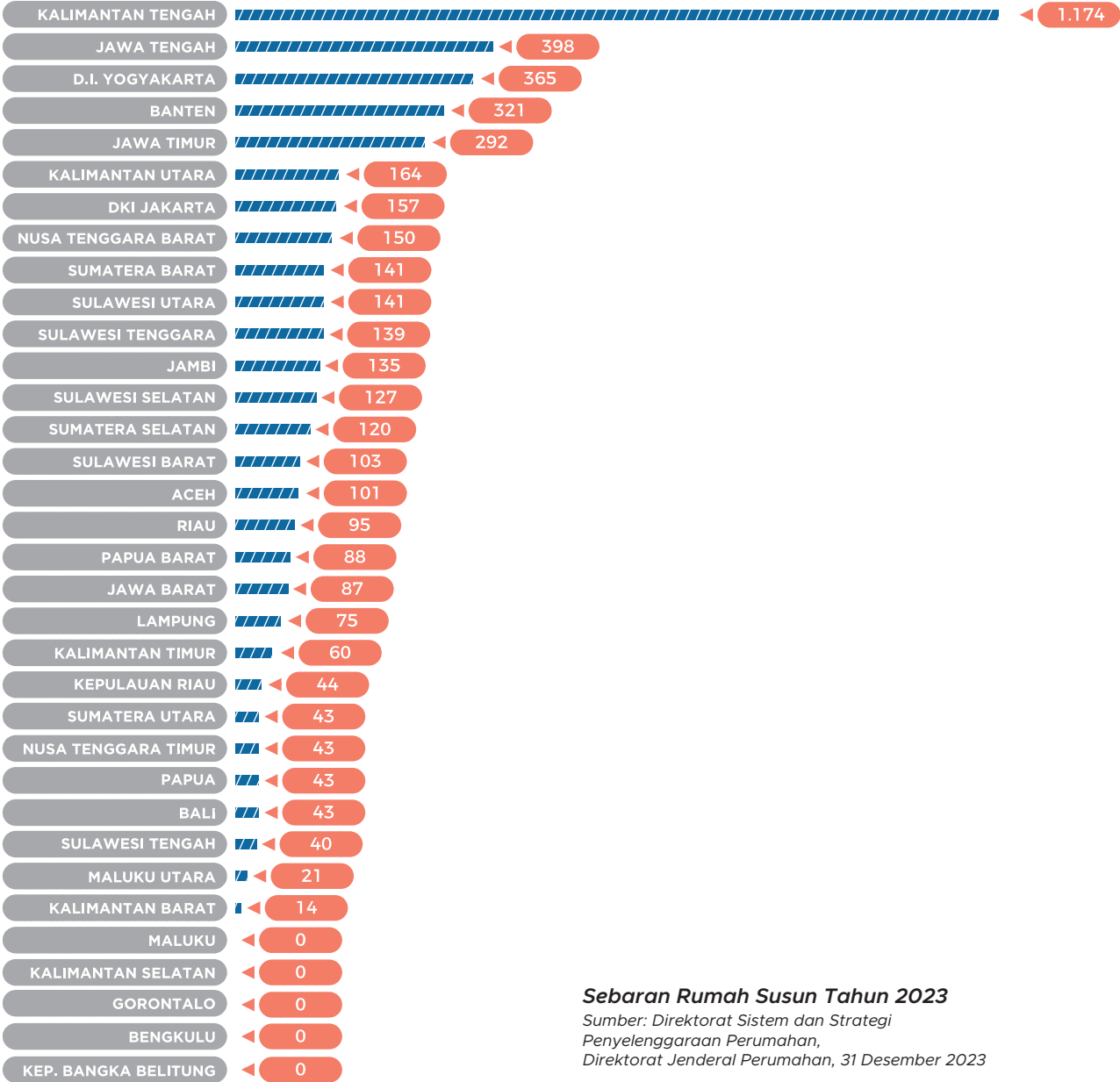
dan permukiman di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan ketersediaan lahan terbatas. Melalui desain *vertical housing*, pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk kepentingan bersama.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, Kementerian PUPR telah membangun 65.235 unit rumah susun. Jumlah Rumah Susun yang dibangun pada tahun 2023 mengalami peningkatan 855 lebih banyak dibandingkan tahun 2022 yaitu berjumlah 4.727 Rumah Susun. Berikut ini adalah jumlah unit rumah susun yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR tahun 2015-2023.



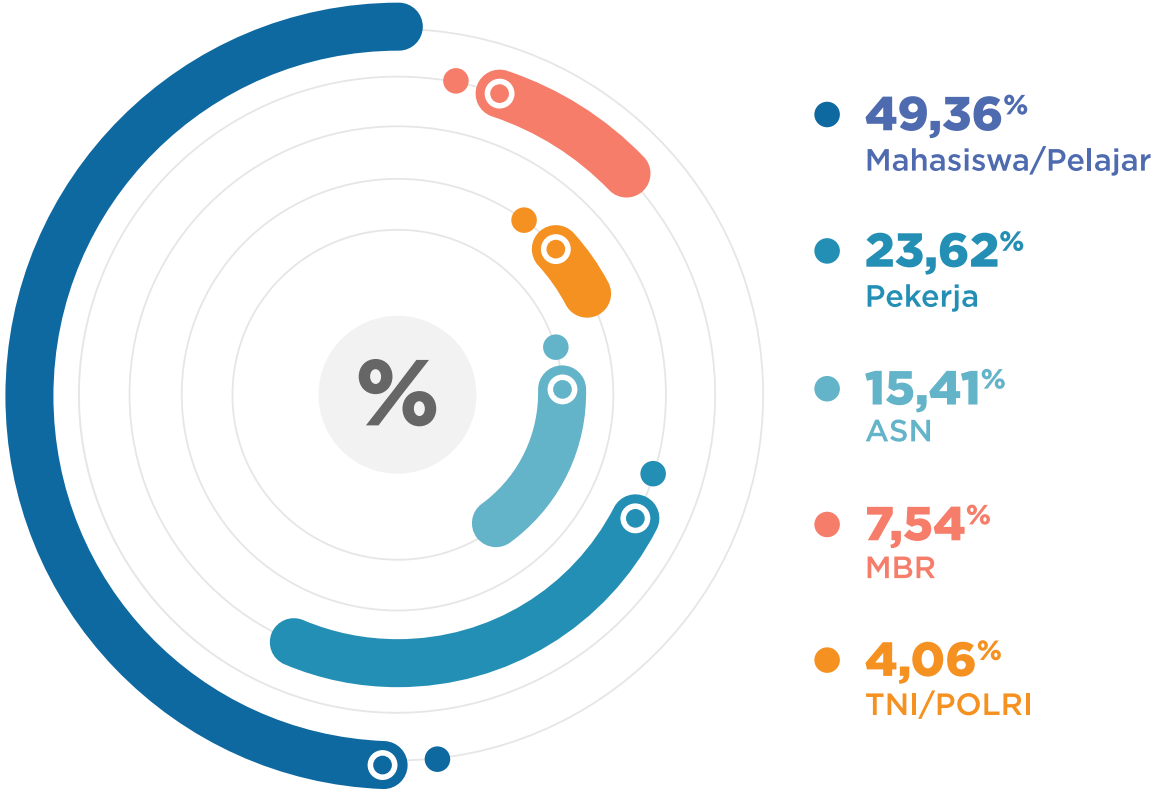
Jumlah Rumah Susun Tahun 2015-2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023



Sebaran Rumah Susun Tahun 2023
Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

Berdasarkan grafik persebarannya di Indonesia, pada tahun 2023 hampir 25% jumlah Rumah Susun atau terbanyak yang dibangun berada di Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebanyak 1.174 Rumah Susun.



Presentase Penerima Rumah Susun Tahun 2023
Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

Penerima Rumah Susun terbanyak di tahun 2023 berasal dari kalangan Mahasiswa/Pelajar dengan proporsi 49,36%, kemudian dari kalangan Pekerja sebanyak 23,62%, ASN sebanyak 15,41%, MBR sebanyak 7,54%, dan kalangan TNI/POLRI menjadi yang paling sedikit menerima Rumah Susun yaitu hanya sebanyak 4,06% dari total jumlah Rumah Susun.



2. Rumah Khusus

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah terkait peruntukannya, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, TNI/Polri,

dan lainnya. Berikut adalah jumlah unit rumah khusus yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR beserta komposisi penerima manfaat rumah khusus tahun 2015-2023 dimana Rumah Khusus yang dibangun pada 2023 adalah sebanyak 4.311 rumah. Jumlah ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya, pada 2022, yang berjumlah 4.359 rumah.



Jumlah Rumah Khusus Tahun 2015-2023

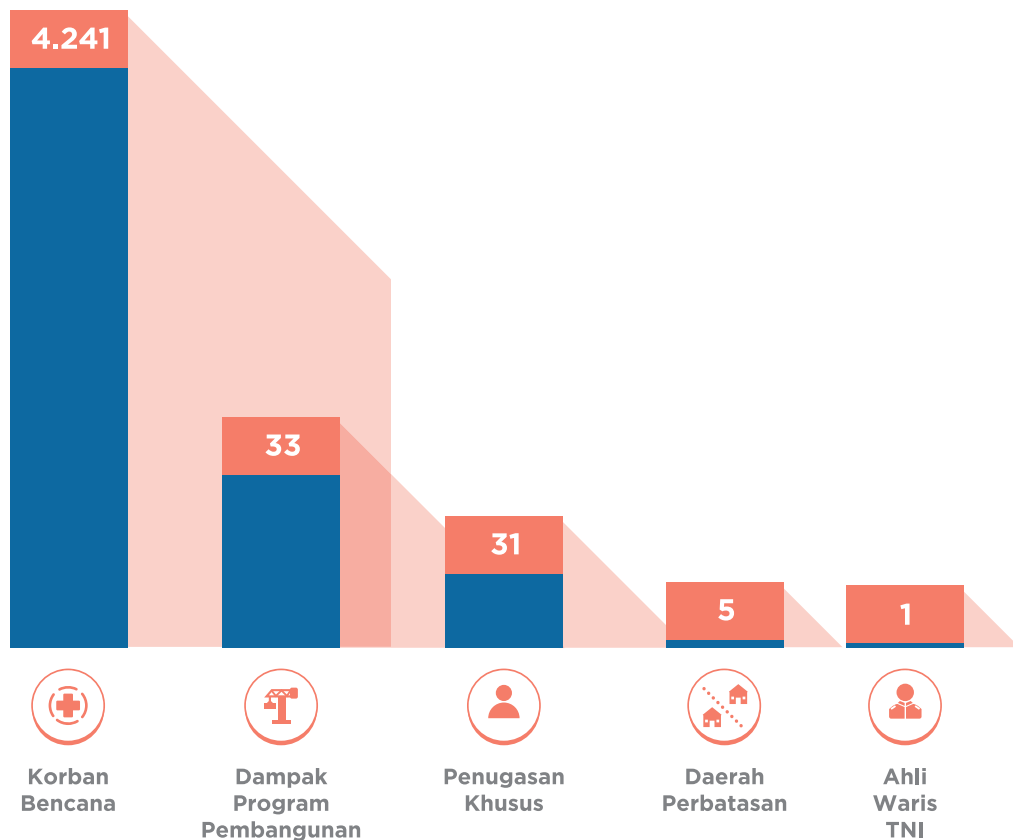
Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023



Sebaran Rumah Khusus Tahun 2015-2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

Berdasarkan grafik di atas, persebaran pembangunan rumah khusus paling banyak berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni sebanyak 3.436 dari total 4.311 rumah.



Sebaran Rumah Khusus Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

Adapun penerima rumah khusus terbanyak pada tahun 2023 adalah masyarakat yang menjadi korban bencana seperti banjir atau gempa bumi.

3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

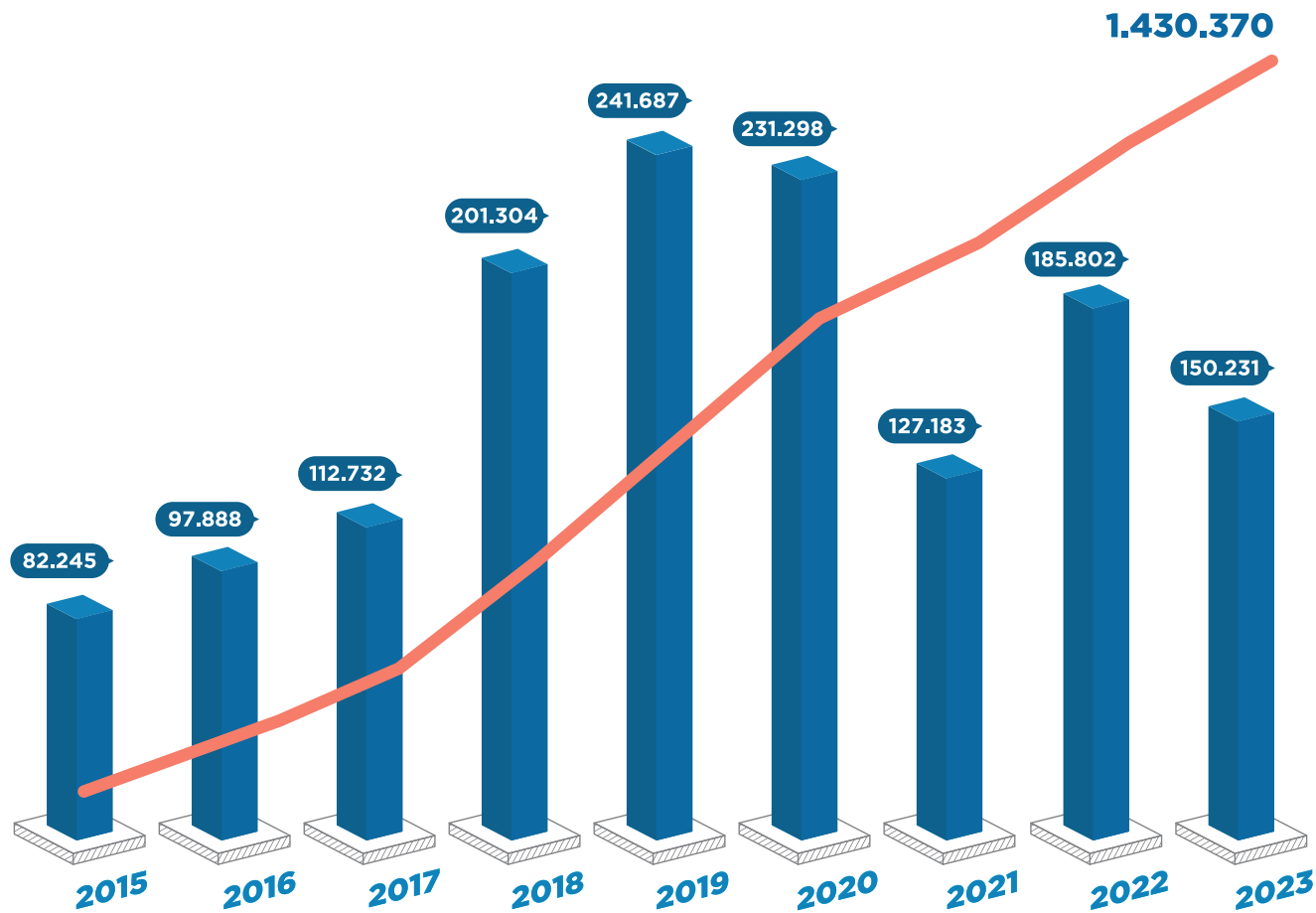
Undang Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Namun kegiatan pembangunan rumah secara swadaya seringkali belum memenuhi kualitas rumah layak huni dari segi sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. BSPS hadir sebagai program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. BSPS merupakan bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2022, Penerima bantuan kegiatan BSPS merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan yang terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program.

Masyarakat yang menjadi sasaran penerima BSPS adalah MBR yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, menguasai tanah dengan alas hak yang sah, berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP), menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan Pemerintah untuk bantuan perumahan, bersedia berswadaya, dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung bersama-sama.

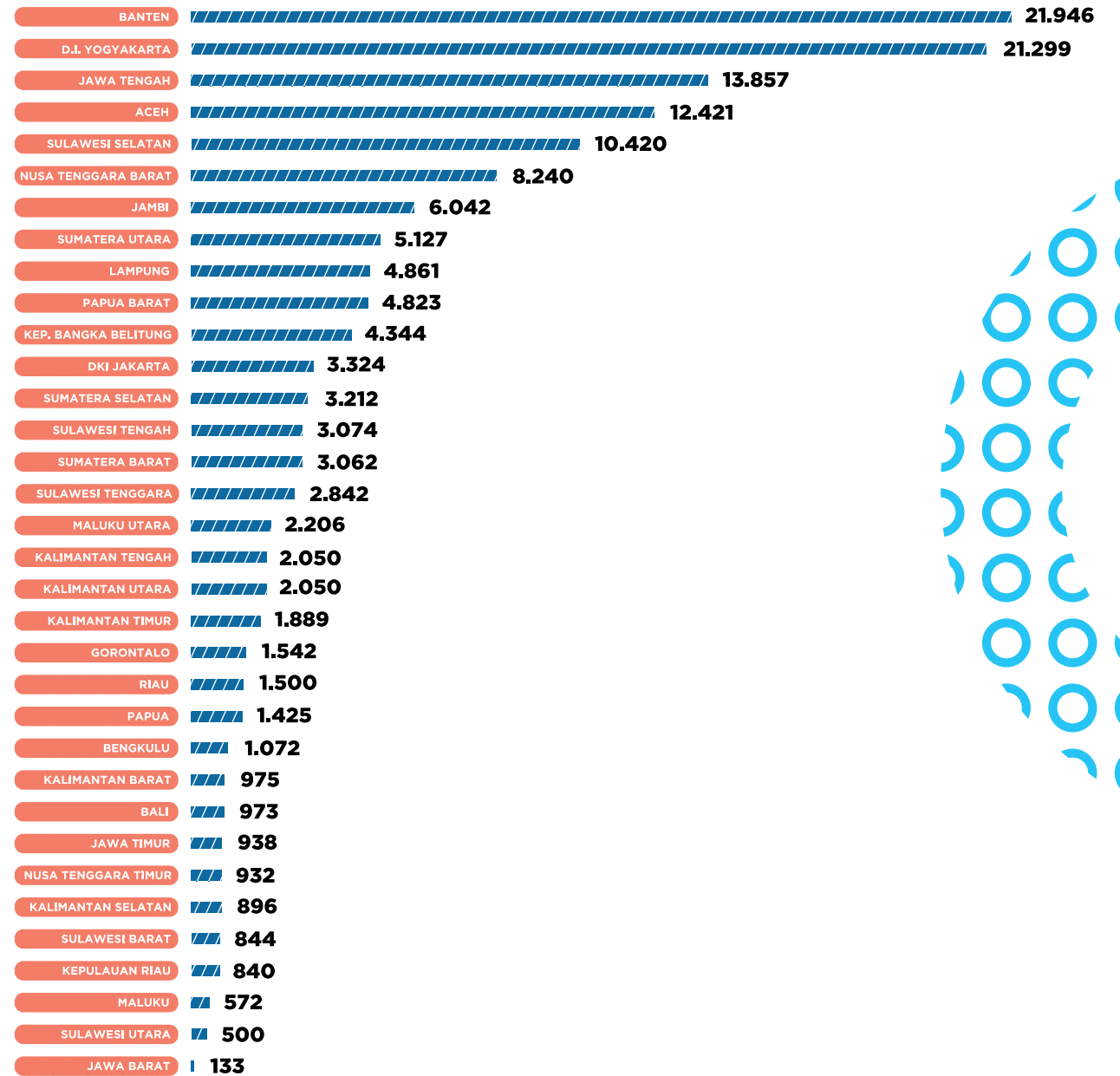
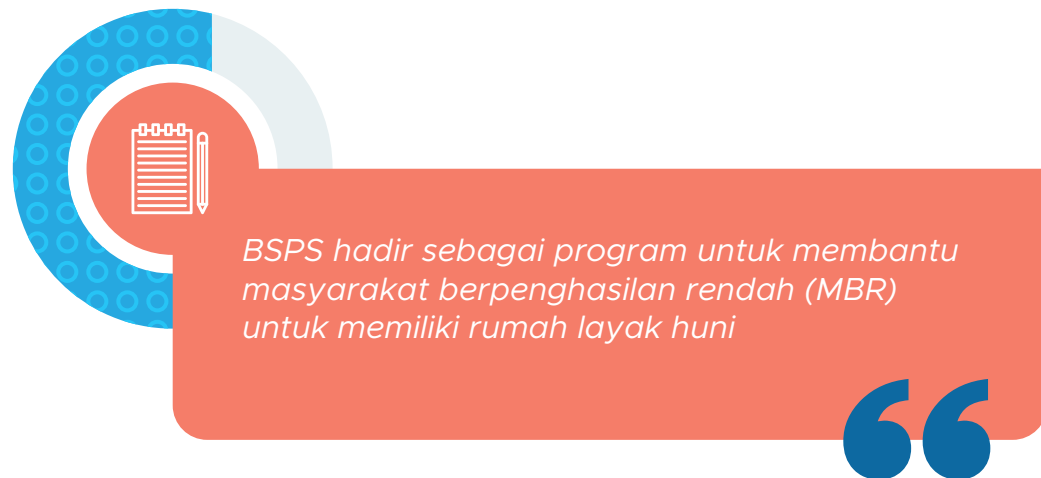
Berikut adalah realisasi BSPS tahun 2015-2023 beserta sebaran program BSPS di Indonesia.





Jumlah BSPS Tahun 2015 - 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023



Sebaran BSPS Tahun 2023

Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023

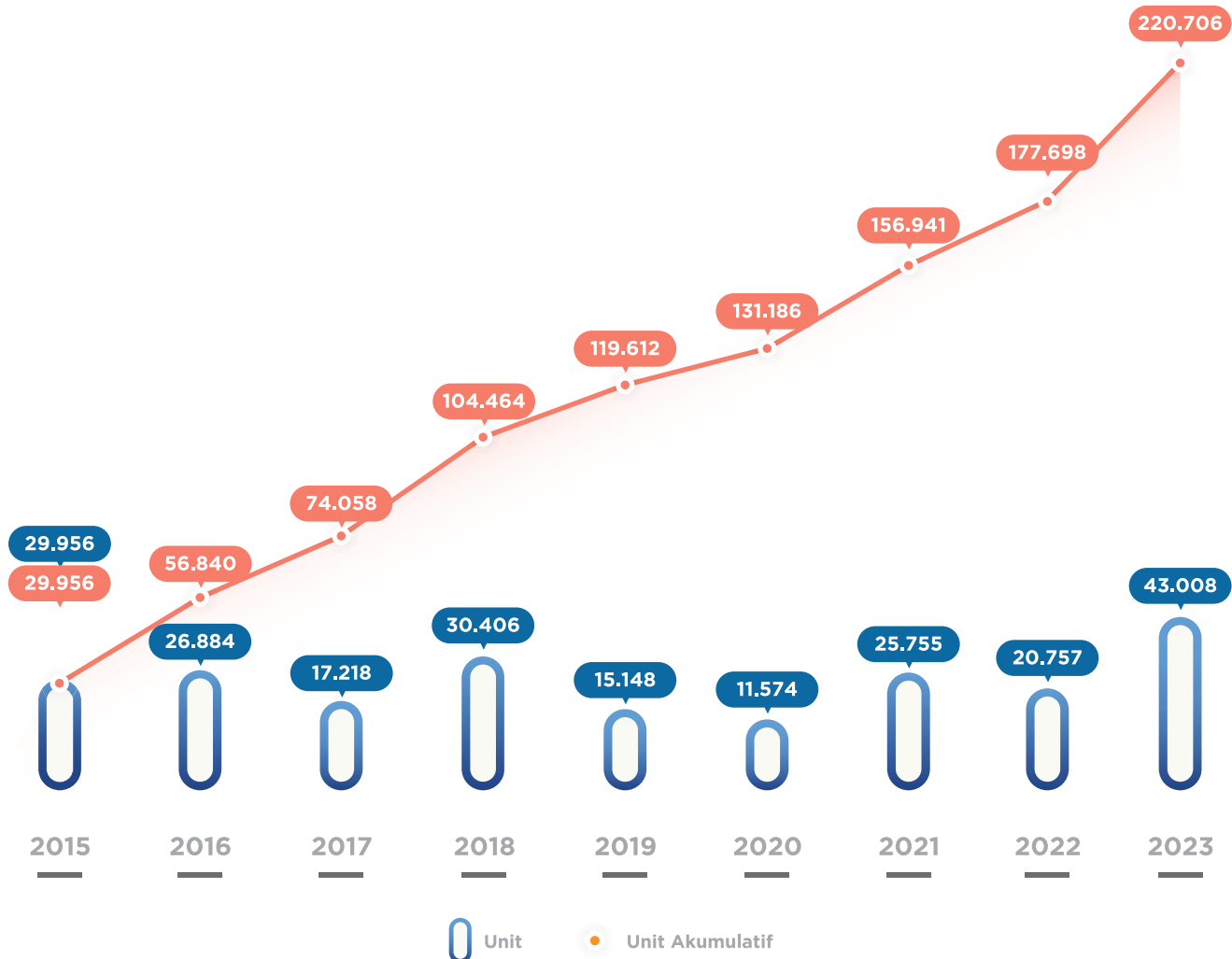
BSPS yang disalurkan pada tahun 2023 mencapai 150.231. Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 35.571. Provinsi Banten menjadi provinsi yang paling banyak mendapatkan BSPS,

kemudian diikuti Provinsi DI Yogyakarta. Kedua provinsi tersebut mendapatkan BSPS lebih dari 21.000. Sementara Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang paling sedikit mendapatkan BSPS,

4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU)

Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) adalah pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian untuk memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2022, bentuk bantuan pembangunan PSU meliputi jalan, drainase, sistem penyediaan air minum, dan prasarana dan sarana persampahan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah lebih dari 100% dibanding tahun 2022, yaitu sebanyak 43.008 PSU yang tersalurkan. Berikut ini adalah jumlah unit rumah yang mendapat bantuan PSU pada tahun 2015-2023.



Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2015-2023
 Sumber: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, 31 Desember 2023



Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah lebih dari 100% dibanding tahun 2022, yaitu sebanyak 43.008 PSU yang tersalurkan



BINA

KONSTRUKSI



BAB

07



BINA
KONSTRUKSI

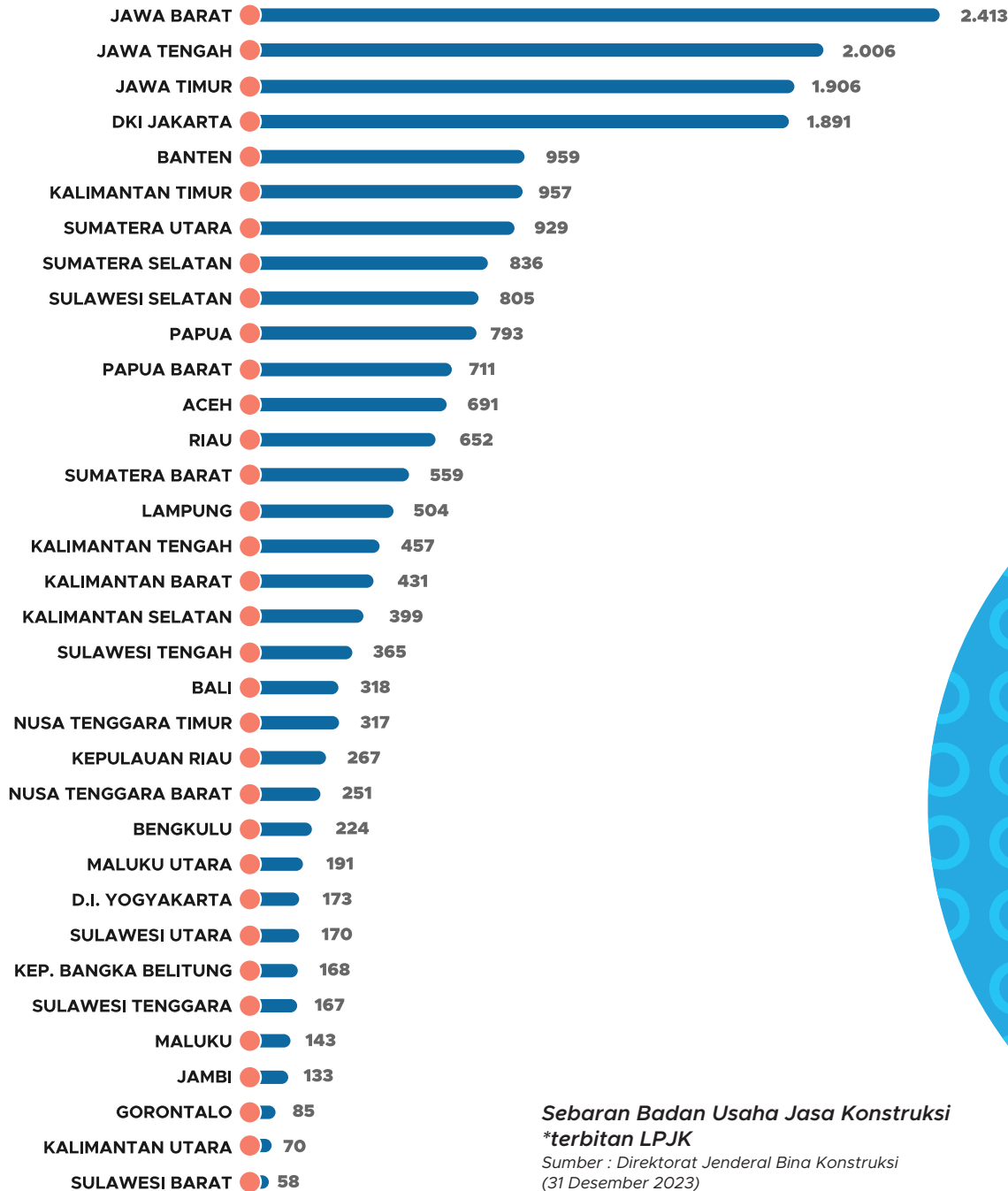
07

Pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat diragukan lagi. Infrastruktur menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi, konstruksi merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah. Kegiatan konstruksi inilah yang melahirkan berbagai infrastruktur vital seperti gedung, jalan, jembatan, bangunan air, sistem drainase, sanitasi, dan berbagai fasilitas penting lainnya yang menjadi pondasi bagi kemajuan suatu negara.

Guna mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan iklim industri konstruksi yang kondusif, efisien, dan berdaya saing. Industri jasa konstruksi harus dilakukan secara tertib, didukung dengan kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha, kemitraan yang kuat antara Pemerintah dengan mitra terkait, modernisasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan sumber daya perlu dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pengembangan industri konstruksi, dibutuhkan kolaborasi diantara semua pemangku kepentingan. Kementerian PUPR terus berupaya untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan tumbuh positif melalui pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah dengan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan di bidang Jasa Konstruksi.

01 . Badan Usaha
Jasa Konstruksi

Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi menurut Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022. Sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, BUJK terus berkembang dan bertambah jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di sektor konstruksi. Merespon hal tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk dapat mempermudah proses agar lebih efektif dan efisien dalam hal perizinan berusaha. Terbitnya UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah agar mempermudah proses dalam perizinan serta mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Regulasi sebelumnya yang berdasarkan UU No.2 Tahun 2017 mengatur proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha secara terpisah. Melalui terbitnya UU Cipta Kerja, mekanisme penerbitan SBU dan Izin Usaha menjadi terintegrasi. Akan tetapi hingga akhir tahun 2023 masih ada beberapa BUJK yang belum terdaftar pada Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU). Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2023 masih ada dua terbitan sertifikat BUJK yaitu dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU).

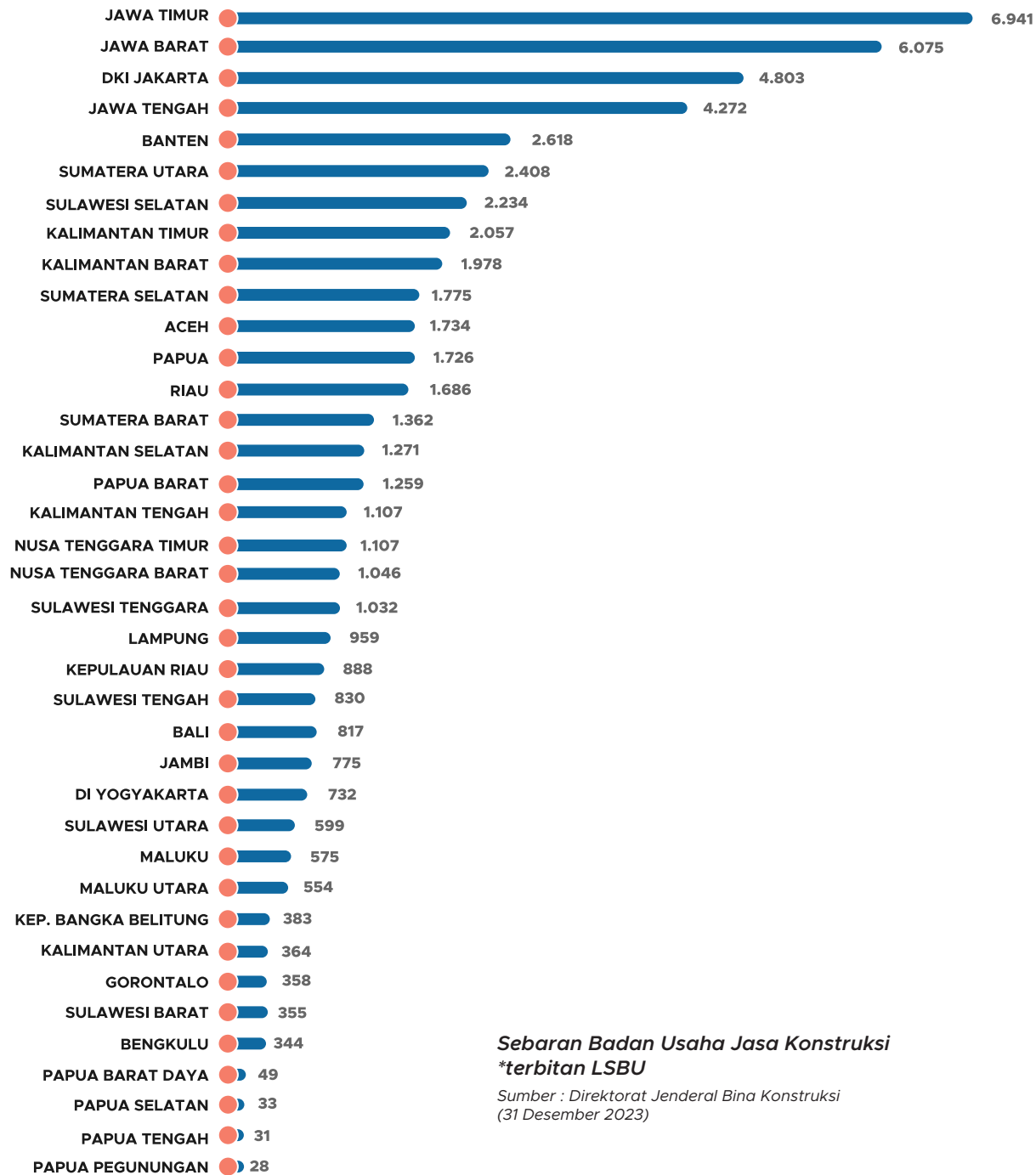


Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi
*terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(31 Desember 2023)

Berdasarkan grafik sebaran BUJK terbitan LPJK di atas, pada tahun 2023 terdapat 20.999 BUJK dengan jumlah

BUJK terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 2.413 BUJK.



Sebaran Badan Usaha Jasa Konstruksi
*terbitan LSBU

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(31 Desember 2023)

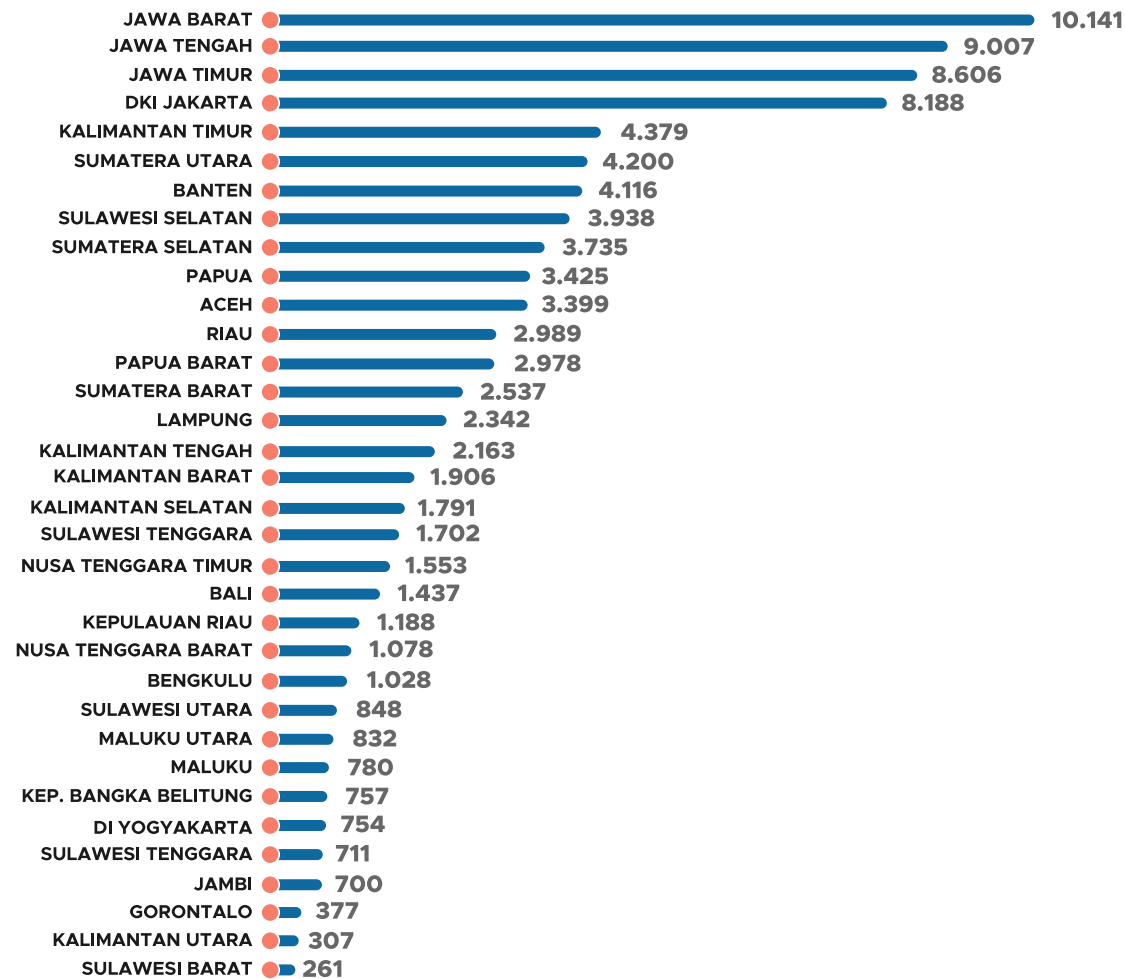
Berdasarkan grafik sebaran BUJK terbitan LSBU di atas, pada tahun 2023 tercatat ada 57.165 BUJK

dengan jumlah BUJK terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 6.941 BUJK.

02 . Sertifikat Badan Usaha

Salah satu persyaratan BUJK untuk dapat menjalankan usahanya adalah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU merupakan suatu dokumen guna menunjukkan bahwa sebuah badan usaha konstruksi legal dan layak dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021, SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJK asing. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja. Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, mekanisme perizinan saat ini menjadi lebih sederhana dengan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha yang meliputi SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Pusat melalui *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem perizinan yang terintegrasi, pelaku usaha dapat lebih mudah mengajukan perizinan berusaha. Saat ini, sebagian SBU masih diterbitkan oleh LPJK karena masih dalam proses transisi yang nantinya akan menjadi terbitan LSBU.

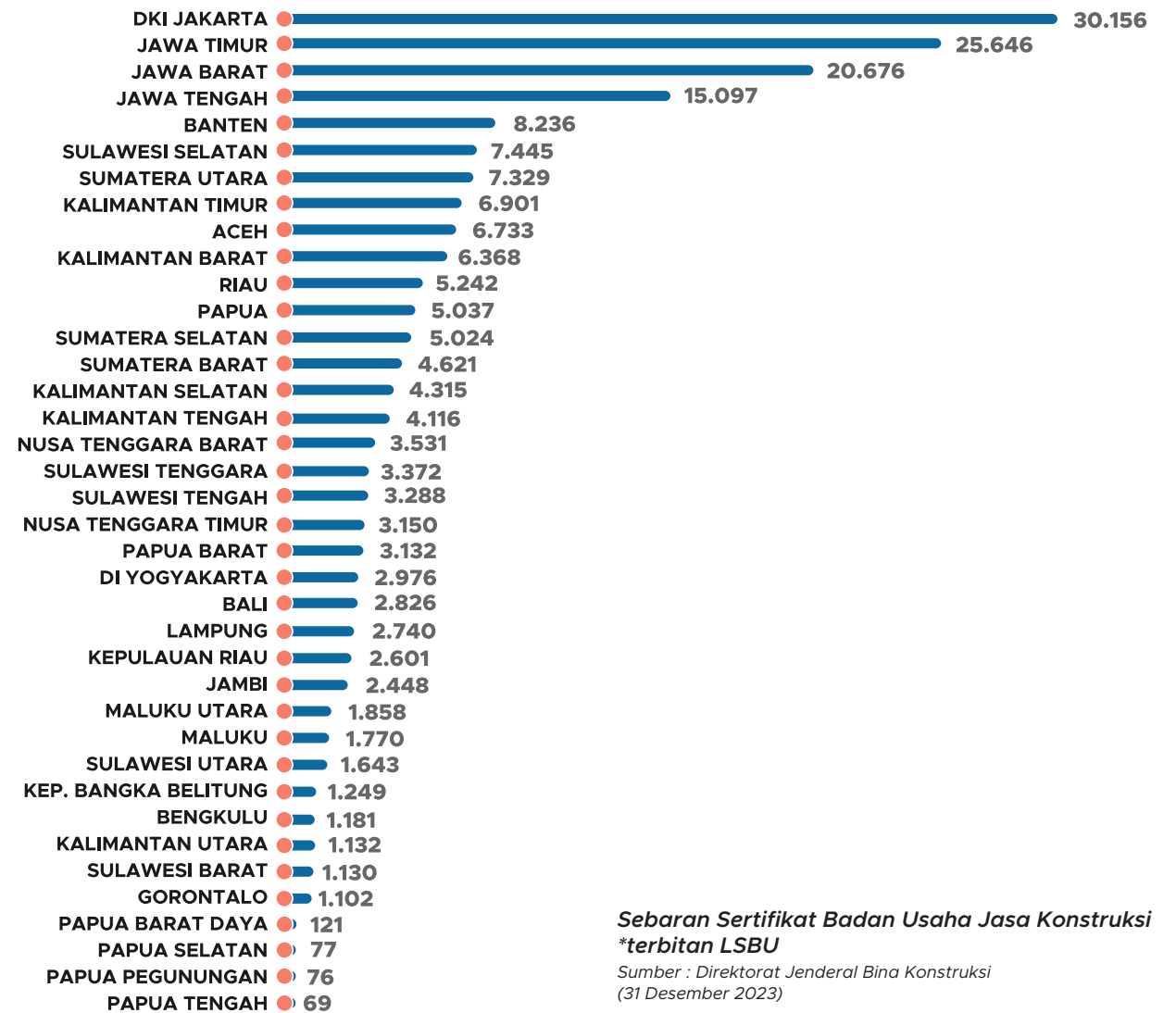




Sebaran Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
*terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU terbitan LPJK di atas, pada tahun 2023 tercatat ada 94.153 SBU yang diterbitkan oleh LPJK dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.141 SBU.



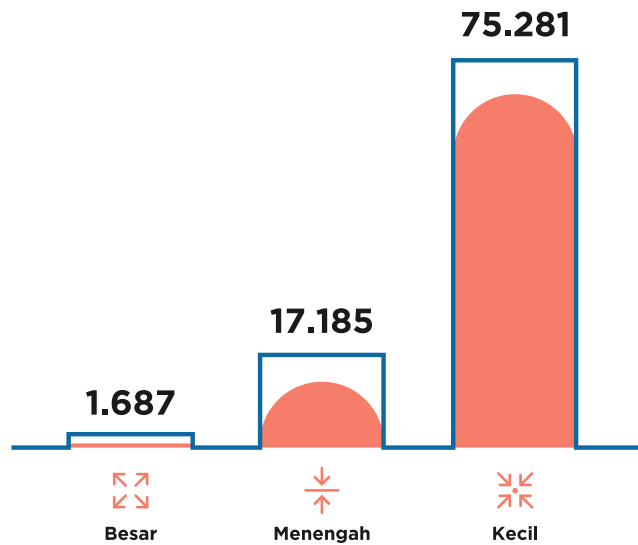
Sebaran Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
*terbitan LSBU

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
(31 Desember 2023)

Berdasarkan grafik Sebaran SBU terbitan LSBU di atas, pada tahun 2023 tercatat ada 204.414 SBU yang terdaftar pada LSBU dengan jumlah terbanyak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30.156 SBU.

Kualifikasi adalah pengelompokan usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja menurut PP No.14 Tahun 2021. Dalam Permen PUPR No.8 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penetapan kualifikasi BUJK yang bersifat umum dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen penjualan tahunan,

kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, dan kemampuan penyediaan peralatan. Kualifikasi akan menentukan besaran proyek yang akan dikerjakan oleh BUJK. Sama seperti sebaran SBU, sampai saat ini pengelompokkan usaha jasa konstruksi berdasarkan kualifikasi masih terdapat dua versi terbitan yaitu dari LPJK dan LSBU.

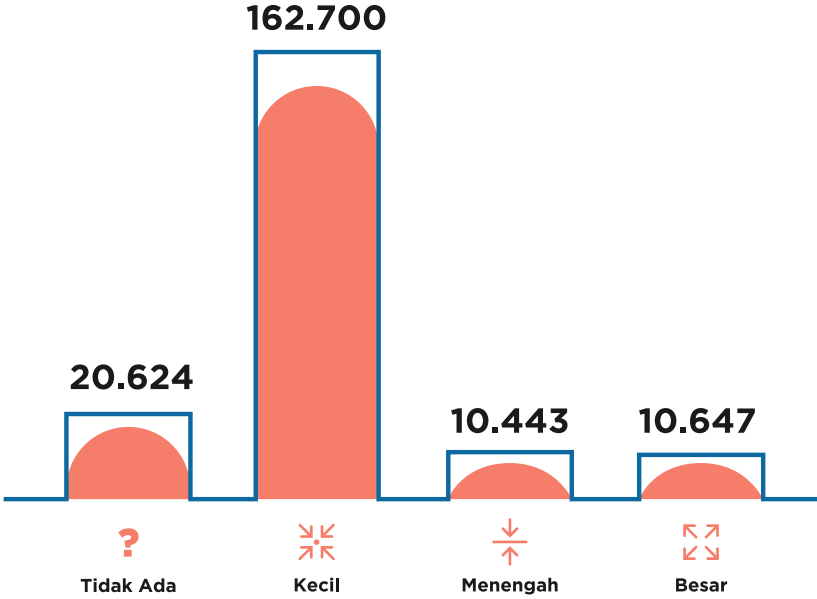


Jumlah Sertifikat Badan Usaha Berdasarkan Kualifikasi
*terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

Berdasarkan grafik Jumlah SBU berdasarkan kualifikasi terbitan LPJK, SBU dengan kualifikasi kecil paling banyak yaitu 75.281 SBU, sedangkan SBU dengan kualifikasi besar paling sedikit yaitu 1.687 SBU.

Kualifikasi adalah pengelompokan usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja



Jumlah Sertifikat Badan Usaha berdasarkan kualifikasi
*terbitan LSBU

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

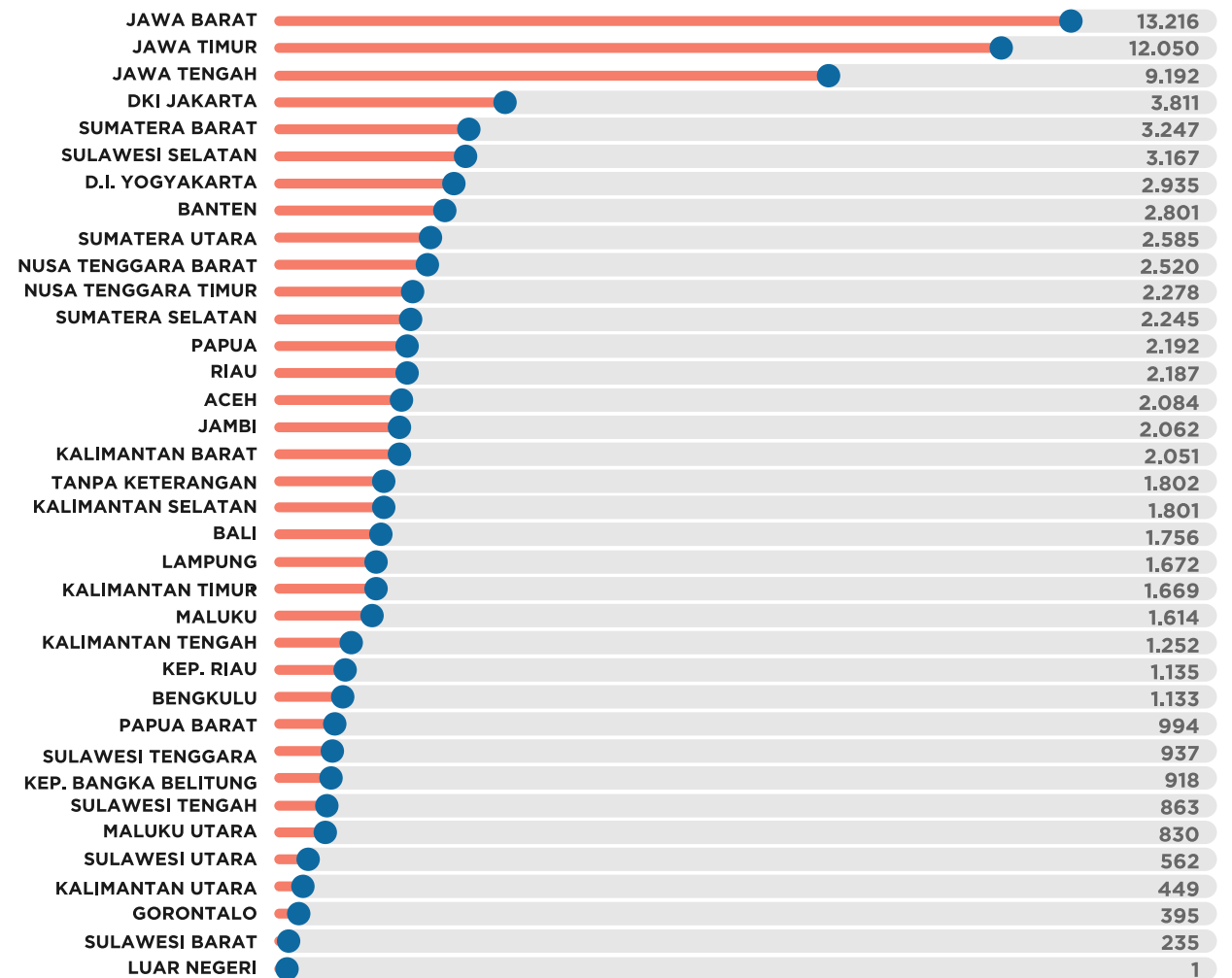
Berdasarkan grafik Jumlah SBU Berdasarkan Kualifikasi terbitan LSBU, SBU dengan kualifikasi kecil paling banyak yaitu 162.700 SBU, sementara itu SBU dengan kualifikasi menengah paling sedikit yaitu 10.443 SBU.

03 . Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Seperti halnya BUJK, setelah terbitnya UU Cipta Kerja mekanisme penerbitan SKK mengalami perubahan. Hingga tahun 2023 masih dalam masa transisi, sehingga terdapat dua versi terbitan yaitu dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikat profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Nantinya sertifikasi diselenggarakan oleh LSP terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan tercatat di LPJK.



Jumlah TKK
terbanyak berada
di Provinsi Jawa
Barat yaitu
sebanyak 13.216
TKK

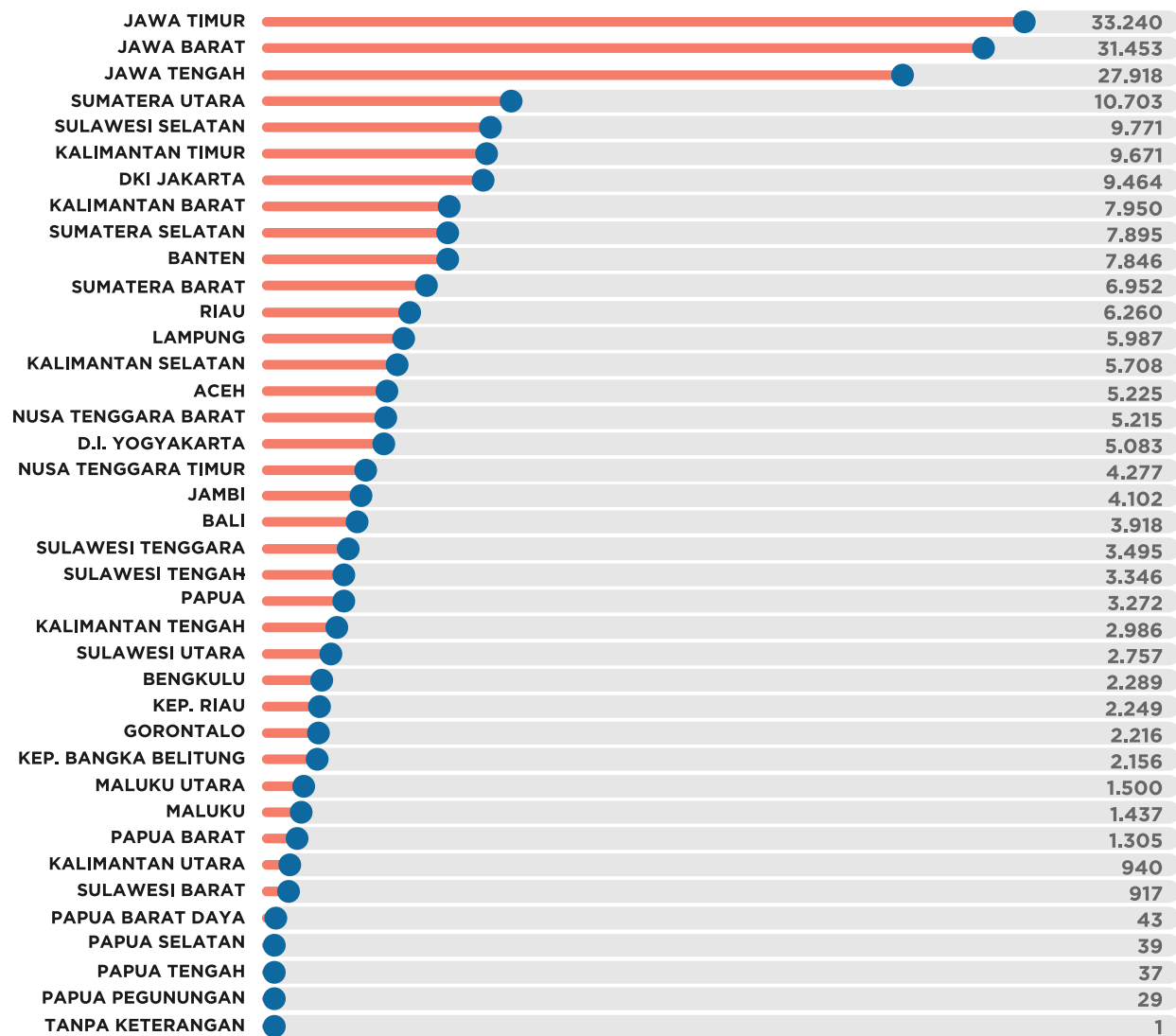


Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi
*terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

Berdasarkan Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LPJK Tahun 2023 terdapat 90.641 TKK dengan jumlah TKK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 13.216 TKK.





Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi
*terbitan LSP

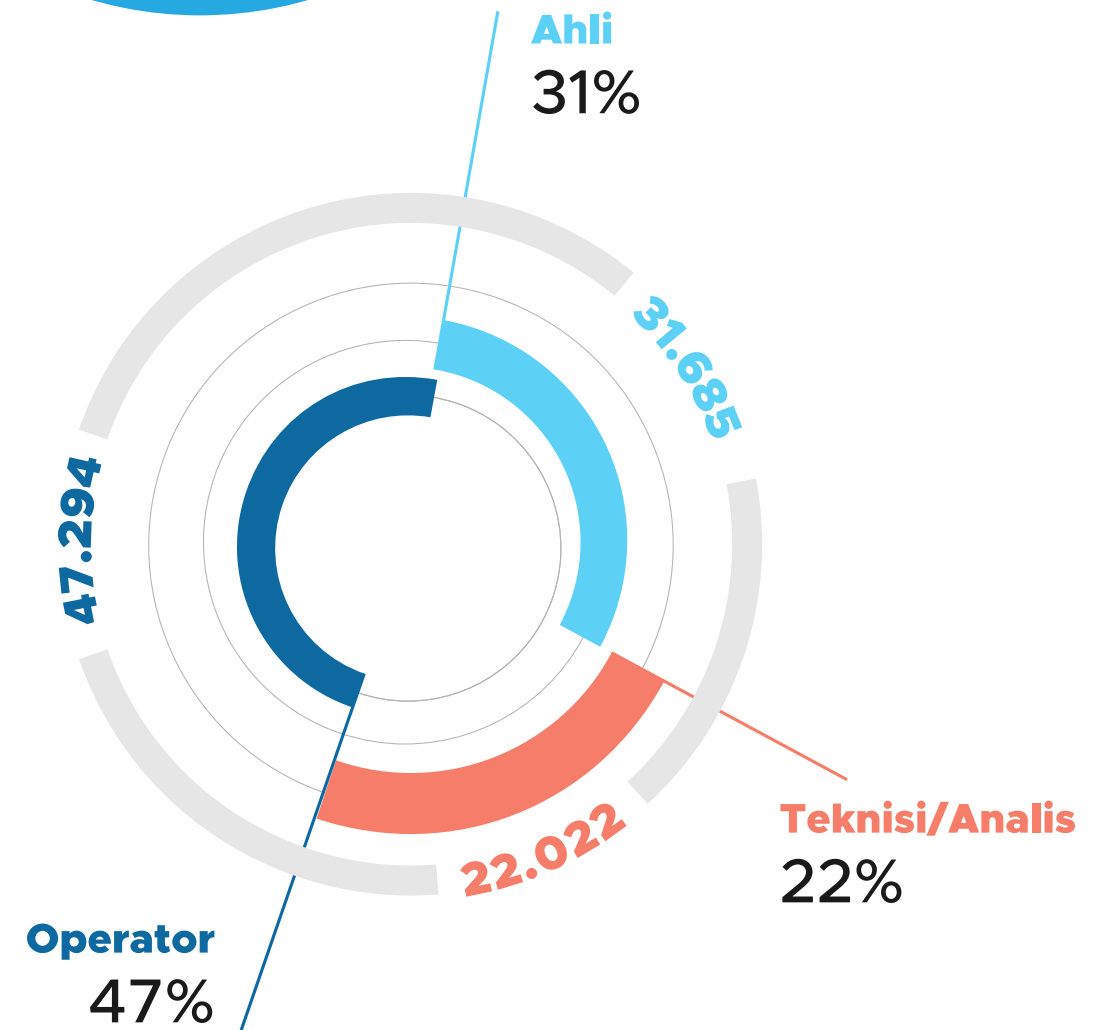
Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

Berdasarkan grafik Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LSP Tahun 2023 terdapat 239.652 TKK dengan jumlah TKK terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 33.240 TKK.

Kualifikasi SKK merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja perseorangan

di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi profesi dan keahlian.

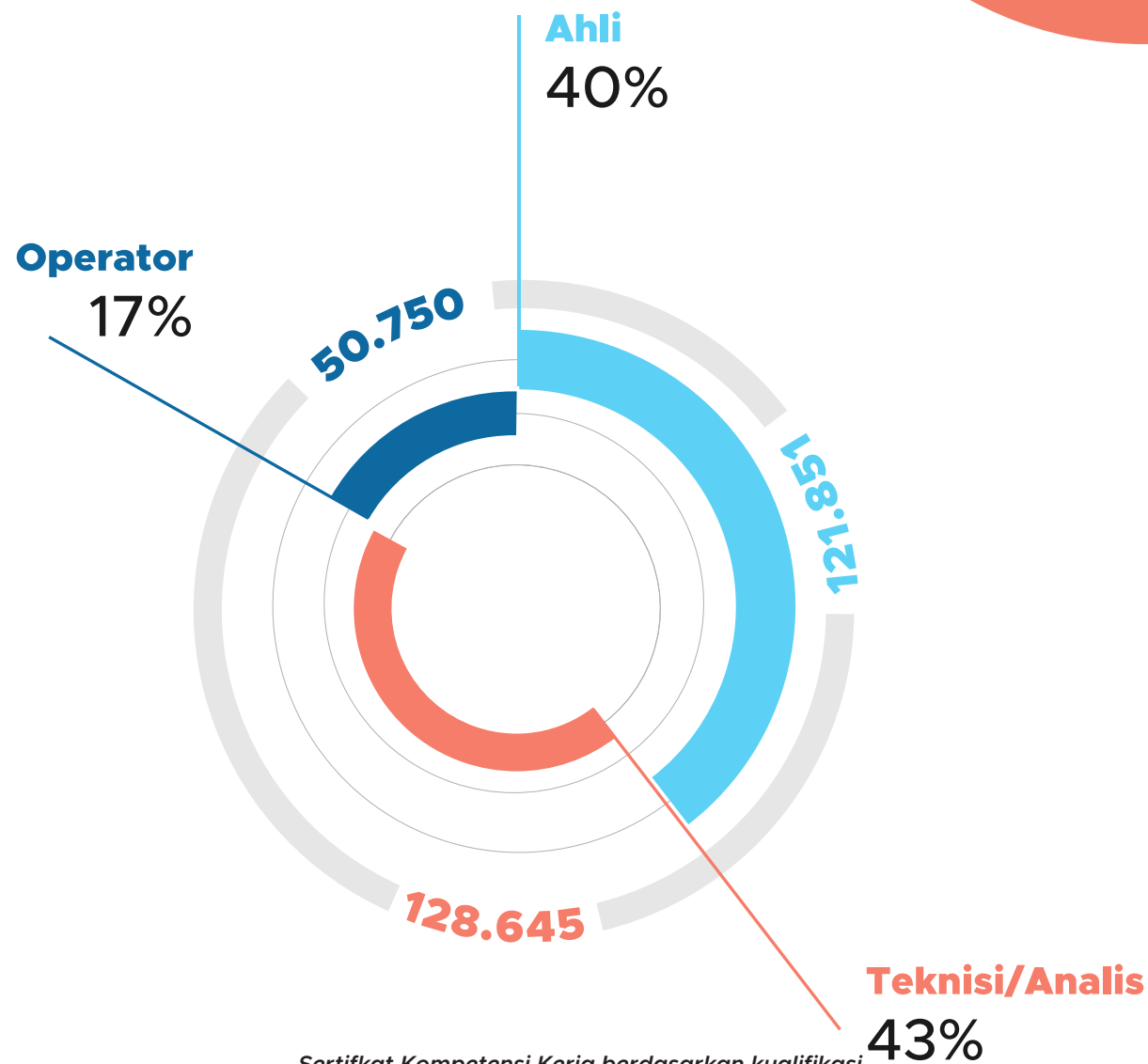
Berdasarkan PP No.14 Tahun 2021 SKK untuk TKK terdiri atas kualifikasi ahli, kualifikasi teknisi/analisis, dan kualifikasi operator. Setiap kualifikasi terdapat 3 jenjang. Setiap TKK wajib memiliki minimal satu SKK dan bisa memiliki lebih dari satu SKK sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sertifikat Kompetensi Kerja berdasarkan kualifikasi
*terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

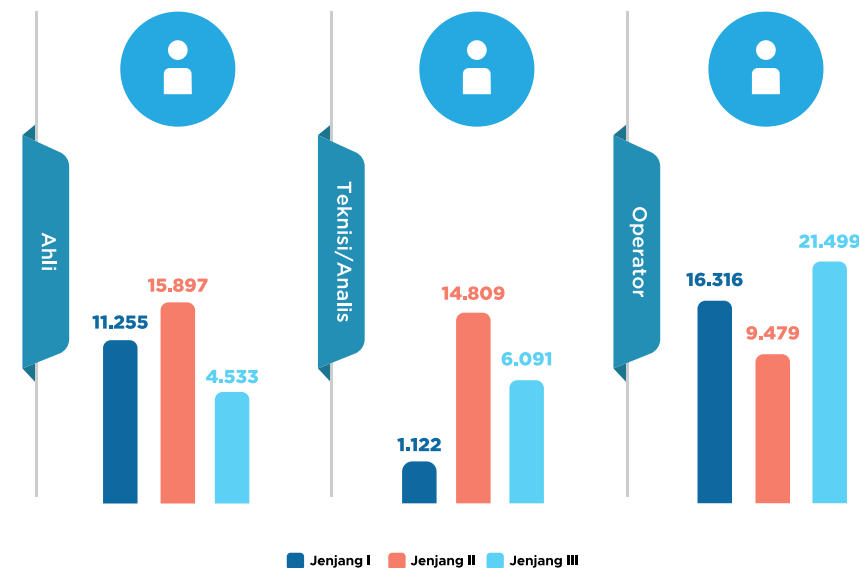
Berdasarkan grafik di atas, terdapat 101.001 SKK yang tercatat pada LPJK. Persentase SKK dengan dengan kualifikasi Operator merupakan kualifikasi dengan persentase terbanyak yaitu 47% atau 47.294 SKK. Selanjutnya kualifikasi Ahli dengan persentase 31% atau 31.685 SKK. Terakhir kualifikasi Teknisi/Analisis dengan persentase 22% atau 22.022 SKK.



Sertifikat Kompetensi Kerja berdasarkan kualifikasi *terbitan LSP

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

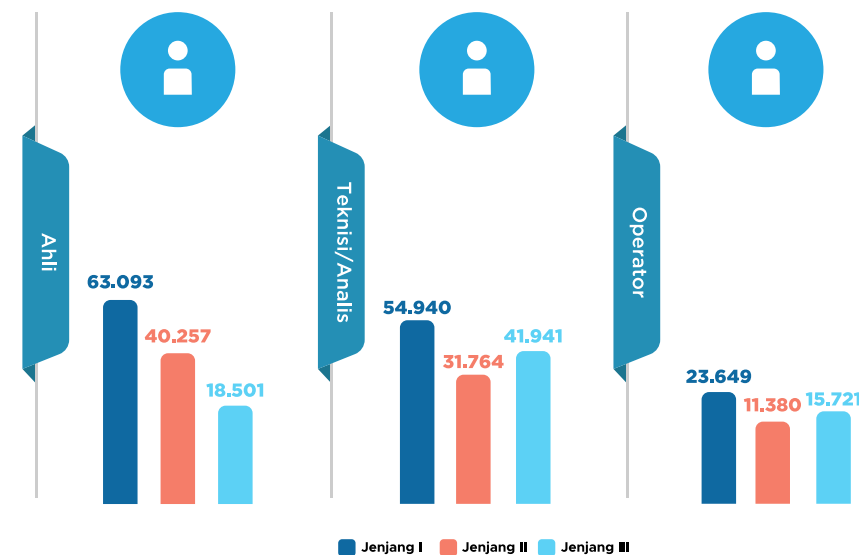
Berdasarkan grafik di atas, terdapat 301.246 SKK yang tercatat pada LSP. Persentase SKK dengan dengan kualifikasi Teknisi/Analisis merupakan kualifikasi dengan persentase terbanyak yaitu 43% atau 128.645 SKK. Selanjutnya, kualifikasi Ahli dengan persentase 40% atau 121.851 SKK. Terakhir, kualifikasi Operator dengan persentase 17% atau 50.750 SKK.



Berdasarkan grafik terbitan LPJK di samping, pada kualifikasi ahli, jenjang II memiliki jumlah SKK terbanyak yang mencapai 15.897 SKK. Pada kualifikasi teknisi/analisis, jenjang II memiliki jumlah SKK terbanyak yaitu 14.809 SKK. Selanjutnya pada kompetensi operator, jenjang III memiliki jumlah SKK terbanyak yaitu 21.499 SKK.

Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan Jenjang *terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)



Berdasarkan grafik terbitan LSP di samping, jenjang I merupakan jumlah SKK terbanyak diantara jenjang yang lainnya pada tiap kualifikasi. Jenjang I pada kualifikasi Ahli mencapai 63.093 SKK, Jenjang I pada kualifikasi teknisi/analisis mencapai 54.940 SKK, dan jenjang I pada kualifikasi operator mencapai 23.649 SKK.

Sertifikat Kompetensi Kerja Berdasarkan Jenjang *terbitan LSP

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

**SUMBER
DAYA
MANUSIA**



BAB

08

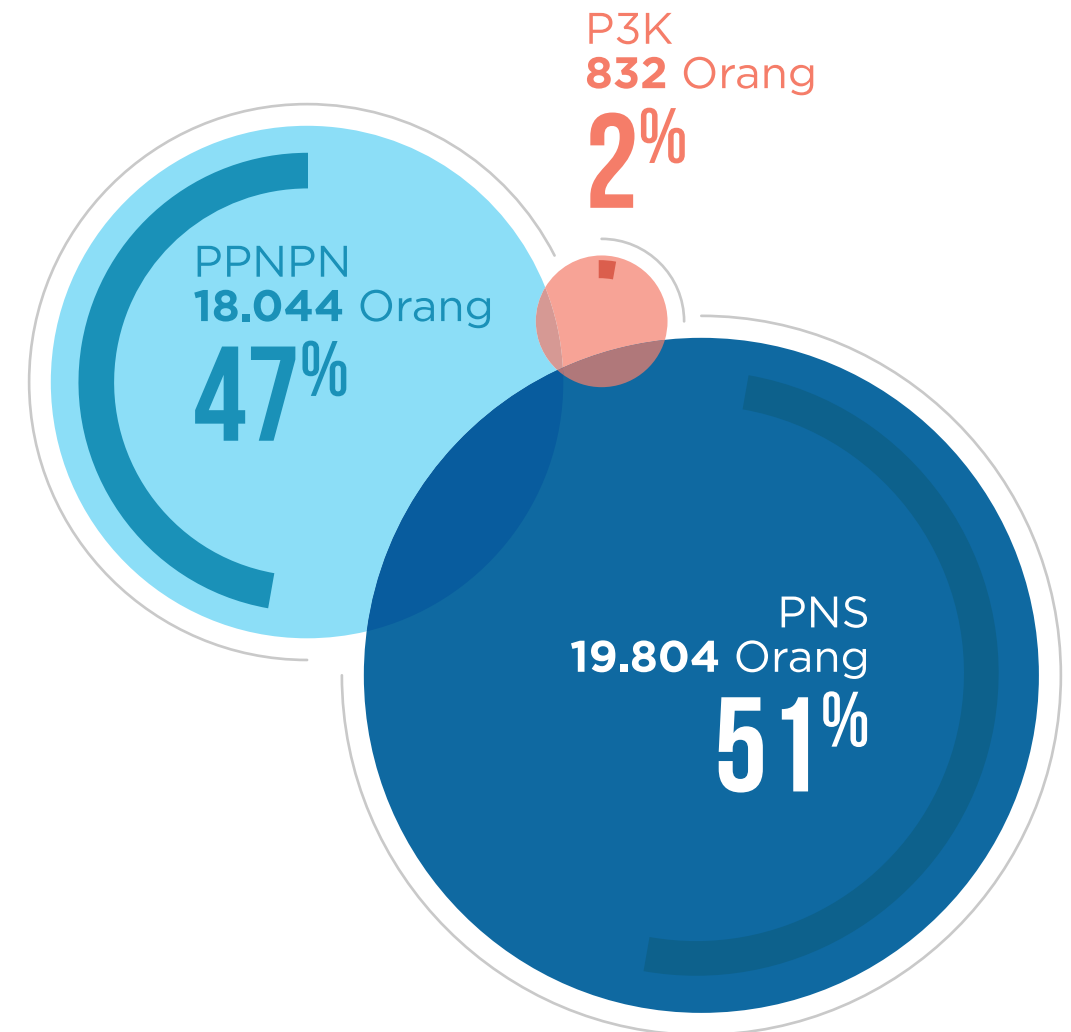
Jembatan suramadu, Bangkalan

SUMBER DAYA MANUSIA

08

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam pembangunan infrastruktur. Kualitas maupun kuantitas SDM infrastruktur berpengaruh langsung terhadap *project & policy delivery*; tidak terbatas pada pelaksanaan proyek di lapangan. Oleh karena itu peningkatan dari segi kapasitas dan kompetensi SDM Kementerian PUPR perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur. Saat ini ASN Kementerian PUPR hingga bulan Desember tahun 2023 mencapai 38.680 pegawai yang terdiri dari 19.804 (51,20%) pegawai PNS, 832 (2,15%) pegawai P3K, dan 18.044 (46,65%) pegawai PPNNP.

Saat ini ASN Kementerian PUPR hingga bulan Desember tahun 2023 mencapai 38.680 pegawai



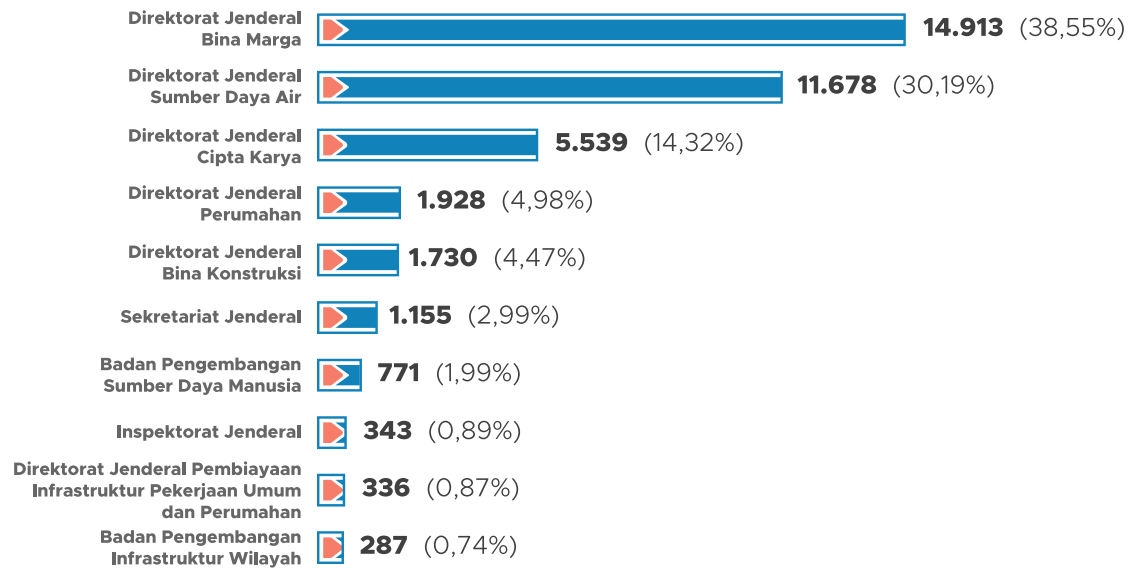
Persentase Pegawai Kementerian PUPR tahun 2023

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

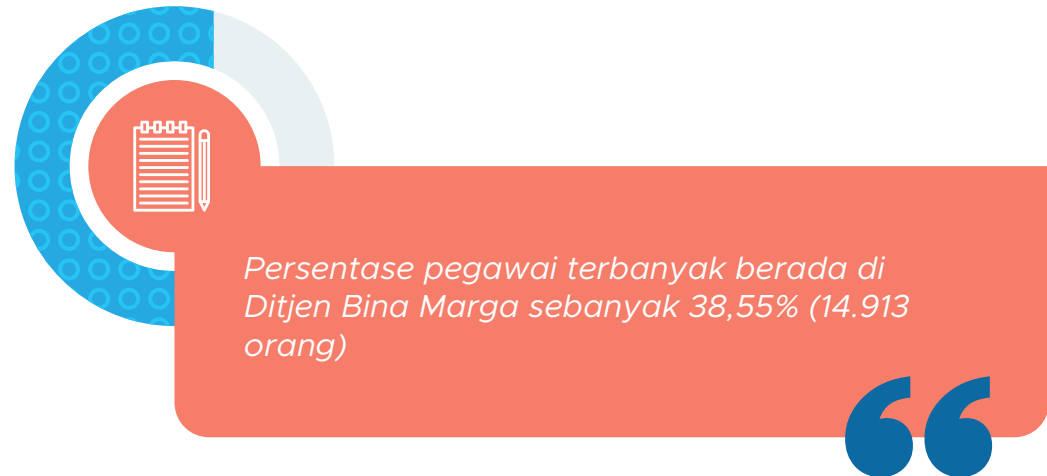


Sumber : https://theopini.id/wp-content/uploads/2022/08/20220802_103747-scaled.jpg

Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai terbanyak berada di Ditjen Bina Marga sebanyak 38,55% (14.913 orang), Ditjen Sumber Daya Air 30,19% (11.678 orang), dan Ditjen Cipta Karya 14,32% (5.539 orang). Adapun unor dengan persentase pegawai paling sedikit ialah BPIW dengan 0,74% (287 orang).

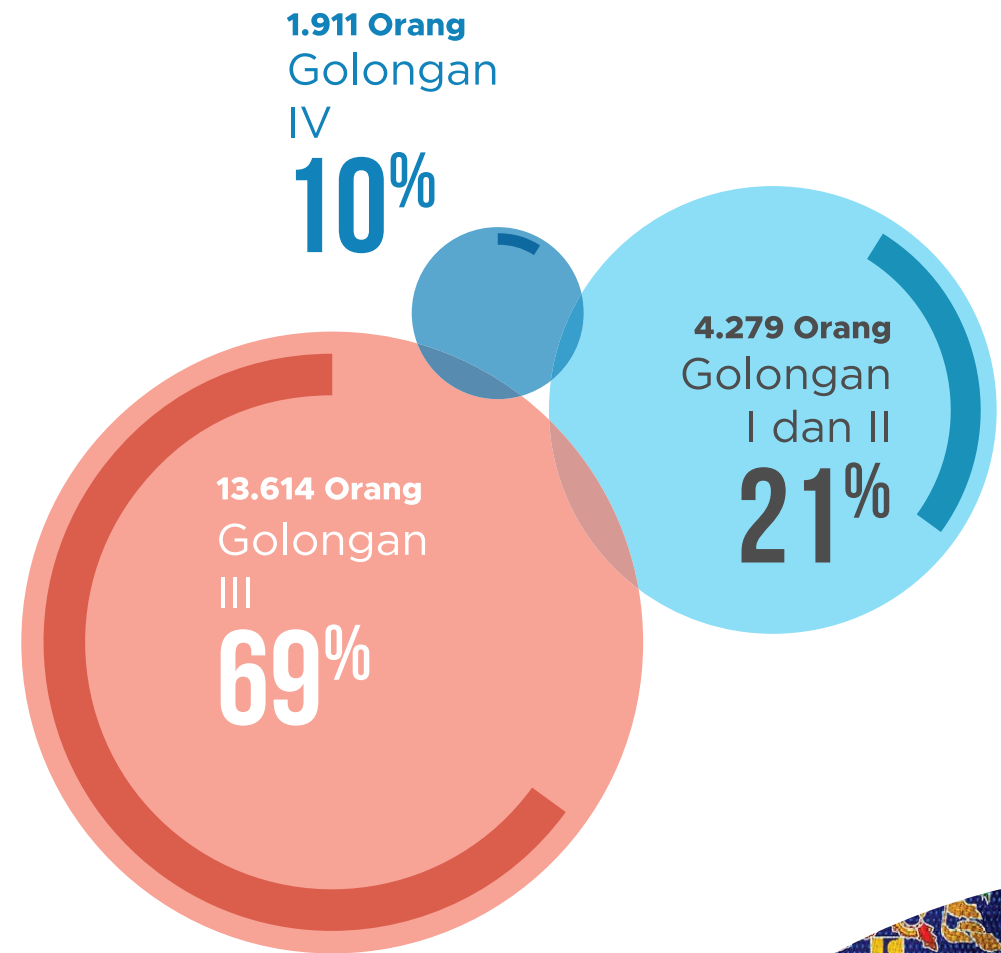


Jumlah dan Persentase Pegawai
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



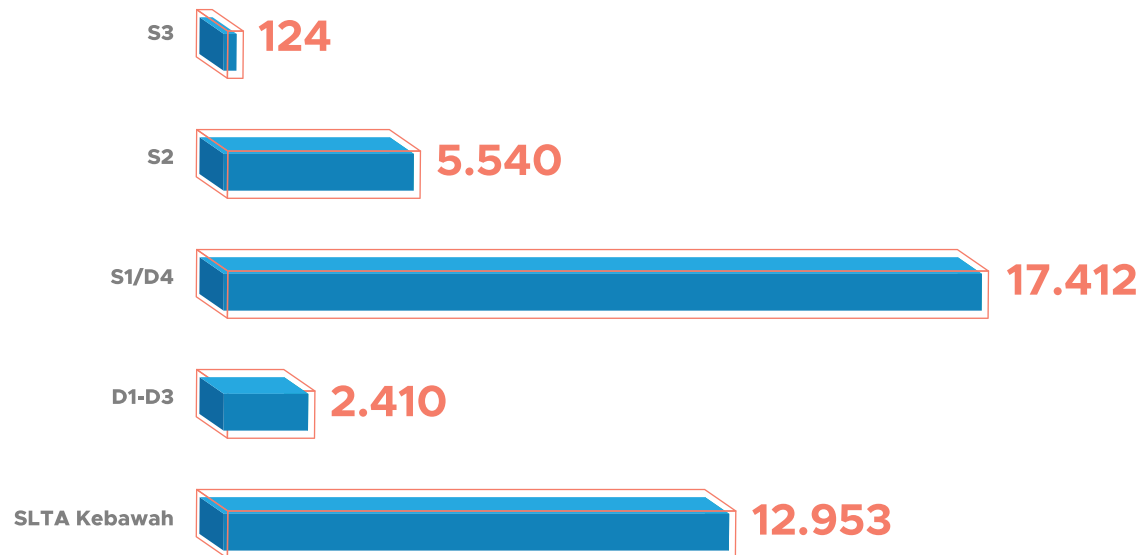
Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai ASN (PNS dan P3K) Kementerian PUPR dengan golongan IV mencapai 1.911 pegawai atau sebesar 9,65%. Kemudian pegawai dengan

golongan III sebanyak 13.614 pegawai atau sebesar 68,74% serta golongan II dan I terdapat 4.279 pegawai atau sebesar 21,61%.



Persentase Pegawai ASN Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

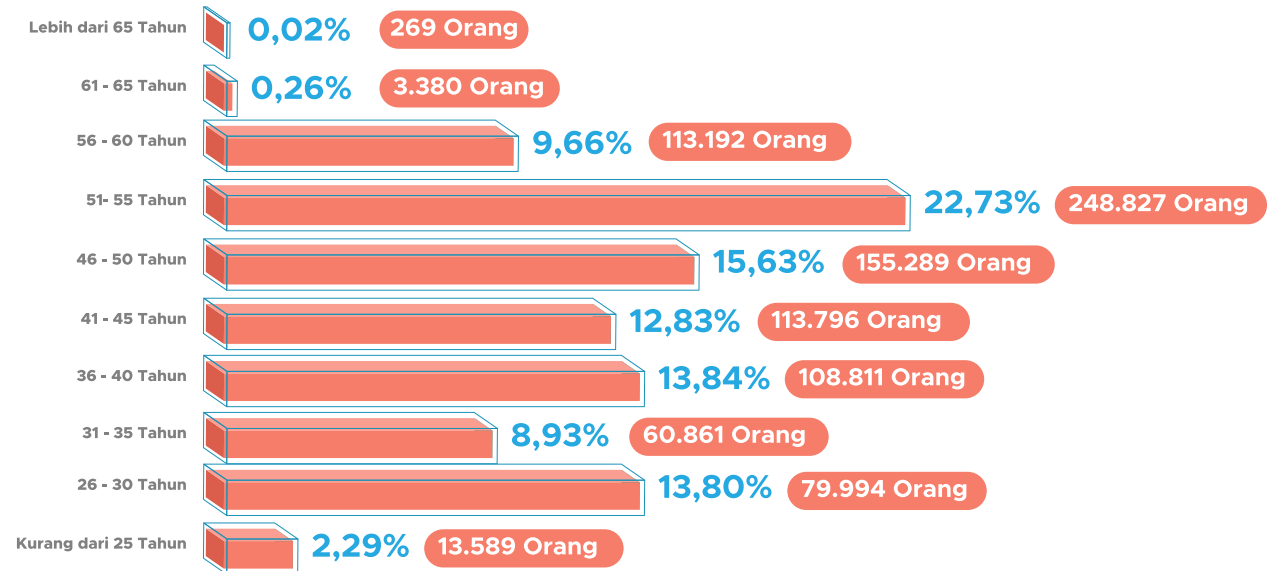
Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai dengan jenjang pendidikan S1/D4 menempati posisi terbanyak yaitu 17.412 orang atau sebesar 45,02%. Terbanyak kedua diikuti oleh pegawai dengan pendidikan yang ditamatkan paling tinggi SLTA, lalu kemudian Pascasarjana atau S2 sebanyak 5.540 orang. Sementara itu jumlah paling sedikit adalah pegawai dengan jenjang pendidikan S3 yang mencapai 124 orang.



Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan
 Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023

Berdasarkan rentang usia, pada tahun 2023 tercatat jumlah pegawai pada rentang usia 51-55 tahun adalah yang terbanyak dengan persentase 22,73%. Terbanyak kedua yaitu pegawai pada rentang usia 46-50 tahun dengan

persentase 15,63%. Pegawai dengan rentang usia kurang dari 25 tahun hanya terdapat sebanyak 2,29% dari total seluruh pegawai. Secara keseluruhan, rata-rata usia pegawai yaitu 43 tahun.



Persentase Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Rentang Usia
 Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



Pada tahun 2023 tercatat jumlah pegawai pada rentang usia 51-55 tahun adalah yang terbanyak dengan persentase 22,73%

Pengarusutamaan Gender

Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama.

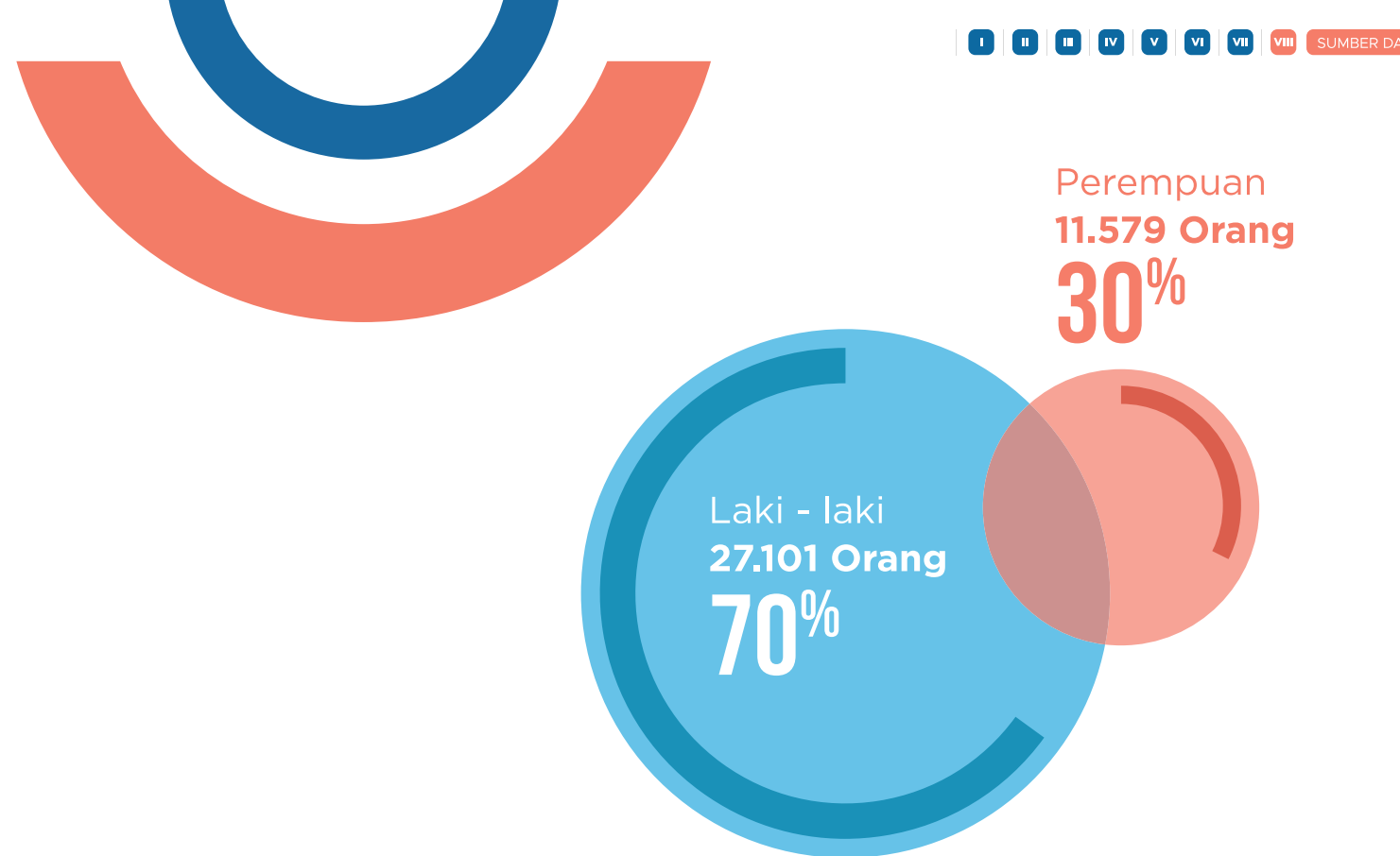
Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan difabel. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai upaya pengarusutamaan gender. Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas telah mengamanatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG)

menjadi hal yang harus diperhatikan karena sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Adapun saat ini Kementerian PUPR juga telah memiliki Roadmap PUG Tahun 2020-2024 sebagai bukti pelaksanaan komitmen tersebut.

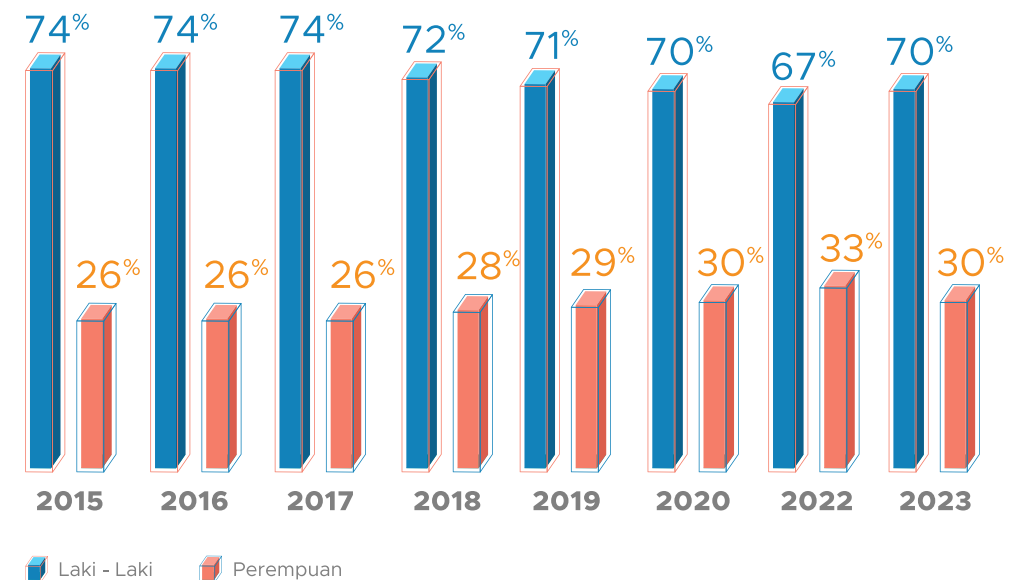
Salah satu keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR yang terus meningkat tiap tahunnya. Secara umum di tahun 2023 pegawai Kementerian PUPR masih didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar 70,06%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 29,94%. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun jumlah pegawai perempuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 183 pegawai. Kenaikan yang terjadi setiap tahun menandakan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

“Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan



Persentase jumlah pegawai Laki-laki dan Perempuan

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



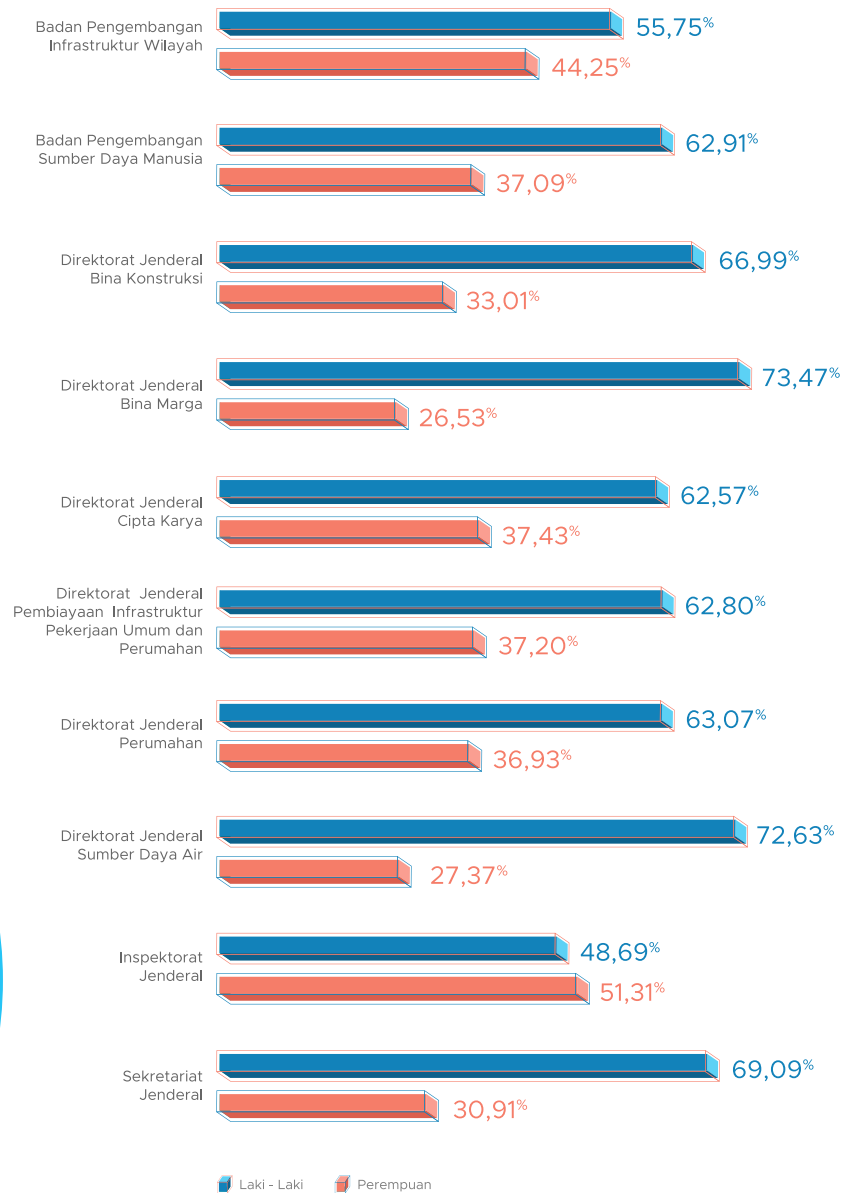
Persentase Gender pegawai PUPR

Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



Berdasarkan unit organisasinya, persentase pegawai perempuan terbesar berada di Inspektorat Jenderal yang mencapai 51,31% dari total jumlah pegawai, diikuti dengan Badan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 44,25%. Adapun unor dengan persentase pegawai perempuan paling kecil ialah Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 26,53%.



Persentase pegawai unit organisasi berdasarkan jenis kelamin
Sumber: e-HRM, 31 Desember 2023



PENUTUP



BAB

09



Jalan Tol Sayung, Demak

PENUTUP

09

Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data dan informasi statistik infrastruktur PUPR. Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat menurut provinsi dan beserta analisis statistik singkatnya. Rintisan nama Buku Informasi Statistik per tahun seperti berikut:

2006	Buku Induk Kestatistikan
2007	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2008	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2009	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2010	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2011	Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2012	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum

2013	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum
2014	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum
2015	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2016	Buku Induk Statistik
2017	Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2018	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2019	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2020	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2021	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2022	Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka penyebarluasan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan yang bermanfaat dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, serta diharapkan buku ini juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas dalam sajian yang lebih mudah dipahami dan sebagai referensi data dan informasi tentang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

 **Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR**



INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PUPR 2023

Pengarah

Mohammad Zainal Fatah

Koordinator

Nazib Faizal
Komang Sri Hartini

Penulis

Setia Dewi Prihapsari
Mayta Utari
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi
Naufal Azaki
Rozi Abrori Fathurrochim
Nita Fikhriani Azhari
Shinta Afwa Nisaa

Editor dan Tata Letak

Siti Nurdini
Solichin Syafril

Kontributor

Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direktorat Jenderal Perumahan
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Badan Pusat Statistik
Arief Ardhian Nugroho

Penerbit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Maret 2024

Informasi Statistik Infrastruktur PUPR

